



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEBARAN INFORMASI
PUBLIK MELALUI FORUM TATAP MUKA
DI BADAN INFORMASI PUBLIK KEMKOMINFO**

TESIS

**EKO SLAMET RIYANTO
0706186493**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEBARAN INFORMASI
PUBLIK MELALUI FORUM TATAP MUKA
DI BADAN INFORMASI PUBLIK KEMKOMINFO**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

**EKO SLAMET RIYANTO
0706186493**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Eko Slamet Riyanto

NPM : 0706186493

Tanda Tangan :

Tanggal : Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Eko Slamet Riyanto
NPM : 0706186493
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul Tesis : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Forum Tatap Muka Di Badan Informasi Publik Kemkominfo

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA (.....)

Penguji Ahli : Prof. Dr. Didik J. Rachbini (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ (.....)

Sekretaris Sidang: Drs. Heri Fathurahman, MSi (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister pada Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Saya menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini. sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan ridho dan berkahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini
3. Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku penguji ahli, Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA selaku ketua sidang, dan Drs. Heri Fathurahman, MSi selaku Sekretaris Sidang yang juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini
4. Segenap jajaran pejabat dan staf di lingkungan Badan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. Informan dan responden yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menjawab pertanyaan peneliti
6. Seluruh staf dan pengajar Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
7. Keluarga dan rekan-rekan seangkatan atas do'a dan dukungannya.

Saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Slamet Riyanto
NPM : 0706186493
Program Studi : Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Forum Tatap Muka Di Badan Informasi Publik Kemkominfo

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal :

Yang menyatakan

(Eko Slamet Riyanto)

ABSTRAK

Name : Eko Slamet Riyanto
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul Tesis : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Forum Tatap Muka Di Badan Informasi Publik Kemkominfo.

Kondisi eksisting dewasa ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi tidak sama, Selain itu, kondisi saat ini juga menunjukkan informasi publik tidak tersebar secara luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat di semua daerah. Informasi publik kian penting artinya dalam menghadapi tantangan pembentukan karakter bangsa di tengah pergaulan dunia global. Dalam usaha penyebaran informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat pemerintah membentuk Badan Informasi Publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Badan informasi Publik (BIP) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik. Perpres tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.

Kebijakan penyebaran informasi publik merupakan sebuah kebijakan di BIP, kebijakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan yang strategis dan penting, selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bangsa Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, sehingga implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka sudah seharusnya menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi secara jelas dan tuntas. Untuk dapat mengukur dapat tidaknya program atau kebijakan mencapai sasaran atau tujuan seperti yang diinginkan, Edward III berpendapat ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bertolak dari latar belakang masalah, pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan positivistis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo sudah cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya respon yang cukup antusias dari peserta tatap muka terhadap tanggapan kegiatan

forum tatap muka dalam rangka penyebaran informasi publik, adanya peran serta publik dalam penelitian ini adalah peserta forum tatap muka yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan forum tatap muka.

Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi adalah faktor komunikasi, sumber daya dan disposisi. Ketiga faktor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik. Sedangkan faktor struktur birokrasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo.

Kata kunci : penyebaran informasi, implementasi kebijakan



ABSTRACT

Name : Eko Slamet Riyanto
Program Study : Administration Sciences
Thesis Title : The Influencing Factors of the Implementation of Public Information Dissemination Policy through Face to Face Forum in Public Information Agency Ministry of Communication and Information Technology.

The ability of Indonesian people in accessing information at the present time are not the same yet. In addition, this condition shows that public informations are not disseminated widely and evenly to various levels of Indonesian people in all area yet. The public information increasingly become significant to face the challenges of the national character building in the midst of the global society. As an effort of public information dissemination, the government has established The Public Information Agency as stated in Presidential Regulation Number 15 Year 2005 concerning amendment to the Presidential Regulation Number 10 Year 2005 regarding Organization Unit and Task of Echelon I of State Ministries of the Republic of Indonesia, which mentions that the Public Information Agency (BIP) has the task to implement a public information service. The regulation has been implemented in the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 25 of 2008 on the organization and working arrangement of the Ministry of Communications and Information Technology.

The policy of public information dissemination must be in accordance with people needs. Its must be a policy which is strategic and important, in addition to the enactment of Law Number 14 Year 2008 on Public Information Transparency, the Indonesian nation has now entering an era of transparency, so that policy implementation of public information dissemination through face-to-face forums are supposed to be an effective means to deliver information clearly and completely. To measure whether a program or policy can reach the goals or objectives as desired before, according Edward III, there are 4 (four) factors affecting the successful of policies implementation which are communication, resources, dispositions and bureaucratic structure. Step from the background matters, this research question is what factors are influencing the implementation of public information dissemination policy. This research is descriptive quantitative with positivist approaches.

The results showed that the policy implementation of public information dissemination through face-to-face forums in the Public Information Agency - Ministry of Communications and Information Technology has been quite successful. This is shown by the enthusiastic response from the participants in giving feedback and the existence of public participation as shown by the participants that take active role in the implementation of face-to-face forum.

The factors that influence the policy implementation of public information dissemination are communication factor, resources and dispositions. All three factors provide a significant impact on the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency. While the bureaucratic structure factor does not give significant effect on the success of the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency, Ministry of Communications and Information Technology.

Keywords: policy implementation, public information

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Signifikansi Penelitian.....	7
1.4.1 Signifikansi Akademik	7
1.4.2 Signifikansi Praktik.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN LITERATUR.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
2.2 Informasi Publik.....	12
2.2.1 Organisasi Layanan Publik.....	12
2.2.2 Informasi Publik.....	16
2.3 Kebijakan Publik.....	20
2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik	20
2.3.2 Implementasi Kebijakan	27
2.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan	32
2.5 Evaluasi Implementasi Kebijakan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	40
3.2 Operasional Variabel Penelitian.....	42
3.3 Lokasi Penelitian	45
3.4 Populasi Dan Sampel.....	45
3.5 Pengumpulan Data	47
3.5.1 Wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>)	47
3.5.2 Pengisian kuesioner	47
3.5.3 Observasi.....	48
3.6 Uji Validitas dan Realiabilitas Instrumen	48

3.7	Analisis Data.....	50
3.7.1	Analisis Distribusi Frekuensi.....	51
3.7.2	Analisis Regresi.....	51
3.7.3	Hipotesis	53
BAB IV	GAMBARAN UMUM.....	54
4.1	Badan Informasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika	54
4.2	Visi Dan Misi Badan Informasi Publik.....	55
4.3	Tujuan Dan Sasaran Badan Informasi Publik.....	57
4.3.1	Tujuan	57
4.3.2	Sasaran	57
4.4	Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo	58
BAB V	ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
5.1	Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik	63
5.2	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	68
5.3	Karakteristik Responden.....	72
5.4	Hasil Analisis Distribusi Frekuensi	74
5.5	Hasil Analisis Regresi	92
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
6.1	Kesimpulan.....	98
6.2	Saran	99
	DAFTAR PUSTAKA	100
	LAMPIRAN	

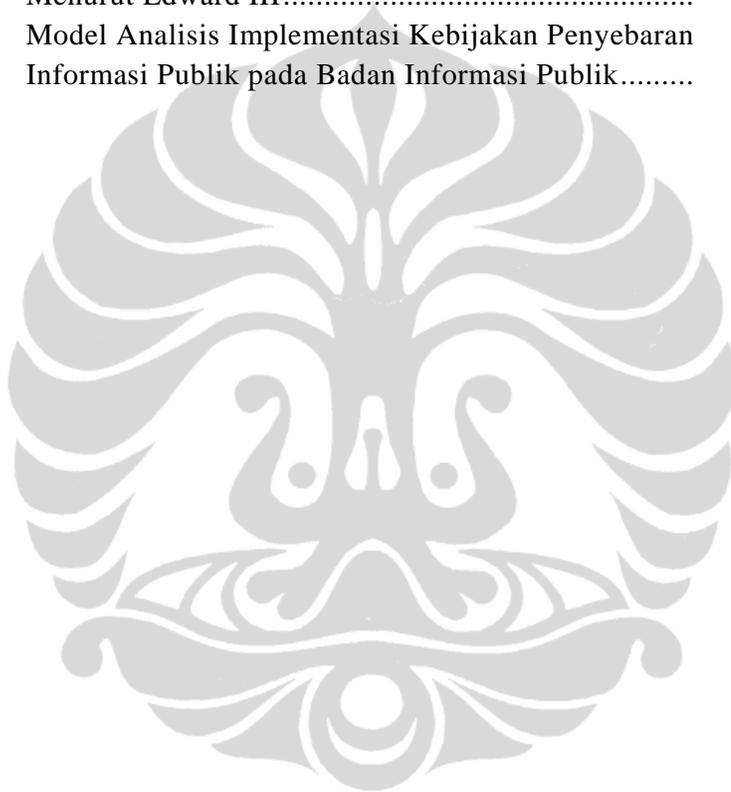
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Variabel Penelitian	44
Tabel 3.2	Penentuan Jumlah Sampel Krejcie Dan Morgan.....	46
Tabel 5.1	Hasil Uji Validitas Variabel Komunikasi	68
Tabel 5.2	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Komunikasi	69
Tabel 5.3	Hasil Uji Validitas Variabel Sumber Daya.....	69
Tabel 5.4	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sumber Daya	69
Tabel 5.5	Hasil Uji Validitas Variabel Disposisi (Sikap).....	70
Tabel 5.6	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Disposisi.....	70
Tabel 5.7	Hasil Uji Validitas Variabel Struktur Birokrasi.....	70
Tabel 5.8	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Struktur Birokrasi	71
Tabel 5.9	Hasil Uji Validitas Variabel Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik	71
Tabel 5.10	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik .	72
Tabel 5.11	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	73
Tabel 5.12	Profil Responden Dikelompokan Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	73
Tabel 5.13	Profil Responden Dikelompokan Berdasarkan Pekerjaan	73
Tabel 5.14	Tanggapan Responden Terhadap Penjelasan Narasumber	75
Tabel 5.15	Tanggapan Responden terhadap Komunikasi Dua Arah Forum Tatap Muka	76
Tabel 5.16	Tanggapan Responden terhadap Konten Informasi yang Disampaikan.....	78
Tabel 5.17	Tanggapan Responden terhadap Tehnik Penyampaian Narasumber	79
Tabel 5.18	Tanggapan Responden terhadap Materi yang Disampaikan Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan.....	80
Tabel 5.19	Tanggapan Responden terhadap Informasi yang Disampaikan Narasumber Memberikan Pemahaman	81
Tabel 5.20	Tanggapan Responden terhadap Sarana Prasana	82
Tabel 5.21	Tanggapan Responden Terhadap Pemanfaatan Media Selain Forum Tatap Muka.....	83
Tabel 5.22	Tanggapan Responden terhadap Ketertarikan dengan Pelaksanaan Forum Tatap Muka	84
Tabel 5.23	Tanggapan Responden terhadap Penerapan Dalam Kehidupan Sehari-hari	85
Tabel 5.24	Tanggapan Responden terhadap Manfaat Mengikuti Forum Tatap Muka	86

Tabel 5.25 Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Forum Tatap Muka Terkait Penyebaran Informasi Publik	87
Tabel 5.26 Tanggapan Responden terhadap Kinerja Pelaksana Forum Tatap Muka	88
Tabel 5.27 Tanggapan Responden Terhadap Koordinasi Pelaksana Forum Tatap Muka Antara Pusat dan Daerah	89
Tabel 5.28 Tanggapan Responden terhadap Peningkatan Pemahaman Atas Substansi Informasi Yang Disampaikan Melalui Forum Tatap Muka	90
Tabel 5.29 Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan Forum Tatap Muka Sudah Berjalan Efektif dan Efesien	91
Tabel 5.30 Tanggapan Responden terhadap Sasaran Khalayak yang Tepat Berdasarkan Pekerjaan Dan Pendidikan Terakhir	92
Tabel 5.31 Hasil Analisis Pengujian Secara Bersama Variabel Tak Bebas Terhadap Variabel Bebas.....	93
Tabel 5.32 Hasil Analisis Untuk Koefesien Regresi Secara Parsial	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Manajemen Siklus Hidup Informasi Pemerintah..	14
Gambar 2.2	Proses Kebijakan Publik.....	24
Gambar 2.3	Hirarkhi Dalam Proses Penyusunan Kebijakan.....	26
Gambar 2.4	Proses Implementasi Kebijakan	30
Gambar 2.5	Dimensi Kebijakan Publik	38
Gambar 3.1	Model Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Menurut Edward III.....	43
Gambar 3.2	Model Analisis Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik pada Badan Informasi Publik.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Panduan Wawancara
Lampiran II	Hasil Wawancara
Lampiran III	Kuesioner
Lampiran IV	Data Hasil Kuesioner
Lampiran V	Data Hasil Analisis Distribusi Frekuensi



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi publik dapat dimaknai informasi tentang kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat yang harus diketahui dan dipahami secara akurat oleh masyarakat. Selain itu juga dapat diartikan informasi yang bersifat mendesak atas konteks tertentu sebagai bentuk penjelasan atas isu yang berkembang di masyarakat.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, dimiliki, dihimpun, atau dikuasai oleh suatu badan publik, sehubungan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dijalankannya dan melekat pada badan publik tersebut, serta mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan masyarakat.

Kondisi eksisting dewasa ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi tidak sama, bukan saja terhadap media yang berbasis teknologi komunikasi dan informatika, tetapi juga terhadap media konvensional. Kesenjangan informasi terjadi antara masyarakat yang mampu dengan yang kurang mampu tingkat kehidupan ekonominya, antara masyarakat yang berpendidikan dengan yang kurang berpendidikan, dan antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan yang ada di pedesaan.

Selain itu, kondisi saat ini juga menunjukkan informasi publik tidak tersebar secara luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat di semua daerah, tidak semua pemerintah daerah menganggap penting adanya sebuah lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang khusus mengelola penyebaran informasi dan umpan balik (*feedback*) masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan negara serta pelaksanaannya kurang dapat diserap secara optimal oleh pemerintah. Di era reformasi saat ini, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan (*obligation to tell*) informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat memiliki

hak untuk mengetahui (*right to know*) khususnya informasi tentang kebijakan pemerintah yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Informasi mengenai kebijakan pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Informasi tersebut menjadi semakin penting, karena dalam menentukan kebijakan publik, tidak lagi dilakukan secara sepihak. Artinya, proses penentuan kebijakan publik tersebut harus dapat menyerap aspirasi masyarakat. Karena itu kebijakan publik perlu dikomunikasikan kepada masyarakat guna mendapat umpan balik dari masyarakat melalui kegiatan penyebaran.

Kendala lain yang dihadapi dalam penyebaran informasi dari segi media, baik media cetak maupun media penyiaran. Media memiliki *setting* sendiri, sehingga ruang (di media cetak dan media *online*) dan waktu atau *duration* (di media penyiaran) yang disediakan untuk informasi publik tentang kebijakan pemerintah dan negara terbatas, kurang lengkap, akurat dan seimbang.

Karena itu kondisi masa depan yang diharapkan adalah terselenggaranya pelayanan informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara cepat (relevan dengan masalah yang sedang dihadapi pemerintah), akurat (dapat dipercaya), mudah (tidak melalui prosedur yang rumit) dan merata (terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat).

Fungsi pelayanan informasi publik sebenarnya telah diperankan oleh media massa, lembaga swadaya atau lembaga media komunitas. Namun peran pemerintah sangat diperlukan dalam proses komunikasi penyebaran informasi publik, khususnya informasi tentang kebijakan dan program pemerintah yang harus diketahui dan dipahami masyarakat luas. Fasilitasi memang menjadi kewajiban pemerintah dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik.

Secara nasional, pemerintah terus memegang komitmen dalam fasilitasi serta pengembangan layanan informasi publik sesuai dengan amanat Pasal 28 F UUD 1945. Informasi publik kian penting artinya dalam menghadapi tantangan pembentukan karakter bangsa di tengah pergaulan dunia global. Dalam usaha

penyebaran informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat pemerintah membentuk Badan Informasi Publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Badan Informasi Publik (BIP) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik. Perpres tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.

Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika dibentuk untuk mengelola informasi guna kebutuhan seluruh elemen bangsa dan negara. Sejak awal dibentuk, Badan Informasi Publik berupaya mengembangkan layanan dibidang komunikasi dan informasi secara tepat dan sinergis dengan perkembangan teknologi yang ada. Dalam Permenkominfo No. 25 Tahun 2008, untuk melaksanakan tugas pelayanan informasi publik, BIP menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan penyediaan informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
- c. Pelaksanaan penyebaran informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat baik langsung kepada masyarakat maupun melalui media komunikasi;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyebaran informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
- e. Pelaksanaan pengelolaan pendapat umum/opini publik ;
- f. Pelaksanaan administrasi badan.

Untuk melaksanakan salah satu fungsi BIP dalam pelaksanaan penyebaran informasi publik, BIP telah mengembangkan kebijakan dan program dalam proses

penyebaran informasi publik, diantaranya pengembangan dan penguatan kelembagaan yang status dan perannya melakukan sosialisasi kebijakan dan program pemerintah agar menjadi acuan dan referensi dalam pemecahan persoalan yang ada.

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun birokrasi pemerintah.

Menurut Dwidjowidjoto (2006:119 dan 155) implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam proses kebijakan karena implementasi kebijakan sebenarnya bukan hanya sekedar menyangkut mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat karena masalah yang kadang tidak dijumpai dalam perumusan kebijakan muncul dilapangan. Selain itu, implementasi kebijakan menjadi dasar bagi evaluasi kebijakan sehingga dapat diketahui kinerja suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sehingga tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat akan tergantung pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan semata, tetapi bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. Sedangkan kegagalan kebijakan dapat disebabkan tidak diimplementasikan, dapat pula karena implementasi yang tidak berhasil atau eksekusi yang salah serta kebijakan yang salah (Hogwood dan Gunn : 1986).

Salah satu kebijakan BIP dalam penyebaran informasi adalah melakukan penguatan koordinasi lembaga-lembaga pelayanan informasi publik baik dipusat maupun daerah untuk mengembangkan sinergi pelayanan yang ada. Sehingga dengan adanya sinergi maka setiap ada permasalahan atau kebutuhan penyebaran informasi akan bisa dilakukan secara proaktif dan bisa menjangkau seluruh

lapisan masyarakat. Menurut Wahab (2004:63) terdapat tiga pihak yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan publik, yaitu pembuat kebijakan, pejabat/aparat pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yaitu kepada siapa kebijakan tersebut ditujukan.

Fasilitasi pelancaran arus informasi antar lembaga ditujukan untuk mendorong penyebaran dan pemerataan informasi agar sampai kepada sasaran khalayak. Salah satu faktor pendukung bagi terciptanya pelancaran arus informasi ini adalah terwujudnya kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi serta adanya jaminan terhadap akses informasi publik.

Kegiatan yang selama ini telah dilakukan BIP dalam rangka proses penyebaran informasi, yaitu sosialisasi atau penyebaran informasi melalui berbagai media diantaranya media tradisional seperti pagelaran wayang kulit di Pulau Jawa khususnya atau pagelaran kesenian daerah lainnya, forum dialog interaktif, dan forum tatap muka yang dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia.

Penyampaian dan penyebaran informasi dalam rangka memasarkan kebijakan dan program pemerintah bukan hal yang mudah, apalagi kepada masyarakat yang relatif beragam begitu banyak faktor yang mempengaruhi proses penyebaran. Oleh karena itu diperlukan cara pendekatan khusus dalam kegiatan penyebaran dan pengelolaan informasi publik dapat berjalan efektif dan mudah diterima atau dipahami masyarakat. Dalam proses penyebaran informasi, seluruh media akan dimanfaatkan secara konvergen dan maksimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari berbagai aspek (tingkat penyebaran, pemerataan, pemahaman, dan kemudahan akses) bagi sasaran khalayak.

Penyebaran informasi, data dan sumber pengetahuan yang dimiliki pemerintah (kecuali yang bersifat rahasia negara) kepada seluruh komponen masyarakat baik individu maupun kelompok akan mendorong setiap komponen tersebut untuk menggunakannya secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan kondisi yang ada sekarang ini, terkadang masih terasa sangat sulit untuk memperoleh suatu informasi, data, maupun sumber

pengetahuan yang dimiliki pemerintah yang sebetulnya dapat bermanfaat sekali bagi masyarakat.

Di samping itu, masalah lain yang mungkin dihadapi di negara kita adalah belum adanya format maupun standar-standar yang mengatur tentang kemasan atau isi dari sebuah informasi itu sendiri sehingga memudahkan untuk diakses dan dimengerti oleh penggunanya. Mengamati fenomena di atas maka masalah penyebaran informasi publik khususnya kebijakan dan program pemerintah menarik dan layak untuk diteliti. Hal lain yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa kebijakan publik dalam penelitian ini adalah kebijakan dalam penyebaran informasi publik harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang strategis dan penting, selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bangsa Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, sehingga implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka sudah seharusnya menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi secara jelas dan tuntas.

BIP sebagai salah satu badan publik yang menjalankan fungsi penyebaran informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat baik langsung kepada masyarakat maupun melalui media komunikasi mempunyai peran yang cukup besar dalam rangka menyebarkan informasi publik secara akurat, lengkap, dan seimbang.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas maka masalah yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Badan Informasi Publik dalam penyebaran informasi publik?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di BIP.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di BIP.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

1. Kesempatan dalam menerapkan dan menggunakan konsep-konsep ilmu pengetahuan khususnya dibidang kebijakan publik.
2. Merupakan sarana latihan untuk menangani permasalahan yang dihadapi lembaga atau departemen dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
3. Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun studi perbandingan dibidang implementasi kebijakan publik dalam penyebaran informasi publik.

1.4.2 Signifikansi Praktik

1. Dapat membantu instansi di daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Dapat membantu instansi terkait dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyebaran informasi.
3. Dapat membantu para *stakeholders* dalam mengembangkan strategi penyebaran informasi yang lebih komunikatif dan efektif.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dituangkan ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diuraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Pada bagian tinjauan literatur dijelaskan tentang Informasi Publik, Pengertian Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan, Evaluasi Implementasi Kebijakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian yang digunakan, Operasional Variabel Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen, Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini diuraikan pembentukan Badan Informasi Publik, tujuan dan sasaran, visi dan misi, serta kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika

BAB V : ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil analisis dari data yang terkumpul meliputi analisis Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen, Analisis Deskriptif Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan meliputi analisis distribusi frekuensi, analisis nilai rata-rata tertimbang dan analisis regresi.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban pertanyaan penelitian yang berdasarkan atas hasil analisis yang lebih mengarah pada bentuk abstraksi, bukan ringkasan. Saran adalah jawaban konkret yang sifatnya penyelesaian masalah atas pertanyaan penelitian.



BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian (tesis) yang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik telah banyak dilakukan oleh mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia, di antaranya Iwan Asaad (2002) : “*Faktor-faktor Yang Mendukung Implementasi Kebijakan Kapet*” : Suatu Studi Pada Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan dua tahap yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dimaksudkan mendapatkan teori-teori dasar dari berbagai paradigm, konsep-konsep pemikiran, pendapat dan pandangan yang dikemukakan oleh para pakar terdahulu, melalui karya ilmiah, buku-buku, peraturan perundang-undangan, sedangkan studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data empiris yang erat kaitannya dengan variabel penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan KAPET Parepare dapat berhasil dengan baik, yaitu faktor komunikasi yang melihat pemahaman pegawai terhadap uraian tugas dari pekerjaannya yang menjadi tanggung jawab, disamping adanya kejelasan dalam menerima perintah dari atasan dan melaksanakannya dengan baik.

Penelitian Sunawan Agung Saksono (2002) : “*Studi Persepsi Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyatuan Anggaran Rutin dan Pembangunan (Unified Budget) di MPR RI.*” Ada 4 (empat) hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini, yaitu (1) Substansi pelaksanaan kebijakan penyatuan anggaran (*unified budgeting*), secara garis besar dapat diilustrasikan bahwa kebijakan penyatuan anggaran merupakan syarat utama dalam penerapan sistem anggaran berbasis kinerja. (2) Penetapan pagu anggaran dalam sistem penyatuan

anggaran, yang dilaksanakan belum diukur berdasarkan output kegiatan, namun masih berdasarkan penjumlahan terhadap pagu anggaran rutin dan pagu anggaran pembangunan sehingga penetapannya masih *incremental* yang dianut dalam sistem anggaran *konvensional line butir*. (3) Hambatan-hambatan utama dalam penyatuan anggaran pada kelompok pembahas, kurangnya komunikasi dan koordinasi berupa minimnya tempat penyaluran terhadap kesulitan di lapangan, kurangnya kesatuan persepsi dengan pihak terkait. (4) Hambatan-hambatan untuk kelompok perencana, kurangnya komunikasi dan koordinasi tentang pelaksanaan kebijakan sehingga kesulitan-kesulitan di lapangan dirasakan tidak bisa diselesaikan dengan petunjuk teknis yang ada dan kurangnya kesatuan persepsi dengan pihak terkait.

Penelitian Suyadi (2002) : “*Studi Persepsi Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Penyusunan Anggaran Di Indonesia*” : Studi Kasus pada Departemen Pertanian. Tesis ini ingin mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan KPJM di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi Edward III, ada empat faktor atau variabel yang dianalisis yaitu, faktor komunikasi, sumber daya, sikap aparat pelaksana dan struktur birokrasi. Metode analisis penelitian ini deskriptif kuantitatif yaitu menilai determinasi setiap faktor/variabel dan mengukur besaran nilai rata-rata tertimbang dari indikator-indikator setiap variabel, kemudian mendeskripsikan secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum faktor komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi cukup mendukung implementasi KPJM. Namun masih terdapat beberapa indikator yang bernilai masih kurang, antara lain: indikator konsistensi komunikasi dari variabel komunikasi, indikator informasi dan referensi dari variabel sumber daya, dan indikator prosedur operasional serta indikator komunikasi antar organisasi dari variabel struktur birokrasi.

2.2 Informasi Publik

2.2.1 Organisasi Layanan Publik

Informasi layanan pemerintah pada saat sekarang ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan serta mempunyai peranan yang penting dalam bidang politik, ekonomi dan sosial bagi setiap negara, tidak hanya Indonesia. Apalagi dalam era reformasi yang sekarang melanda dunia, kebutuhan akan informasi terasa sangat kuat dan menuntut kemudahan-kemudahan serta kualitas dari informasi yang semakin meningkat. Berbagai media digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat, mudah, akurat, dan terpercaya. Informasi sudah merupakan kebutuhan pokok yang mutlak harus dipenuhi untuk dapat hidup dan bersaing dengan kondisi sekarang. Bagi sebuah negara tentunya informasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di negara tersebut.

Penyebaran informasi, data dan sumber pengetahuan yang dimiliki pemerintah (kecuali yang bersifat rahasia negara) kepada seluruh komponen masyarakat baik individu maupun kelompok akan mendorong setiap komponen tersebut untuk menggunakannya secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhannya.

Penekanan di atas merupakan tantangan yang harus kita jawab dengan penuh pengertian dari semua komponen yang terlibat. Sedangkan kondisi yang ada di Indonesia sekarang ini, terkadang masih terasa sangat sulit untuk memperoleh suatu informasi, data, maupun sumber pengetahuan yang dimiliki pemerintah yang sebetulnya dapat bermanfaat sekali bagi masyarakat.

Di samping itu, masalah lain yang mungkin dihadapi di negara kita adalah belum adanya format maupun standar-standar yang mengatur tentang kemasan atau isi dari sebuah informasi itu sendiri sehingga memudahkan untuk diakses dan dimengerti oleh penggunanya. Pada kenyataannya, terkadang lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi sejenis seperti Pemerintah Daerah (Pemda), untuk layanan yang sama mempunyai format informasi yang belum tentu sama. Oleh karena itu, perlu dipikirkan untuk membuat suatu format-format yang bisa menjadi

standar bagi semua lembaga tentang suatu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pendokumentasian dan penyebarluasan informasi layanan pemerintah merupakan konsekuensi dari kewajiban pemerintah untuk memberitahukan (*obligation to tell*) informasi-informasi, khususnya informasi tentang layanan yang disediakan pemerintah, kepada masyarakat, yang memiliki hak untuk mengetahui (*right to know*) informasi tersebut, serta instansi pemerintah lainnya yang membutuhkan informasi tentang layanan-layanan tersebut.

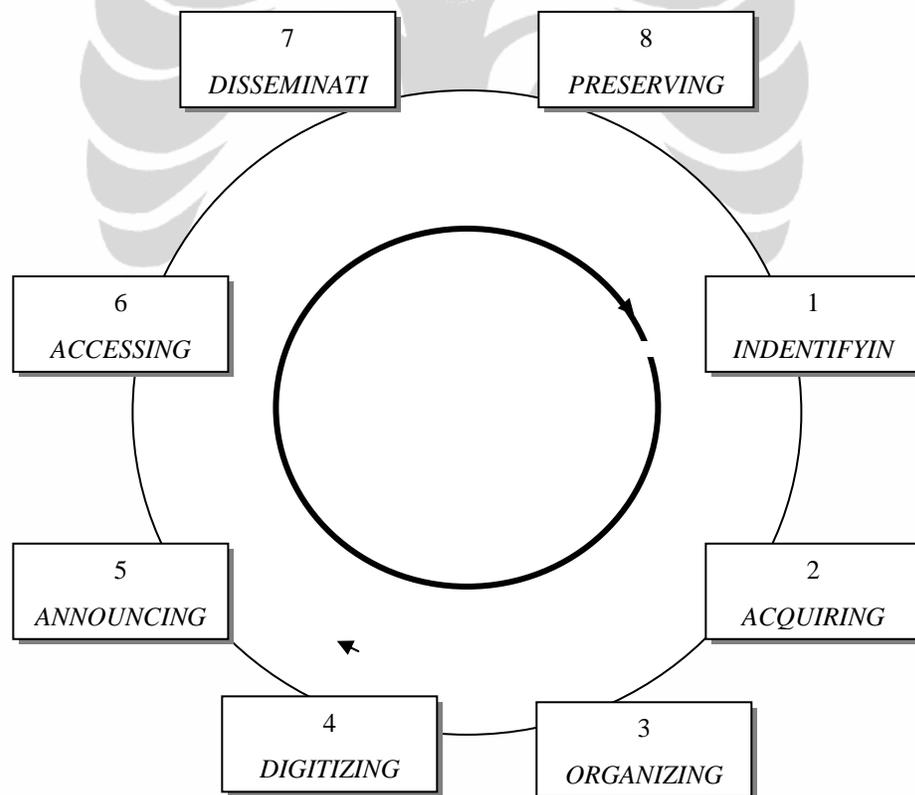
Salah satu bagian terpenting untuk mewujudkan sistem pelayanan informasi tentang layanan dan aturan yang dikeluarkan lembaga pemerintah dan negara adalah suatu standarisasi sistem pengelolaan data. Sementara saat ini setiap lembaga pemerintah dan lembaga negara memiliki karakteristik sistem informasi yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi penerapan sistem pengelolaan dan publikasi informasi dari lembaga pemerintah satu ke lembaga pemerintah yang lain atau sebaliknya.

Sehubungan dengan itu, perlu adanya organisasi layanan informasi yang efektif dan efisien dari pemerintah. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan sebuah panduan bagi setiap lembaga pemerintah yang akan berfungsi sebagai alat untuk mempermudah proses koleksi dan proses analisis data. Informasi yang dikoleksi dan dianalisis ini nantinya akan menjadi bahan/dokumen yang ada dalam sistem *database* informasi layanan.

Lebih lanjut dalam proses menuju peningkatan kualitas layanan yang diselenggarakan pemerintah, diperlukan sebuah proses pemetaan terhadap berbagai informasi layanan lembaga pemerintah. Hal ini merupakan langkah awal yang nantinya dapat mendorong setiap pihak yang berkepentingan terhadap informasi layanan pemerintah untuk dapat menggunakannya secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk memberitahukan (*obligation to tell*) informasi-informasi, khususnya informasi tentang layanan yang disediakan pemerintah, *United States National Commission on Libraries and Information Science* mengeluarkan suatu konsep tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh informasi pemerintah, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, penyebarluasan, penggunaan, penyimpanan, dan pengarsipan. Konsep itu dikenal dengan nama *Government Information Life Cycle Management Process* atau Proses Manajemen Siklus Hidup Informasi Pemerintah. Proses ini memiliki siklus seperti gambar berikut:

Gambar 2.1
Proses Manajemen Siklus Hidup Informasi Pemerintah



1. *Identifying*; Dalam siklus hidup informasi pemerintah ini, selalu dimulai dengan tahapan identifikasi, yaitu mengetahui kondisi informasi yang sudah

ada pada saat ini di dalam pemerintah. Dengan identifikasi ini akan didapat gambaran awal tentang informasi yang ada di pemerintahan.

- 2 *Acquiring*; Setelah informasi yang ada diidentifikasi, maka langkah selanjutnya yaitu bagaimana untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk mendapatkan informasi tersebut dapat dilakukan dengan meminta langsung kepada sumber informasi, atau dengan mewajibkan sumber informasi untuk menyerahkan informasi yang dimilikinya. Informasi harus dapat diperoleh (dikumpulkan) untuk dapat diolah dan diproses sehingga dapat disebarluaskan serta memberikan manfaat.
- 3 *Organizing*; Informasi merupakan salah satu kekuatan yang sangat berarti, hal ini bisa terwujud apabila informasi tersebut dapat digunakan. Supaya informasi yang telah kita dapatkan dapat mempunyai nilai maka perlu adanya pengorganisasian informasi itu sendiri. Langkah-langkah yang dapat dilakukan di sini adalah dengan mengatur struktur dari informasi sehingga lebih mudah untuk dicari, ditemukan, dan digunakan. Apabila informasi yang berhasil diperoleh sangat banyak jumlahnya, maka perlu adanya kategori-kategori maupun *indexing* dari informasi tersebut sehingga lebih mudah untuk diolah.
- 4 *Digitizing*; Setelah informasi yang diperoleh sudah diorganisasikan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses digitalisasi dari informasi. Digitalisasi adalah proses mengubah format informasi dari berupa kertas-kertas tektual ke dalam bentuk digital (*file*).
- 5 *Announcing*; Langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya upaya pihak-pihak yang membutuhkan informasi, dapat mengetahui keberadaan informasi tersebut. Langkah yang harus dilakukan adalah dengan mempublikasikan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Media publikasi ini dapat melalui media *online* seperti internet, maupun media *offline* seperti jurnal, buku-buku, konferensi, seminar, maupun media lainnya.

- 6 *Accessing*; Setelah informasi dipublikasikan kepada pihak yang berkepentingan, maka langkah selanjutnya yaitu bagaimana caranya supaya pengguna informasi dapat mengakses informasi tersebut secara mudah. Kemudahan untuk mengakses informasi ini dapat diperoleh dengan memberitahukan kepada pengguna di mana mereka bisa mengakses (*access point*) informasi tersebut.
- 7 *Disseminating*; Disseminating adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Perbedaan antara *Accessing* dan *disseminating* adalah: (a) *Accessing*: pemerintah memberikan informasi setelah diminta oleh masyarakat atau pengguna informasi; (2) *Disseminating*: pemerintah memberikan informasi tanpa harus diminta oleh masyarakat atau pengguna informasi.
- 8 *Preserving*; Setelah informasi-informasi yang telah disebarluaskan dan digunakan oleh masyarakat, maka informasi tersebut harus terus dipelihara. Untuk memelihara ini dapat dilakukan dengan membuat dokumen-dokumen maupun arsip-arsip tentang informasi. Hal ini perlu dilakukan karena masih dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan.

2.2.2 Informasi Publik

Definisi informasi menurut Shannon dan Weaver adalah “*Information is pattern matter energy that affects the probabilities of alternatives available to an individual making decision*” (informasi merupakan energy yang terpolakan dan mempengaruhi individu dalam keputusan dari kemungkinan-kemungkinan yang ada).

Aubrey Fisher (1986) memberikan 3 (tiga) konsep informasi sebagai berikut :

- a. informasi menunjukkan fakta atau data yang diperoleh selama proses komunikasi. Informasi dikonseptualisasikan sebagai kuantitas fisik yang dapat dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain, individu satu kepada individu yang lain, atau medium yang satu ke medium yang lainnya. Semakin banyak

memperoleh fakta atau data, secara kuantitas seseorang juga memiliki banyak informasi

- b. informasi menunjukkan makna data. Informasi merupakan arti, maksud atau makna yang terkandung dalam data. Peranan seseorang sangat dominan di dalam memberikan makna data. Suatu data akan mempunyai nilai informasi bila bermakna bagi seseorang yang menafsirkannya. Kemampuan seseorang untuk memberikan makna pada data akan menentukan kepemilikan informasi. penafsiran terhadap data atau stimulus yang diterima otak akan menentukan kualitas informasi. Sebagai produk sebuah “pabrik” (otak), kualitas informasi sangat ditentukan oleh berbagai unsure yang digunakan untuk mengolah setiap stimulus yang masuk ke dalam diri seseorang melalui panca indera, kemudian diteruskan ke otak untuk diolah berdasarkan pengetahuan (*frame of reference*), pengalaman (*field of experience*), selera (*frame of interest*), dan keimanan (*spiritual*) seseorang. Semakin luas pengetahuan, pengalaman, dan semakin baik selera dan moralitas maka informasi yang dihasilkan semakin berkualitas. Proses di dalam otak manusia tersebut dikenal dengan proses intelektual (*intellectual process*).
- c. Informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang diukur dengan cara mereduksi sejumlah alternatif yang ada. Informasi berkaitan erat dengan situasi ketidakpastian. Keadaan yang semakin tidak menentu akan menimbulkan banyak alternative informasi, yang dapat digunakan untuk mereduksi ketidakpastian.

Pengertian Informasi Publik mencakup: *Pertama*, informasi tentang kebijakan nasional yang mempunyai dampak luas dan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, oleh karena itu harus diketahui dan dipahami masyarakat. *Kedua*, informasi yang dibutuhkan masyarakat sebagai penjelasan atas isu yang sedang berkembang di dalam masyarakat.

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, dikelola, dimiliki, dihimpun, atau dikuasai oleh suatu badan publik, sehubungan dengan tugas, fungsi

dan wewenang yang dijalankan dan melekat pada badan tersebut, dan mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan masyarakat.

Sedang badan publik adalah badan-badan penyelenggara eksekutif, legislatif dan yudikatif baik di tingkat pusat maupun daerah, dan badan lain yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD, badan hukum milik negara lainnya, organisasi non pemerintah yang dapat dana dari anggaran negara (baik APBN, APBD, maupun non-budgeter) dan badan usaha swasta yang dalam menjalankan sebagian fungsi pelayanan publik, serta badan-badan lain yang menjalankan fungsi pelayanan publik atau aktivitasnya memiliki dampak terhadap hajat hidup orang banyak.

Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di dunia saat ini, terlebih jika kita tinggal dalam suatu negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi rakyatnya. Tertutupnya kebebasan dalam memperoleh informasi dapat berdampak pada banyak hal seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan warga negara yang pada akhirnya juga berdampak pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa. Sementara itu dari segi penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dapat berakibat pada lahirnya pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis.

Dunia sekarang sudah memasuki Era Informasi, dimana informasi adalah kekuasaan ("*from brown to brain*"). Telah terjadi suatu Powershift, kata Alvin Toffler. Era informasi ini sejalan dengan demokratisasi, pengurangan dominasi pemerintah, pemajuan *civil liberties*, *civil society*, hak asasi manusia, pemberdayaan publik dan ihwal lain yang serupa.

Hak atas informasi tersebut meliputi : (1). Hak publik untuk memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya (*right to observe*); (2). Hak publik untuk mendapatkan/mengakses informasi (*public access to information*); (3). Hak publik untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan

kebijakan (*right to participate*); (4). Kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan kebebasan pers (*free and responsible pers*); (5). Hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak di atas diabaikan (*right to appeal*) baik melalui administrasi maupun *adjudikasi* (menggunakan sarana pengadilan semu, arbitrase maupun pengadilan).

Selain itu penyebaran informasi publik memberi peluang rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Rakyat yang *well - informed* akan menjadi kekuatan dan actor dalam proses penentuan dan pengawasan kebijakan publik. Hak itu didasarkan pada pemikiran dan pengalaman empirik bahwa :

- (1) Publik yang lebih banyak mendapat informasi dapat berpartisipasi lebih baik dalam proses demokrasi;
- (2) Parlemen, pers dan publik harus dapat dengan wajar mengikuti dan meneliti tindakan- tindakan pemerintah; kerahasiaan adalah hambatan terbesar pada pertanggung jawaban pemerintah;
- (3) Pegawai pemerintahan mengambil keputusan-keputusan penting yang berdampak pada kepentingan publik; dan agar bertanggung jawab pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan;
- (4) Arus informasi yang lebih baik menghasilkan pemerintahan yang efektif dan membantu pengembangan yang lebih fleksibel;
- (5) Kerjasama antara publik dan pemerintah akan semakin erat karena informasi yang semakin banyak tersedia.

Informasi dapat digambarkan sebagai oksigen dalam suatu negara demokrasi. Negara demokrasi terkait dengan pertanggungjawaban dan tata pemerintahan yang baik. Rakyat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara, oleh karena itu pemberian hak kepada rakyat atas informasi merupakan tiang penyangga yang penting bagi demokrasi.

Dalam konteks fasilitasi pelancaran arus informasi kewajiban lembaga informasi publik adalah untuk mendukung penyebaran dan pemerataan informasi publik ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu elemen bagi terciptanya pelancaran arus informasi publik adalah terciptanya jaringan komunikasi dan koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintahan di pusat dan daerah dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik, serta terciptanya program-program komunikasi yang konvergen dan sirkular antara lembaga publik dengan masyarakat.

2.3 Kebijakan Publik

2.3.1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin, yang berakar dari kata *kota* masuk ke dalam bahasa Latin menjadi *politea* (negara) dan akhirnya ke dalam bahasa Inggris *policy* yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Dunn, 1999:10).

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Menurut Mustopadidjaja (1998:30) istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya.

Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor guna memecahkan suatu masalah tertentu. Senada dengan pendapat Anderson tersebut di atas, dikemukakan oleh Friederich sebagaimana dikutip Anderson (1979:2):

“...a proposed course of action of person, group or government within a given environment providing obstscies and opportunities which the policy was

proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a pupose”

Thomas R. Dye (1978:3) mengemukakan bahwa “*Public policy is whatever government chose to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkap oleh Thomas Dye telah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik. Kebijakan bukan hanya keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakat pun juga memiliki tuntutan-tuntutan (keinginan), sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu mencakup apa yang dilakukan, mengapa mereka melakukannya, dan bagaimana akibatnya.

Kebijakan publik didefinisikan sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Dunn, 2000:132). Kebijakan publik terdiri dari dimensi kegiatan manusia yang membutuhkan campur tangan pemerintah atau masyarakat berupa aturan atau intervensi atau setidaknya tindakan masyarakat (Parsons (terjemahan), 2005:5). Heglo (Abidin, 2004:21) menyebutkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end,*” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya Jones (terjemahan, 1996:47) berpendapat bahwa kebijakan adalah keputusan tetap, yang memiliki ciri konsistensi dan pengulangan perilaku pembuat dan mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Anderson dalam Islamy (1994:20) mengemukakan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik yang antara lain mencakup:

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;

3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan lakukan atau menyatakan akan lakukan;
4. Bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu; dan
5. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Easton (Abidin, 2004:20) mengemukakan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai: “pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan definisi ini Easton menegaskan bahwa hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat pada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai pada masyarakat.

Kebijakan publik merupakan dimensi pertama yang menjadi pokok perhatian administrasi negara. Untuk sementara proses pembentukan masalah pemerintah, pemecahan masalah, penentuan kebijakan, penerapan dan evaluasi kebijakan tersebut dapat dipergunakan sebagai gambaran pengertian kebijakan publik. Sementara itu, pengertian kebijakan publik dikemukakan oleh Dwijowijoto (2004:3) yang mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Yang dimaksud dengan pemerintah disini adalah negara.

Kebijakan publik yang demikian kompleks, diungkapkan oleh Lindblom (1986:13) yaitu bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses yang amat kompleks, bersifat analitis dan politis yang tidak mempunyai awal atau akhir dan batas-batas dari proses tersebut pada umumnya tidak pasti. Kadangkala rangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks yang merupakan proses pembuat kebijakan itu, menghasilkan suatu akibat yang kita namakan kebijakan. Namun Lindblom (1986:14) memperingatkan adanya bahaya yang harus diperhatikan dalam membuat

pengkategorian atau pembagian secara kaku pada proses pembuatan suatu kebijakan. Lebih lanjut dikatakan bahwa pendekatan tahap demi tahap juga mengandung resiko jatuh ke dalam anggapan bahwa perumusan kebijakan berlangsung melalui proses yang relatif urut dan rasionalitas, seperti penyusunan karya tulis yang harus mempunyai bagian pendahuluan, isi dan penutup, dan masing-masing bagian terangkai secara logis dengan bagian sebelum atau sesudahnya. Beberapa ciri dari perumusan kebijakan menolak keras anggapan seperti itu. Meskipun demikian adalah masuk akal memandang setiap rumusan kebijakan melalui tahapan proses perumusannya, sebab adalah tidak mungkin memakai suatu kebijakan secara umum tanpa menggunakan batasan-batasan tertentu terutama apabila ingin mengungkap lebih mendalam bagaimana suatu kebijakan dapat terjadi.

Dari pengertian-pengertian kebijakan publik di atas memperlihatkan bahwa aspek-aspek kebijakan publik adalah sangat kompleks. Pertama, dalam pelaksanaannya yang menyangkut strukturnya. Struktur yang ada dalam sistem pemerintahan seringkali menimbulkan konflik dalam implementasi kebijakan karena adanya perbedaan kepentingan pada masing-masing jenjang pemerintah. Kedua, bahwa tidak semua kebijakan pemerintah dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah sendiri. Ketiga, bahwa kebijakan yang diambil pemerintah akan selalu menimbulkan akibat terhadap kehidupan warga negara.

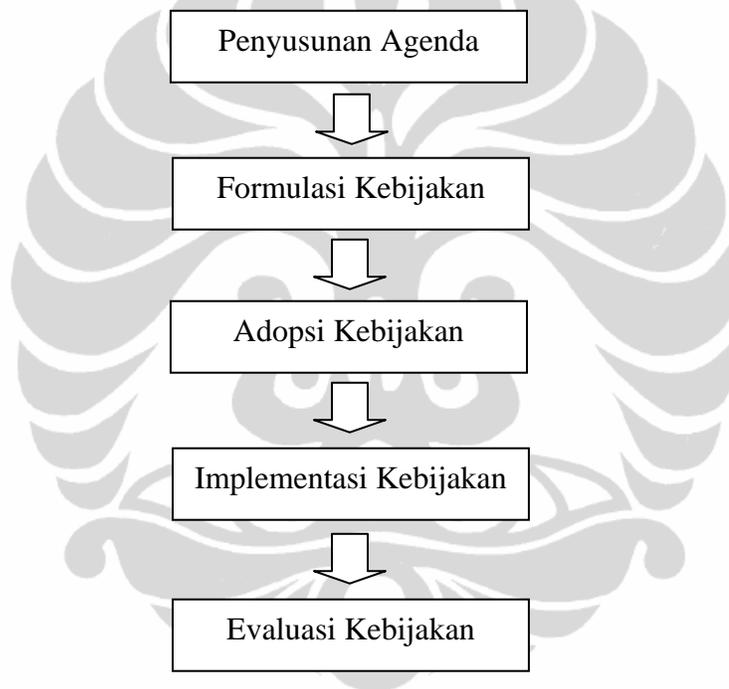
Pembuatan kebijakan publik melibatkan banyak proses maupun variabel yang mempengaruhinya. Kerangka kerja kebijakan publik sangat ditentukan oleh faktor variabel yang terkandung di dalamnya. Variabel yang mempengaruhi suatu kebijakan publik adalah sebagai berikut (Subarsono, 2005:10) :

1. Tujuan yang hendak dicapai
2. Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan
5. Lingkungan kondisi social, ekonomi, dan politik

6. Strategi yang digunakan

Proses pembuatan kebijakan publik dibagi dalam beberapa tahapan yang dikelompokkan untuk memudahkan menganalisis kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik dikelompokkan oleh Dunn (2000), sebagai berikut :

Gambar 2.2
Proses Kebijakan Publik



Sumber : Dunn, 2000

Langkah pertama bagi pembuat kebijakan adalah merumuskan masalah dan menempatkannya dalam agenda kebijakan. Kemudian masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan dicari pemecahannya yang disusun dalam bentuk formulasi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, dipilih yang terbaik dan selanjutnya mencari dukungan dari pihak legislatif dan yudikatif. Apabila suatu kebijakan sudah mendapatkan dukungan publik dan telah disusun dalam bentuk program panduan rencana kegiatan, maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh

badan-badan administrasi maupun oleh unit kerja pemerintah di tingkat bawah. Setelah kebijakan dilaksanakan perlu adanya penilaian untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Kebijakan publik pada dasarnya (Mustopadidjaja, 2002:5) merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan.

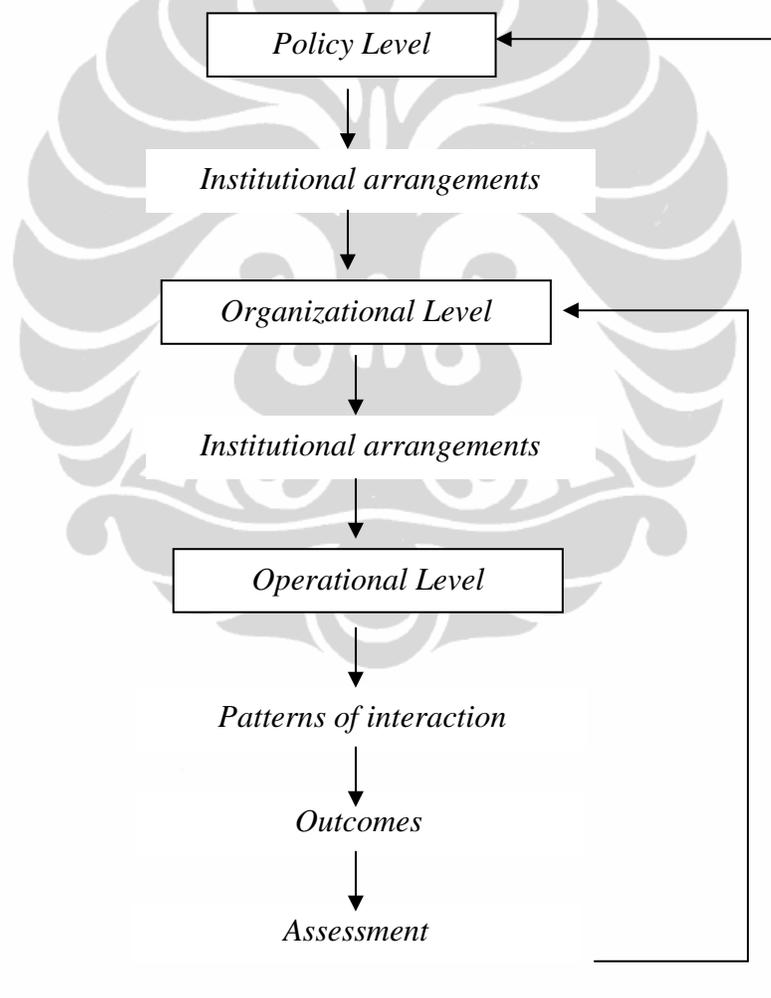
Permasalahan kebijakan adalah konstruksi pikiran yang konseptual dan spesifik keadaan masalah tersebut. Bromley (1989:33) telah menyusun model kebijakan berdasarkan hirarki dalam pengambilan keputusan, ada tiga tingkat dalam hubungan antara peranan institusi dengan proses perubahan institusi yaitu tingkat kebijakan (*policy level*), tingkat organisasi (*organizational level*), dan tingkat operasional (*operational level*). Pada tingkat kebijakan pandangan-pandangan umum dari masyarakat diperdebatkan dan diformulasikan melalui badan legislatif, sedangkan implementasi dari aspirasi tersebut dilakukan oleh badan eksekutif melalui perundangan-undangan tentang bagaimana organisasi tersebut diselenggarakan.

Hasil tingkat operasional yang merupakan interaksi produk yang akan diperhatikan oleh masyarakat mengenai baik atau buruknya implementasi kebijakan. Outputnya dapat berupa jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan, kualitas sesuai dengan teknis yang disyaratkan cepat dan tepat, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku. Apabila hasilnya buruk maka akan muncul reaksi masyarakat melalui proses politik dengan tujuan memperbaiki output. Reaksi dari masyarakat itu akan diarahkan ke tingkat kebijakan untuk mencari konstelasi baru dari kelembagaan, misalnya perubahan peraturan perundangan-undangan dan peraturan pelaksanaannya.

Terhadap segala aspek perubahan, birokrasi memegang peranan kunci pada tingkat kebijakan, tingkat organisasi dan tingkat operasional. Lebih lanjut Bromley

(1989:32) mengemukakan bahwa posisi kunci ini semakin penting mengingat hasil-hasil karya birokrasi berupa kebijakan publik merupakan sumber penting perubahan kelembagaan. Maksudnya jenis, skala dan tingkat kebijakan kelembagaan baik dalam arti norma, struktur, maupun *ruller* yang berkembang di dalam masyarakat. Perubahan tersebut dengan mengarah pada *order* masyarakat yang lebih baik kalau sifat perubahannya mendorong efisiensi dan pertumbuhan.

Gambar 2.3
Hirarkhi Dalam Proses Penyusunan Kebijakan



Sumber : Bromley (1989:33)

2.3.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik menurut kamus Webster dalam Wahab (1991:50) diartikan “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dengan demikian, implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Menurut Bullock dalam Anderson (1976:76) disebutkan bahwa implementasi kebijakan atau penerapan kebijakan merupakan kebijakan yang telah diputuskan untuk dilaksanakan dengan mengerahkan birokrasi pemerintah. Dengan kata lain, apa yang akan terjadi setelah kebijakan atau undang-undang berubah menjadi program kerja. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Selanjutnya Jones (1984) sebagaimana diikuti Widodo (2001:191) mengartikan implementasi kebijakan publik sebagai “*getting the job done “and” doing “it”*”. Dijelaskan bahwa menurut Jones dalam mengimplementasikan kebijakan dituntut adanya syarat-syarat antara lain, adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan operasional. Oleh karena itu, lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai “*a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*”.

Menurut Dunn (1999:80) implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang bersifat praktis, yang dibedakan dari formulasi kebijakan, yang pada dasarnya bersifat teoritis.

Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Widodo (2001:192) menguraikan batasan implementasi sebagai:

“Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This includes both onetime efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions”.

Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil.

Parsons (2005:464) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara-cara lain. Sedangkan menurut Suharto (2005:87) implementasi kebijakan merupakan pernyataan mengenai cara atau metode dengan kebijakan diterapkan, termasuk juga pengoperasian alternatif kebijakan yang dipilih melalui beberapa program atau kegiatan.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (1991:51) mempelajari implementasi kebijakan berarti memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah atau suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya kebijakan negara baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa-peristiwa.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijakan publik, mulai dari penyusunan agenda kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak ahanya ditentukan oleh

kualitas kebijakan semata, tetapi bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. Dalam praktek implementasi kebijakan negara cenderung mengalami kegagalan. Kegagalan kebijakan dapat disebabkan tidak diimplementasikan, dapat pula karena implementasi yang tidak berhasil atau eksekusi yang salah serta kebijakan yang salah (Hogwood dan Gunn, 1986).

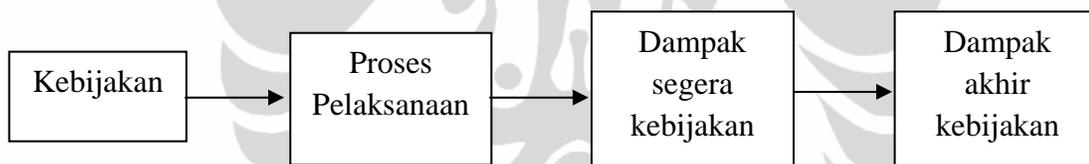
Selanjutnya, dalam proses implementasi diperlukan adanya persiapan yang perlu dilakukan sebagaimana dikemukakan Darwin (1998) dalam Widodo (2001:194) setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi dan manfaat publik. Sedangkan menurut Jones (1986), aktivitas implementasi kebijakan publik melibatkan tiga hal, yaitu: (1) aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan sasaran kebijakan; (2) aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas yang menjelaskan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan; (3) aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktivitas penyediaan sarana secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Dengan demikian implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.

Implementasi kebijakan yang efektif dapat dipahami dan dianalisa dengan menggunakan berbagai model implementasi kebijakan; dan dalam studi kebijakan publik terdapat berbagai model implementasi kebijakan diantaranya model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn (1975), Edwards III (1980), Grindle (1980), Mazmanian dan Sabatier (1983) dan sebagainya. Berbagai model implementasi kebijakan tersebut, ada yang relatif abstrak dan ada pula yang relatif operasional. Penelitian ini tidak bermaksud menilai mana diantara model-model

tersebut yang baik. Penggunaan suatu model tertentu lebih didasarkan pada keperluan analisis semata, tergantung kompleksitas permasalahan kebijakan yang dikaji dan tujuan analisis itu sendiri. Semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin dalam analisis yang dilakukan maka semakin diperlukan teori atau model yang relatif operasional yaitu model yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antarvariabel yang menjadi fokus penelitian.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah diterapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara sistematis seperti berikut :

Gambar 2.4
Proses Implementasi Kebijakan



Sumber : Bambang Sunggono (1994:139)

Dari skema di atas terlihat bahwa proses implementasi kebijakan dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi kebijakan yang segera atau disebut sebagai “*policy performance*”. Secara konkrit antara lain dapat kita lihat jumlah dan is barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat, misalnya. Perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut sebagai “*policy outcome*” atau “*policy impact*”. Dengan demikian di dalam hasil akhir kebijakan termasuk juga hasil-hasil sampingan di samping “*policy performance*” yang diperoleh.

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy (1997 : 102-106) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Solichin Abdul Wahab, 1991 : 36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas
- b. Menentukan standar pelaksanaan
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :

- a. Menentukan jadwal
- b. Melakukan pemantauan
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, (1991) Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implemetasi kebijakan negara.

2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Berbagai model dan teori oleh para pakar telah dikembangkan untuk pembahasan tentang implementasi kebijakan negara baik yang bersifat abstrak maupun yang relatif operasional tergantung pada kompleksitas permasalahan yang akan dikaji. Sebagai pedoman bahwa semakin kompleks permasalahan kebijakan maka semakin mendalam analisis yang dilakukan dan semakin diperlukan model atau teori yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel yang menjadi fokus analisis.

Untuk menganalisis suatu proses implementasi kebijakan itu berlangsung, dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:109-124) mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan. Dalam model ini Van Meter dan Van Horn mendasarkan pada argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Kemudian ditegaskan pula bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang sangat penting dalam prosedur implementasi.

Dalam model pendekatan kebijakan *top down* (Model Rasional) Van Meter dan Van Horn memandang implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dari suatu model konseptual yang mengaitkan kebijakann dengan prestasi kerja. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa perubahan, pengendalian dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang penting dalam prosedur implementasi.

Van Meter dan Van Horn mengembangkan model proses implementasi kebijakan. Dijelaskan dalam Winarno (2002:109-124)) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi enam variabel, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumberdaya kebijakan, (3) komunikasi antar organisasi dan pelaksana, (4) karakteristik pelaksana, (5) kondisi sosial ekonomi dan politik dan (6) organisasi pelaksana.

Edward III (1994:10), mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Variabel-variabel tersebut, yaitu *communication, resources, dispositions* dan *bureaucratic structure*. Dijelaskan bahwa keempat variabel yang mempengaruhi implementasi saling berinteraksi satu sama lain. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi mempengaruhi secara langsung terhadap implementasi kebijakan. Disamping itu terdapat pengaruh tidak langsung diantara variabel tersebut, yaitu melalui dampak satu sama lain. Keempat faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Edward III dalam Winarno mengemukakan faktor komunikasi mempunyai tiga dimensi yaitu dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan

konsistensi (*consistency*). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada para pelaksana kebijakan (*implementers*), tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan agar implementasi kebijakan menjadi efektif. Keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah tersebut dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak-pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga pihak-pihak tersebut mengetahui maksud, tujuan, sasaran dan substansi dari kebijakan publik. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami tetapi juga harus jelas. Jika tidak jelas, para pelaksana kebijakan tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Edwards mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu: (1) kompleksitas kebijakan publik, (2) keinginan untuk tidak mengganggu kelompok masyarakat, (3) kurangnya consensus terhadap tujuan kebijakan, (4) masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, (5) menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan (6) sifat pembuatan kebijakan pengadilan. Ketidakjelasan pesan komunikasi tidak selalu menghalangi implementasi karena pada tataran tertentu para pelaksana dapat bersifat fleksibel dalam melaksanakan kebijakan.

Dimensi ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Perintah-perintah yang saling bertentangan akan menyulitkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya

dengan baik walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan tersebut mempunyai unsur kejelasan. Perintah-perintah pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten juga akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

b. Sumber Daya

meski perintah-perintah implementasi disampaikan secara akurat, jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan, implementasi tidak akan efektif. Sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya meliputi staf dengan jumlah memadai dan keahlian yang tepat untuk menjalankan tugas mereka, serta informasi, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi pelayanan publik yang berfungsi.

c. Disposisi (Sikap)

Edward III memandang disposisi sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementers*) untuk melaksanakan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan kebijakan cukup dan para pelaksana kebijakan mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan dapat jadi masih belum efektif, karena adanya ketidakefisienan struktur birokrasi (Edward III,

1980:11). Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan luar organisasinya.

Selanjutnya Gogin (1990) sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:20) mengemukakan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi yaitu: (1) bentuk dan isi kebijakan; (2) kemampuan organisasi; (3) pengaruh lingkungan. Pendapat senada dikemukakan Mustopadidjaja (2002:6-8), dijelaskan bahwa sistem kebijakan adalah tatanan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan sebagian atau keseluruhan proses kebijakan yang mengakomodasikan kegiatan teknis maupun sosiopolitis serta saling hubungan atau interaksi antar empat faktor dinamik yang merupakan unsure dari sistem kebijakan dan berperan dalam proses kebijakan. Masing-masing unsur dari sistem kebijakan dirumuskan sebagai berikut : (1) lingkungan kebijakan (*policy environment*); (2) pembuat dan pelaksana kebijakan (*policy maker and implementer*); (3) Kebijakan itu sendiri (*policy contents*); dan (4) kelompok sasaran kebijakan (*target groups*).

Selanjutnya, Grindle dalam Tangkilisan (2003:20) menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasilnya. Dijelaskan hasil kebijakan yang akan dicapai akan dipengaruhi oleh variabel isi kebijakan dan konteks kebijakan. Dalam kelompok variabel isi kebijakan Grindle mengidentifikasi variabel-variabel : (1) kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi; (2) tipe-tipe manfaat; (3) derajat perubahan yang diharapkan; (4) letak pengambilan keputusan; (5) pelaksanaan program; (6) sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan dalam kelompok variabel konteks, Grindle mengidentifikasi variabel-variabel : (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga penguasa; (3) kepatuhan dan daya tanggap.

Dari beragamnya pendapat para ahli mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sebagai variabel dependen dan

implementasi kebijakan dalam penyebaran informasi publik merupakan masalah yang kompleks, maka dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyebaran informasi publik, peneliti mengacu kepada model implementasi dari Edward III dimana keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (sikap), dan Struktur Birokrasi.

2.5 Evaluasi Implementasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan bisa meliputi perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan. Suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (*spesification*), pengukuran (*measurement*), analisis, dan rekomendasi.

Menurut William N. Dunn (1999), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi member informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

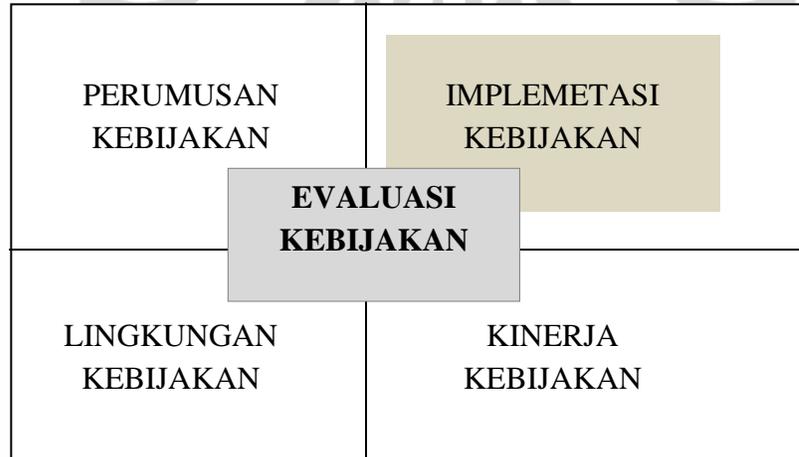
Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut *timing* evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi setelah kebijakan juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*)

kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan, dan atau evaluasi *sumatif*.

James P. Lester dan Joseph Steward, Jr (2000) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; evaluasi dampak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki; dan evaluasi *meta-evaluasi* yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Pemahaman tentang evaluasi kebijakan biasanya bermakna sebagai evaluasi implementasi kebijakan dan/atau evaluasi kinerja atau hasil kebijakan.

Gambar 2.5
Dimensi Kebijakan Publik



Sumber: Dr. Riant Nugroho

Menurut Sofian Effendi, tujuan evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:

- a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independen tertentu.
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan yang memengaruhi variasi *outcome* implementasi kebijakan.
- c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” pengevaluasi untuk memilih variabel-variabel yang dapat diubah, atau *actionable variable*-variabel yang bersifat natural atau variabel yang tidak bisa diubah tidak dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi.

Kegiatan evaluasi adalah langkah menilai suatu kebijakan yang telah dilaksanakan. Menurut M. Irfan Islamy, penilaian kebijakan dapat mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan. Jadi penilaian kebijakan dapat dilakukan pada fase perumusan masalahnya; formulasi usulan kebijakan, implementasi, legitimasi kebijakan. Dalam penelitian ini kegiatan evaluasi diarahkan dan dibatasi pada implementasi kebijakan Badan Informasi Publik dalam usaha menyebarkan informasi publik yang dikaitkan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan informasi.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Kebutuhan pemahaman yang benar dalam menggunakan pendekatan, metode ataupun teknik untuk melakukan penelitian merupakan hal yang penting agar dapat dicapai hasil yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivis. Menurut W. Lawrence Neuman (2003:64) pendekatan positivis pada dasarnya merupakan pendekatan kuantitatif. Menurut Neuman:

Positivism is associated with many specific social theories. Best known is its linkage to the structural-functional, rational choice and exchange-theory frameworks. Positivist researchers prefer precise quantitative data and often use experiments, surveys, and statistics.

Lebih lanjut Neuman (2003:64) mengatakan bahwa :

Positivism sees social science as an organized method for combining deductive with precise empirical observations of individual behavior in order to discover and confirm a set of probabilistic causal laws that can be used to predict general patterns of human activity.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan asumsi-asumsi pendekatan positivis. Pendekatan kuantitatif atau positivis mengikuti pola berpikir deduktif dan mempercayai angka-angka (statistika) sebagai instrumen untuk menjelaskan kebenaran.

Penelitian ini memberikan perhatian utama pada implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik yang berusaha untuk menggambarkan sejauh mana implementasi kebijakan telah berjalan dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Kriteria kualitas penelitian positivis antara lain terlihat dari segi metodologi yang mencakup reliabilitas, validitas dan objektivitas. Reliabilitas adalah pemakaian istilah untuk menunjukkan konsistensi dari data yang dikumpulkan terhadap data yang diperoleh dari sumber lain, serta sejalan dengan apa yang sudah diketahui orang. Validitas yang dimaksud merupakan suatu keyakinan bahwa analisis dan data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan apa yang terjadi di tempat penelitian. Objektivitas merupakan suatu pengukuran yang bebas dari penilaian yang subjektif. Pendekatan positivis berakar pada ilmu-ilmu eksakta dan karena itu dapat disebut pula dengan studi statistik. Dalam pendekatan ini dipersyaratkan adanya variabel yang dikontrol, pengacakan sampel, pengujian validitas dan realibilitas instrumen, dan ditujukan untuk menggeneralisasi sampel ke dalam populasi.

Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kuantitatif menggunakan pendekatan deduktif dalam pengujian teori berdasarkan pendekatan positivis dan memandang objek dalam realitas sosial sebagai fakta yang objektif.

Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai implementasi kebijakan Badan Informasi Publik (BIP) dalam penyebaran informasi publik. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode untuk memahami obyek penelitian dengan berupaya menjelaskan keterkaitan antara variabel penelitian dengan menggunakan perhitungan statistik.

Metode kualitatif adalah penelitian yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam daripada luas atau banyaknya informasi. Penelitian kualitatif berusaha untuk mendapatkan aquiri secara mendalam dengan mencari informasi pada seorang yang telah dipilih dalam kelompok kecil.

Metode kualitatif digunakan untuk menggali lebih dalam informasi mengenai sasaran dan tujuan kebijakan tersebut. Informan yang dipilih dalam metode kualitatif ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan penyebaran informasi.

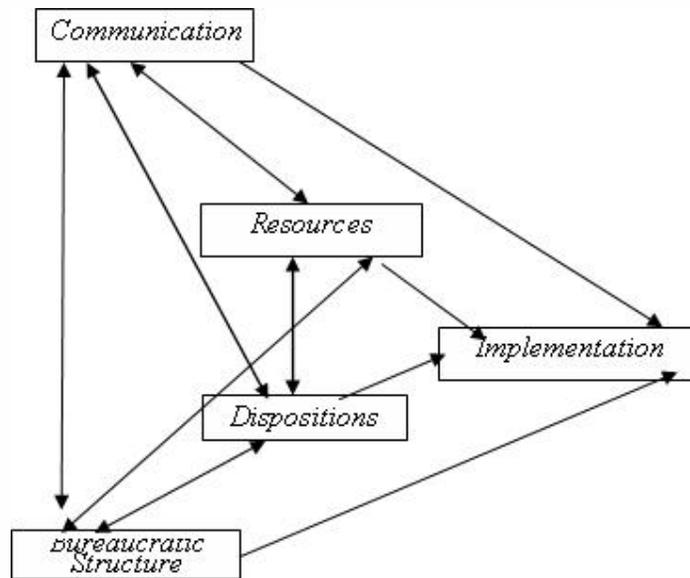
Jenis penelitian yang dipilih dengan metode kuantitatif adalah bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan kondisi obyek penelitian implementasi kebijakan penyebaran informasi publik. Metode kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai obyek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasional variabel masing-masing dan pemahaman dari luar.

3.2 Operasional Variabel Penelitian

Seperti apa yang telah dikemukakan di atas, maka untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam hal penyebaran informasi, hal ini dilihat dari sejauh mana pemahaman publik terhadap informasi yang disampaikan sebagai evaluasi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik, maka diperlukan operasional variabel.

Mengacu kepada model Edward III, maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen (Variabel X) untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi adalah: Komunikasi (X1), Sumber daya (X2), Disposisi/Sikap (X3), dan Struktur Birokrasi (X4), dan variabel dependen adalah keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik (Variabel Y).

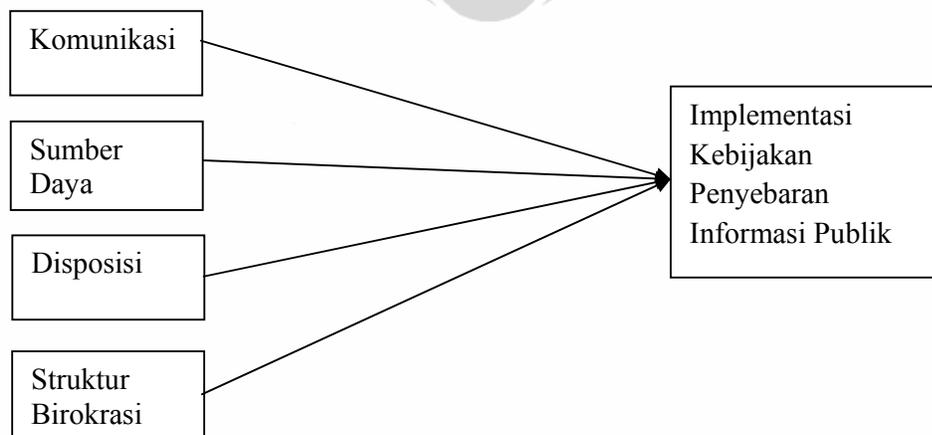
Gambar 3.1
Model Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Menurut Edward III



Sumber: Edward III (1980:148)

Sedangkan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik berdasarkan model Edward III adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2
Model Analisis Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik
pada Badan Informasi Publik



Sumber: Adaptasi dari Edward III (1980:148)

Tabel 3.1
Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator
1	Dependen Variabel Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi	Tingkat pemahaman peserta forum tatap muka terhadap informasi yang disampaikan
2	Independen Variabel	
	1. Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan komunikasi (informasi yang disampaikan) 2. Konsistensi komunikasi 3. Media penyebaran informasi 4. Konten informasi 5. Kemasan informasi
	2. Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sumber daya manusia 2. Kualitas narasumber (pemberi informasi yang kompeten dibidang informasi yang disampaikan)
	3. Disposisi (Sikap)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan pelaksana 2. Tindakan atau sikap terhadap informasi yang baru diketahui/ diterima 3. Peran serta peserta forum tatap muka dalam proses penyebaran informasi
	4. Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan dengan pihak terkait 2. Strategi penyebaran informasi (<i>standar action</i>)

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penyebaran informasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam hal penyebaran informasi publik.

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah beberapa daerah dimana BIP melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka penyebaran informasi melalui forum tatap muka. Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan keterbatasan jangkauan dan luasnya cakupan wilayah. Lokasi yang dijadikan sebagai lokasi penelitian diantaranya Malang, Kendari, Manado, Jakarta dan Solo.

3.4 Populasi dan Sample

Pada pendekatan kualitatif, yang dijadikan sebagai informan adalah pembuat kebijakan yaitu *stakeholder* di lingkungan BIP dan pelaksana kebijakan (implementor). Metode penarikan sampel adalah *purposive sampling*, yakni penarikan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu tentang apa yang diketahui. Responden yang dijadikan sampel pada penelitian kualitatif merupakan orang yang sengaja dipilih berdasarkan pemikiran logis karena dipandang sebagai sumber data atau informasi dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Mereka adalah informasi kunci (*key person*) yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan responden yang dijadikan sampel dalam penelitian kuantitatif adalah audiens atau publik, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*, yakni penarikan sampel yang dipilih secara acak tanpa pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta yang mengikuti forum tatap muka dalam rangka penyebaran informasi. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta forum tatap muka yang dipilih secara acak. Kegiatan forum tatap muka selama peneliti melakukan penelitian dilaksanakan di 5 daerah. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 70

responden pada setiap kegiatan forum tatap muka. Penentuan jumlah sampel sebanyak 70 responden didasarkan pada tabel penentuan jumlah sampel Krejcie dan Morgan (1970) dalam Uma Sekaran (1992). Dengan demikian jumlah keseluruhan responden untuk penelitian ini adalah 350 (=70 x 5 daerah) responden.

Tabel 3.2
Penentuan Jumlah Sampel Krejcie Dan Morgan

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

Sumber : Uma Sekaran, *Research Methods For Business*, 1992

3.5 Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Wawancara mendalam ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang bagaimana implementasi kebijakan Badan Informasi Publik dalam penyebaran informasi publik termasuk dalam penentuan sasaran khalayak dan tujuan kebijakan serta bagaimana implementasinya selama ini.?

Pertanyaan-pertanyaan diajukan secara langsung kepada pelaksana (*implementor*) kebijakan dan pembuat kebijakan (*policy maker*).

3.5.2 Pengisian kuesioner

Kuesioner merupakan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan diisi oleh responden dengan variabel-variabel yang sedang diteliti. Responden yang diberikan kuesioner ini adalah peserta forum tatap muka dalam kegiatan penyebaran informasi. Kuesioner diberikan kepada audience sebagai responden untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam hal penyebaran informasi publik.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) tertutup. Daftar kuesioner tertutup yaitu daftar pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dan keberhasilan implementasi kebijakan.

Cara penyampaian kuesioner langsung dibagikan kepada peserta forum tatap muka. Daftar pertanyaan yang diberikan adalah pilihan berganda atau *multiple choice* dimana jawaban untuk setiap pertanyaan telah disediakan dan responden tinggal memilih salah satu jawaban yang paling tepat dari lima jawaban yang tersedia. Analisa kuesioner dilakukan dengan memberikan nilai dari hasil kuesioner berdasarkan ranking atau Skala Linkert.

Karena tingkat pengukuran Skala Linkert adalah ordinal, maka agar dapat diolah lebih lanjut harus diubah terlebih dahulu menjadi skala interval dengan menggunakan *Method of Succesive Interval* (MSI). Transformasi data dari skala ordinal menjadi skala interval dimaksudkan agar data yang diperoleh dari kuesioner dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis statistik parametrik dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Prinsip dasar transformasi data dari ordinal menjadi interval dimaksudkan agar relevan dalam melakukan interpretasi. Untuk melakukan transformasi dari skala ordinal ke skala interval akan dilakukan dengan menggunakan program *Succesive Interval*.

3.5.3 Observasi

Penelitian dilakukan dengan jalan pengamatan langsung di lapangan dan studi dokumenter, kemudian mencatat fenomena yang terjadi terkait dengan kegiatan penyebaran informasi publik.

3.6 Uji Validitas dan Realiabilitas Instrumen

Penetapan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel sangat tergantung kualitas data yang digunakan dalam penelitian tersebut, untuk mendapatkan alat pengukuran yang relatif konsisten, maka perlu dilakukan uji validitas dan realibilitas terhadap instrumen penelitian. Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan atau dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Sedangkan suatu instrument dikatakan reliable apabila alat tersebut memiliki kemampuan untuk menghasilkan pengukuran yang konsisten.

Pengujian validitas adalah mencari tahu apakah pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner benar-benar valid atau kurang valid. Sugiyono (2004:115) menyebutkan bahwa, untuk mengetahui apakah setiap butir dalam instrument itu valid atau tidak dapat diketahui dengan cara menghitung koefisien korelasi product moment (r_{XY}) antara skor butir (X) dengan skor total (Y), dan rumusnya adalah :

$$r = \frac{\sum XiYi - \{\sum Xi\}\{\sum Yi\}}{n} \sqrt{\frac{\sum Xi^2 - (\sum Xi)^2}{n} \frac{\sum Yi^2 - (\sum Yi)^2}{n}}$$

Dimana :

X = Skor pada setiap item

Y = Jumlah skor item-item

n = Banyaknya pasangan data (banyaknya responden)

Statistik uji yang digunakan adalah statistic uji t dengan rumus :

$$t_0 = r_{XY} \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Kriteria uji:

Tolak H_0 bila $t_0 > t_{tabel}$, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa instrument tersebut valid.

Selanjutnya, untuk menghitung reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan mengukur koefisien korelasi Spearman-Brown dengan tehnik belah dua (Sugiyono, 2004:126). Dalam menghitung reliabilitas, item dalam kuesioner yang dinyatakan valid itu dibelah kedalam dua kelompok yaitu kelompok instrumen ganjil (X) dan kelompok instrumen genap (Y). Kemudian korelasikan skor belahan ganjil dengan skor belahan genap sehingga diperoleh r_{XY} . Selanjutnya hitung koefisien korelasi Spearman-Brown untuk mendapatkan indeks reliabilitas, dengan rumus :

$$r_{SB} = \frac{2.r_{XY}}{(1+r_{XY})}$$

Dimana :

r_{XY} : koefisien korelasi antara dua belahan instrumen

Statistik uji yang digunakan adalah statistic uji t dengan rumus :

$$t_0 = r_{SB} \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Kriteria uji:

Tolak H_0 bila $t_0 > t_{\text{tabel}}$, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa instrument tersebut reliabel.

Bila setelah dilakukan pengujian terhadap instrumen dan dinyatakan telah valid dan reliabel seluruh butir pertanyaan, maka instrumen ini telah dapat dipergunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data serta diharapkan mampu mengungkapkan data yang dapat dipercaya.

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis-hipotesis penelitian. Kerlinger (2004:217-218) mendefinisikan analisis sebagai kategorisasi, penataan, manipulasi dan peringkasan data untuk memperoleh jawab bagi pertanyaan penelitian. Kegunaan analisis ialah mereduksi data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Sedangkan data hasil-hasil penelitian ditarik kesimpulan, biasanya berupa hasil-hasil numerical seperti skor tes dan statistik seperti nilai modus, presentase dan koefisien korelasi.

Analisis data penelitian tidak secara otomatis menyediakan jawab atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Diperlukan interpretasi atau penafsiran atas data tersebut. Interpretasi atau menafsir adalah menjelaskan dan menemukan arti, ini berarti menggarap hasil-hasil analisis, membuat

inferensi yang relevan dengan masalah penelitian yang dikaji serta membuat kesimpulan.

3.7.1 Analisis Distribusi Frekuensi

Untuk melihat mayoritas responden menjawab pertanyaan pada setiap butir kuesioner peneliti menggunakan analisis distribusi frekuensi. Menurut Bambang P. dan Lina Miftahul Jannah (2005:184) ukuran pemusatan merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar kecenderungan data memusat pada nilai tertentu.

Sebelum dilakukan analisis lanjutan untuk melihat pengaruh faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan dalam penyebaran informasi, dilakukan analisis distribusi frekuensi. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik jawaban responden pada setiap butir pertanyaan. Untuk mengetahui bagaimana distribusi frekuensi pada setiap butir pertanyaan, peneliti menganalisa data tersebut dengan menghitung frekuensi data tersebut kemudian dipersentasekan.

3.7.2 Analisis Regresi

Analisis data dalam penelitian ini akan digunakan statistika untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi yang dicerminkan oleh komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi sebagai variabel bebas, dan keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran publik yang dicerminkan oleh tingkat pemahaman peserta forum tatap muka selaku penerima informasi.

Pola hubungan yang digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh suatu variabel atau seperangkat variabel terhadap variabel lainnya, model yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda (Matjik dan Sumertadjaja, 2000) sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Dimana :

Y = Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik

β_0 = Intercept

β_i = Koefisien Regresi

X_1 = Komunikasi

X_2 = Sumber Daya

X_3 = Sikap

X_4 = Struktur Birokrasi

ε = Error

untuk mendapatkan koefesien (β) dari variabel X tersebut diperoleh dengan menduga nilai β menggunakan metode kuadrat terkecil dapat dihitung dengan rumus:

$$b_1 = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}$$

Koefesien regresi β akan bernilai positif (+) jika menunjukkan hubungan searah antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Artinya, kenaikan variabel bebas akan mengakibatkan kenaikan variabel tak bebas., begitu pula sebaliknya jika variabel bebas mengalami penurunan. Untuk nilai β akan bernilai negatif (-) jika menunjukkan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Artinya, kenaikan variabel bebas akan mengakibatkan penurunan variabel tak bebas., begitu pula sebaliknya jika variabel bebas mengalami penurunan. Dengan asumsi yang telah dipenuhi maka analisis regresi dapat dilanjutkan dengan menggunakan program SPSS 13.0 untuk pengolahannya.

Untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tidak bebas dengan tingkat keyakinan 95%, dalam analisis regresi digunakan uji F untuk pengujian secara serempak dan uji t untuk menguji koefisien regresi secara parsial. Dengan kriteria pengujian, bila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

Uji Koefisien Determinasi (R^2), untuk meliha berapa proporsi variasi dari variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel tidak bebasnya (Matjik dan Sumertadjaja, 2005).

Nilai R^2 dapat diperoleh dengan menghitung :

$$R^2 = \frac{\sum(Y_i - Y_i')^2}{\sum(Y_i - \bar{Y}_i)^2}$$

3.7.3 Hipotesis

Umumnya penelitian kuantitatif menggunakan hipotesis. Hanya keberadaan hipotesis pada masing-masing penelitian kuantitatif dipertimbangkan kepentingannya. Pada penelitian-penelitian kuantitatif deskriptif, penggunaan hipotesis tidak lebih penting seperti yang diperlakukan pada penelitian kuantitatif eksplanatif. Hal tersebut disebabkan karena kuantitatif deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya mendeskripsikan ataupun sekadar mengidentifikasi data (Burhan, 2005:84).

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Badan Informasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika

Badan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika dibentuk melalui Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika, menetapkan Badan Informasi Publik sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Departemen, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri dan Badan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam Permenkominfo tersebut tertuang tugas pokok dan fungsi Badan Informasi Publik, yang kemudian disempurnakan kembali dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi Dan Informatika.

Dalam Permenkominfo No. 25 Tahun 2008, Badan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik, untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan penyediaan informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
- c. Pelaksanaan penyebaran informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat baik langsung kepada masyarakat maupun melalui media komunikasi;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyebaran informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
- e. Pelaksanaan pengelolaan pendapat umum/opini publik ;
- f. Pelaksanaan administrasi badan.

Susunan Organisasi Badan Informasi Publik terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Informasi Politik, Hukum dan Keamanan;
- c. Pusat Informasi Perekonomian;
- d. Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat;
- e. Pusat Pengelolaan Pendapat Umum

4.2 Visi Dan Misi Badan Informasi Publik

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Informasi Publik secara umum difokuskan pada pelaksanaan pelayanan informasi publik, pelaksanaan penyebaran informasi publik, fasilitasi kelancaran arus informasi antar lembaga dan pelaksanaan pengelolaan pendapat umum. Pelaksanaan pelayanan informasi publik diantaranya penyebaran informasi publik yang dibutuhkan masyarakat adalah dalam rangka memenuhi kepentingan publik di bidang informasi politik, hukum dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat terutama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Badan Informasi Publik menetapkan visi, yakni:

“Terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik Yang Cepat, Akurat, Mudah, Dan Merata”

Adapun makna yang terkandung dalam rumusan visi tersebut adalah kondisi obyektif dewasa ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi tidak sama, bukan saja terhadap media yang berbasis teknologi komunikasi dan informatika, tetapi juga terhadap media konvensional. Kesenjangan informasi terjadi antara masyarakat yang mampu dengan yang kurang mampu (tingkat kehidupan ekonominya), antara masyarakat yang berpendidikan dengan yang kurang berpendidikan, dan antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan ada di pedesaan. Oleh karena itu diharapkan

terselenggaranya pelayanan informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui penyebaran informasi publik.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan Misi sebagai acuan bagi langkah-langkah yang akan dilaksanakan, meliputi:

1. Meningkatkan sistem pelayanan informasi publik

Mengembangkan dan meningkatkan sistem pelayanan informasi kepada masyarakat dan melaksanakan pengelolaan umpan balik masyarakat untuk digunakan acuan bagi penyediaan bentuk dan model informasi serta penyebaran dan pelancaran arus informasi baik langsung maupun melalui lembaga atau jaringan komunikasi yang ada.

2. Meningkatkan pemberdayaan lembaga-lembaga informasi dan media

Mengembangkan dan meningkatkan pemberdayaan lembaga-lembaga swadaya masyarakat di bidang komunikasi dan informasi serta kelompok-kelompok informasi atau kelompok-kelompok social pedesaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat melalui penyuguhan konten yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendukung upaya penyebaran dan pemerataan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

3. Meningkatkan pelayanan informasi publik bidang polhukam, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Meningkatkan mutu dan pelayanan informasi di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat dengan menjalin kerjasama dalam mengakses informasi dari seluruh sector yang ada agar informasi yang datang dan lembaga-lembaga legislative, eksekutif maupun yudikatif dan pihak-pihak lainnya dapat diakses dan diserap masyarakat.

4. Meningkatkan pengelolaan pendapat umum

Meningkatkan pengelolaan pendapat umum sebagai sarana umpan balik masyarakat untuk pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan mutu

pelayanan informasi publik yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

5. Meningkatkan fasilitasi pelayanan informasi publik

Meningkatkan jaringan dan kerjasama pelayanan informasi publik antar lembaga Negara, pemerintah dengan lembaga masyarakat dan media baik yang disediakan dan disebar oleh setiap badan publik maupun lembaga-lembaga informasi lainnya.

4.3 Tujuan Dan Sasaran Badan Informasi Publik

4.3.1 Tujuan

Meningkatkan percepatan penyebaran dan pemerataan informasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan data, informasi dan pengetahuan yang dapat diakses dengan mudah, tepat dan akurat.

4.3.2 Sasaran

Sasaran Badan Informasi Publik untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat
2. Berkembangnya sistem dan metode layanan informasi publik dalam rangka penyebaran informasi publik yang efisien dan efektif dengan bobot materi yang terpercaya, yang dilakukan oleh instansi/lembaga penyedia informasi publik secara sinergi
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi/lembaga penyedia informasi publik baik di pusat maupun daerah
4. Berkembangnya pengelolaan pendapat umum baik yang dilakukan oleh Badan Informasi Publik maupun oleh lembaga informasi lainnya untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah dan menklarifikasikan isu yang berkembang

5. Berkembangnya kerjasama pelayanan publik antar negara khususnya dalam kerangka *Millennium Development Goals* (MDGs).

4.4 Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo

Peran Badan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pelayanan informasi mencakup tiga aktivitas utama antara lain: (1) penyediaan dan penyebaran informasi publik mengenai kebijakan dan program pemerintah dan negara, (2) fasilitasi pelancaran arus informasi publik, dan (3) penguatan kapasitas lembaga pelayanan informasi publik terutama di tingkat daerah.

Pelayanan informasi tersebut lebih dititik beratkan kepada pemenuhan hak dan kemerdekaan masyarakat untuk memperoleh informasi (*public's rights to know*) yang dibutuhkan meliputi:

- a. Informasi tentang kebijakan nasional pemerintah yang berdampak luas dan berpengaruh kepada pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat.
- b. Informasi yang perlu diketahui masyarakat sebagai tindak lanjut dan klarifikasi atas isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terutama yang merugikan dan mendiskreditkan pemerintah dan masyarakat.

Pelayanan informasi publik ini juga merupakan ekspresi dari kewajiban Negara dan pemerintah untuk menyampaikan kepada publik (*obligation to tell*). Menyangkut fasilitasi pelancaran arus informasi antar lembaga, ditujukan untuk mendorong penyebaran dan pemerataan informasi agar sampai kepada sasaran khalayak. Salah satu faktor pendukung bagi terciptanya pelancaran arus informasi ini adalah terwujudnya kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi serta adanya jaminan terhadap akses informasi publik. Hal ini perlu diwujudkan mengingat kebebasan memperoleh informasi merupakan sarana bagi turut sertanya masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Negara dan

pemerintahan guna terwujudnya kinerja pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kondisi eksisting dalam hal penyebaran informasi saat ini memperlihatkan bahwa informasi tentang kebijakan atau program pemerintah tidak tersebar secara luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat di semua daerah, tidak semua pemerintah daerah menganggap penting adanya sebuah lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang khusus mengelola penyebaran informasi publik, dan umpan balik (*feedback*) masyarakat terhadap kebijakan atau program pemerintah serta pelaksanaannya kurang dapat diserap secara optimal oleh pemerintah.

Kebijakan Badan Informasi Publik dalam tujuan dan sasaran penyebaran informasi publik sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan informasi publik tentang kebijakan pemerintah dan negara di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat
2. Meningkatkan monitoring berita/informasi dan opini publik yang berkembang di masyarakat tentang kebijakan dan program pemerintah sebagai referensi dalam perumusan kebijakan dan program pemerintah
3. Menyediakan dan mendistribusikan bahan-bahan informasi, serta memfasilitasi sarana dan prasarana komunikasi untuk daerah perbatasan dan daerah tertinggal terutama wilayah *blank spot* serta daerah rawan konflik
4. Meningkatkan penyediaan dan penyebaran informasi publik melalui media online sehingga masyarakat dapat secara cepat mengakses informasi
5. Meningkatkan kerjasama internasional dibidang informasi dalam rangka membangun citra Indonesia di dunia internasional
6. Meningkatkan pemerataan informasi melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga informasi masyarakat
7. Untuk meningkatkan penyebaran informasi dilakukan kerjasama dengan lembaga media, lembaga komunikasi masyarakat seperti pembuatan poster,

leaflet, brosur, buku, dialog interaktif, forum tatap muka dan iklan layanan masyarakat

8. Membangun Koinfo Newsroom dalam rangka menyediakan informasi kebijakan pemerintah, memproduksi bahan-bahan informasi untuk konsumsi media dan masyarakat, serta berperan sebagai penyeimbang informasi publik
9. Membangun database bidang polhukam, perekonomian dan kesra
10. Optimalisasi pemanfaatan media yang dikelola oleh lembaga informasi pemerintah dan lembaga informasi masyarakat dengan membangun media center, mendistribusikan surat kabar untuk desa, tv umum, parabola, v-satelit, komputer di daerah-daerah.

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut Badan Informasi Publik menyusun program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program penyediaan informasi publik bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat
 - a. Pengidentifikasian, pemantauan, dan penelaahan permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi
 - b. Pengumpulan data dan informasi
 - c. Penyusunan data dasar
 - d. Pemuktahiran data/informasi
 - e. Penyusunan dan penetapan SOP penyediaan informasi
 - f. Penataan sistem penyimpanan data dan informasi
 - g. Peningkatan produksi informasi
 - h. Peningkatan pertukaran informasi
 - i. Pengembangan layanan informasi publik
 - j. Pemerataan layanan informasi publik
 - k. Forum koordinasi kelembagaan layanan informasi publik
 - l. Sosialisasi penyebaran informasi publik melalui lembaga-lembaga pelayanan informasi
 - m. Pengembangan nasional layanan informasi publik

- n. Pengelolaan informasi publik melalui operasionalisasi newsroom
2. Program peningkatan kualitas informasi publik
 - a. Penyusunan dan penetapan standarisasi kualitas informasi publik
 - b. Pelatihan SDM pengelola informasi publik
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan informasi publik
 - d. Penyusunan sistem database informasi publik
 3. Program diversifikasi produk informasi publik
 - a. Penyusunan paket-paket informasi publik melalui media online
 - b. Penyusunan paket-paket informasi publik melalui media cetak
 - c. Penyusunan paket-paket informasi publik melalui media radio
 - d. Penyusunan paket-paket informasi publik melalui media TV
 - e. Penyusunan paket-paket informasi publik melalui media film
 - f. Penyusunan paket-paket informasi publik melalui dialog atau forum dan media pertunjukan rakyat tradisional
 - g. Penyusunan paket-paket informasi publik dalam bentuk iklan layanan masyarakat melalui media cetak, radio, TV, dan film
 - h. Penyusunan paket-paket informasi publik melalui media luar ruang
 - i. Pengidentifikasian dan penelaahan bentuk dan cara penyajian informasi
 - j. Review terhadap bentuk dan cara penyajian informasi
 4. Program peningkatan percepatan penyebaran informasi publik
 - a. Penyusunan dan penetapan pola distribusi penyebaran informasi publik
 - b. Penyusunan dan penetapan standarisasi penyebaran informasi publik
 - c. Peningkatan penyebaran informasi publik melalui media massa, forum tatap muka dan media pertunjukan rakyat
 - d. Penyebaran informasi publik di daerah perbatasan dan *blank spot area*
 5. Program peningkatan operasionalisasi dan jaringan penyebaran informasi publik
 - a. Peningkatan operasional penyebaran informasi publik melalui Kominfo Newsroom dan media website

- b. Peningkatan pemanfaatan jaringan penyebaran informasi publik. Media Center, Jaringan Informasi Elektronik Masyarakat Indonesia (JIEMI), Dinas Infokom, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan Balai Informasi Masyarakat (BIM) di berbagai daerah
6. Program peningkatan volume dan kualitas pengelolaan pendapat umum
 - a. Pengelolaan isu publik dan wacana publik dari media
 - b. Pengelolaan isu publik yang berkembang dalam masyarakat
 - c. Pengelolaan jajak pendapat tentang isu nasional
 - d. Pengelolaan jajak pendapat tentang kinerja layanan pemerintah
 - e. Peningkatan mutu SDM pengelola pendapat umum
 7. Program peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyebaran informasi publik
 - a. Pertemuan regional pemantauan operasional layanan informasi
 - b. Penguatan sarana layanan informasi publik melalui bantuan operasional dana dekonsentrasi
 - c. Peningkatan layanan informasi di daerah-daerah perbatasan
 8. Program fasilitasi penguatan kelembagaan layanan informasi publik di daerah
 - a. Fasilitasi pembangunan media center atau newsroom di daerah, terutama daerah perbatasan, daerah rawan konflik, dan rawan bencana
 - b. Menghubungkan Kominfo Newsroom dengan berbagai media center atau newsroom yang dibangun diberbagai daerah, khususnya daerah perbatasan, daerah rawan konflik, dan rawan bencana.

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik

Kebijakan penyebaran informasi publik adalah bentuk penerapan dari tugas pokok Badan Informasi Publik selaku badan publik yang melakukan pelayanan informasi publik. Kebijakan penyebaran informasi publik dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Informasi Publik sangat relevan, karena salah satu tugas pokok Badan Informasi Publik adalah melaksanakan penyebaran informasi publik seperti yang tertuang dalam Permenkominfo No. 25 Tahun 2008. Tujuan dan sasaran kebijakan penyebaran informasi publik adalah agar masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipahami oleh masyarakat.

Peran Badan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pelayanan informasi mencakup tiga aktivitas utama yaitu pertama penyediaan dan penyebaran informasi publik mengenai kebijakan dan program pemerintah, kedua fasilitasi pelancaran arus informasi publik, dan ketiga penguatan kapasitas lembaga pelayanan informasi publik terutama di tingkat daerah. Untuk melaksanakan tiga aktivitas utama tersebut terkait kebijakan penyebaran informasi Badan Informasi Publik menyusun program sebagai berikut :

a. Program Akurasi Informasi

Dalam program akurasi informasi tersebut, Badan Informasi Publik melakukan penyediaan informasi publik bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat dengan melakukan pemantauan dan penelaahan permintahan kebutuhan masyarakat akan informasi. Peningkatan kualitas informasi publik dengan melakukan pelatihan sumber daya manusia pengelola informasi publik dan pengadaan sarana prasarana penunjang pengelolaan informasi publik. Peningkatan volume dan kualitas pengelolaan

pendapat umum dengan melakukan pengelolaan isu publik dari media maupun yang berkembang dalam masyarakat

b. Program Kecepatan informasi

Program kecepatan informasi dengan melaksanakan percepatan penyebaran informasi publik, melalui penyusunan dan penetapan pola distribusi informasi publik, penyusunan dan penetapan standarisasi penyebaran informasi publik, peningkatan penyebaran informasi publik melalui media massa, media pertunjukan rakyat, forum dialog serta penyebaran informasi di daerah perbatasan dan daerah konflik.

c. Program Kemudahan Informasi

Pelaksanaan program kemudahan informasi dengan melaksanakan program diversifikasi produk informasi publik diantaranya penyusunan paket-paket informasi publik melalui berbagai media baik online, cetak dan TV, media pertunjukan rakyat tradisional, iklan layanan masyarakat, dan media luar ruang. Penelaahan bentuk dan cara penyajian informasi agar dapat dengan mudah diterima publik.

d. Program Pemerataan Informasi

Program pemerataan informasi dilaksanakan melalui program peningkatan operasionalisasi dan jaringan penyebaran informasi publik dengan peningkatan sinergitas pelayanan informasi publik dengan sasaran terbangunnya karakter bangsa di masyarakat dan peningkatan pemanfaatan jaringan penyebaran informasi publik seperti media center, dinas infokom di daerah. Program peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyebaran informasi dengan penguatan sarana layanan informasi di daerah. Program fasilitasi penguatan kelembagaan layanan informasi publik dengan fasilitasi media center di daerah, terutama daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan rawan bencana.

Upaya yang dilakukan Badan Informasi Publik dalam implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di antaranya:

1. Meningkatkan penyediaan informasi publik yang meliputi informasi tentang ketatanegaraan dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kebijakan dan program pembangunan bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta agenda-agenda maupun peristiwa-peristiwa penting baik berskala nasional dan local
2. Meningkatkan produksi dan pertukaran informasi publik untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi
3. Meningkatkan kualitas informasi publik dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diproduksi dan disebarluaskan
4. Meningkatkan diversifikasi produk informasi publik dan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diproduksi dan disebarluaskan
5. Meningkatkan kecepatan penyebaran informasi publik untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap informasi dengan tepat waktu dan tepat sasaran
6. Meningkatkan pemerataan informasi publik dan jaringan penyebaran informasi publik ke seluruh lapisan masyarakat
7. Meningkatkan pengelolaan pendapat umum seperti pendapat umum masyarakat, isu krusial dan wacana yang berkembang dalam media dan dalam realitas masyarakat, melalui instansi/lembaga pemerintah dan lembaga pemantau yang terdapat di masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan, klarifikasi dan kounter.

Dalam kebijakan penyebaran informasi, Badan Informasi Publik menetapkan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah kebijakan dan program pemerintah yang menyangkut kepentingan publik. Badan Informasi Publik lebih berkonsentrasi pada konten kebijakan/program, materi kebijakan yang dihimpun dan diproses menjadi bahan informasi yang disampaikan kepada publik melalui berbagai media. Selain pendekatan media, pemerintah perlu mengembangkan sebuah pendekatan yang komprehensif agar

arus informasi yang ada di kalangan masyarakat tidak melahirkan konflik ataupun merugikan kepentingan masyarakat. Disinilah pentingnya komunikasi publik untuk mengembangkan saling pengertian, kerjasama dan sinergi yang positif antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam isu tertentu.

Penyebaran informasi publik telah berjalan dengan lancar dan baik, meskipun terdapat pula hambatan yang kadang terjadi. Sebelum melakukan kegiatan forum tatap muka, Badan Informasi Publik melakukan proses perencanaan. Dalam perencanaan dibahas berbagai macam persiapan diantaranya aspek konten, aspek media, aspek lokasi, aspek pembiayaan dan narasumber serta sasaran. Menurut Grindle (1980:48), aktivitas-aktivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh *content* dan *context* kebijakan yang bersangkutan. Pertama terdiri dari segala karakter yang ada pada kebijakan itu sendiri. Kedua terdiri dari segala karakter yang ada dilingkungan dimana proses implementasi berlangsung.

Untuk menunjang agar penyebaran informasi dapat dilaksanakan, Badan Informasi Publik melakukan survey lokasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hasil survey di lapangan kemudian dibahas kembali agar sesuai dengan perencanaan. Perencanaan disusun agar penyebaran informasi terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Dari hasil pengamatan selama penelitian, bahwa selama ini kegiatan penyebaran informasi melalui forum tatap muka mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari publik. Hal ini ditunjukkan dengan respon peserta forum tatap muka saat pelaksanaan kegiatan dapat memberikan masukan dan bertanya langsung kepada narasumber tentang informasi yang disampaikan.

Dari segi sumber daya manusia Badan Informasi Publik sebagai pelaksana penyebaran informasi masih perlu ditingkatkan. Sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Suatu kebijakan atau program akan dapat terimplementasikan dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai berupa sumber daya manusia, dana, peralatan, teknologi dan sarana prasarana lainnya. Banyak kebijakan yang gagal mencapai tujuan yang diharapkan karena tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Begitu juga halnya dengan sumber daya yang dimiliki oleh Badan

Informasi Publik dalam menjalan penyebaran informasi publik, sedangkan faktor ini merupakan hal yang sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Implementasi kebijakan penyebaran informasi publik pada Badan Informasi Publik melakukan penguatan koordinasi dengan lembaga-lembaga di daerah. Pihak yang terlibat dalam proses penyebaran informasi adalah antar departemen, pemerintah daerah, kelompok-kelompok organisasi masyarakat, pemuda, mahasiswa, organisasi keagamaan dan gender. Lembaga-lembaga publik, khususnya pemerintah memiliki beragam cara dan metode untuk mengkomunikasikan program dan citra lembaganya kepada publik dan masyarakat luas. Saat ini banyak strategi dan program komunikasi disusun sendiri ataupun dengan bantuan pihak ketiga yang diarahkan untuk mengedukasi publik.

Setiap kebijakan dan program pemerintah, khususnya kebijakan di bidang informasi, harus senantiasa berdasarkan pada kenyataan tentang adanya kebebasan dan demokratisasi masyarakat. Selain itu, badan-badan publik tidak menganggap dirinya sebagai sepenuhnya pemegang keputusan yang dapat menentukan secara sepihak kebijakannya tanpa memperhatikan aspirasi publik. Komunikasi yang digunakan sebaiknya bersifat partisipatif, artinya lebih besar memberi kesempatan kepada publik untuk terlibat. Termasuk di dalamnya adalah keterlibatan media massa, yang harus diakui memiliki peran besar dalam penyebaran informasi.

Badan Informasi Publik dalam kebijakan penyebaran informasi publik mempunyai tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang terpercaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dang mengembangkan sistem dan metoda pelayanan informasi publik yang efisien dan efektif oleh instansi/lembaga penyedia informasi publik melalui sinergi kerjasama layanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi/lembaga penyedia informasi publik baik di tingkat pusat maupun daerah dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendapat umum sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah dan upaya respon atas isu yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

5.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji validitas ini berguna untuk mengetahui valid tidaknya setiap butir pertanyaan/pernyataan kepada responden. Sebagai instrumen penelitiab, butir kuesioner yang valid berarti butir kuesioner tersebut dapat dijadikan alat ukur untuk menilai apa yang hendak diukur dalam penelitian ini. Kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total butir yang merupakan jumlah skor butir.

Hasil pengujian dengan menggunakan korelasi *product moment Pearson* untuk tiap butir kuesioner menghasilkan t_0 yang kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} dengan taraf signifikansi 95%. Jika t_0 lebih besar dibandingkan t_{tabel} maka butir tersebut signifikan atau valid. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 350 responden dengan bantuan SPSS v.13, maka hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian adalah sebagai berikut:

a. Variabel Komunikasi

Tabel 5.1
Hasil Uji Validitas Variabel Komunikasi

Item	Koefesien Korelasi	t_0	t_{tabel}	Validitas
1	0.439	9.115	1.645	Valid
2	0.519	11.327	1.645	Valid
3	0.459	9.638	1.645	Valid
4	0.442	9.192	1.645	Valid
5	0.501	10.799	1.645	Valid

Dari tabel di atas, terlihat bahwa koefesien korelasi untuk setiap butir pertanyaan pada variabel komunikasi yang terdiri dari 5 butir pertanyaan memiliki koefesien korelasi $t_0 > t_{tabel}$. Karena koefesien tersebut lebih besar dari t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan tersebut valid.

Tabel 5.2
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Komunikasi

R_{XY}	R_{SB}	t₀	t_{tabel}	Reliabilitas
0.302	0.473	10.022	1.645	Reliabel

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabel, diperoleh $t_0 > t_{tabel}$, ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel komunikasi dalam penelitian ini adalah reliabel.

b. Variabel Sumber Daya

Tabel 5.3
Hasil Uji Validitas Variabel Sumber Daya

Item	Koefesien Korelasi	t₀	t_{tabel}	Validitas
6	0.620	14.741	1.645	Valid
7	0.571	12.975	1.645	Valid
8	0.591	13.667	1.645	Valid

Berdasarkan tabel 5.3 tersebut di atas, terlihat bahwa koefesien korelasi untuk setiap butir pertanyaan pada variabel sumber daya yang terdiri dari tiga butir pertanyaan memiliki nilai $t_0 > t_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan tersebut valid.

Tabel 5.4
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sumber Daya

R_{XY}	R_{SB}	t₀	t_{tabel}	Reliabilitas
0.302	0.464	9.679	1.645	Reliabel

Berdasarkan tabel 5.4 tersebut di atas, terlihat bahwa nilai koefesien korelasi untuk setiap butir pertanyaan pada variabel sumber daya yang terdiri dari tiga butir pertanyaan berdasarkan hasil perhitungan uji reliabel, diperoleh koefesien korelasi $t_0 > t_{tabel}$, ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel sumber daya dalam penelitian ini adalah reliabel.

c. Variabel Disposisi (Sikap)

Tabel 5.5
Hasil Uji Validitas Variabel Disposisi (Sikap)

Item	Koefesien Korelasi	t_0	t_{tabel}	Validitas
9	0.429	8.859	1.645	Valid
10	0.390	7.901	1.645	Valid
11	0.420	8.633	1.645	Valid
12	0.485	10.346	1.645	Valid
13	0.322	6.345	1.645	Valid

Berdasarkan tabel 5.5 tersebut di atas, terlihat bahwa koefesien korelasi untuk setiap butir pertanyaan pada variabel disposisi yang terdiri dari lima butir pertanyaan memiliki nilai $t_0 > t_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan tersebut valid.

Tabel 5.6
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Disposisi

R_{XY}	R_{SB}	t_0	t_{tabel}	Reliabilitas
0.408	0.580	13.266	1.645	Reliabel

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabel, diperoleh koefesien korelasi $t_0 > t_{tabel}$, ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel disposisi dalam penelitian ini adalah reliabel.

d. Struktur Birokrasi

Tabel 5.7
Hasil Uji Validitas Variabel Struktur Birokrasi

Item	Koefesien Korelasi	t_0	t_{tabel}	Validitas
14	0.521	11.387	1.645	Valid
15	0.504	10.885	1.645	Valid
16	0.486	10.373	1.645	Valid
17	0.481	10.237	1.645	Valid

Dari tabel 5.7 di atas, terlihat bahwa koefesien korelasi untuk setiap butir pertanyaan pada variabel struktur birokrasi memiliki nilai $t_0 > t_{tabel}$. Karena t_0 koefesien korelasi tersebut lebih besar dari t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan tersebut valid.

Tabel 5.8
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Struktur Birokrasi

R_{XY}	R_{SB}	t₀	t_{tabel}	Reliabilitas
0.573	0.729	19.841	1.645	Reliabel

Berdasarkan tabel 5.8 tersebut di atas, terlihat bahwa nilai koefesien korelasi untuk setiap butir pertanyaan pada variabel struktur birokrasi yang terdiri dari empat butir pertanyaan berdasarkan hasil perhitungan uji reliabel, diperoleh koefesien korelasi $t_0 > t_{tabel}$, ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel struktur birokrasi dalam penelitian ini adalah reliabel.

e. Variabel Keberhasilan Implementasi Penyebaran Informasi Publik

Tabel 5.9
Hasil Uji Validitas
Variabel Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik

Item	Koefesien Korelasi	t₀	t_{tabel}	Validitas
1	0.355	7.084	1.645	Valid
2	0.462	9.717	1.645	Valid
3	0.392	7.949	1.645	Valid
4	0.479	10.179	1.645	Valid
5	0.248	4.775	1.645	Valid
6	0.424	8.733	1.645	Valid
7	0.335	6.632	1.645	Valid

Dari tabel 5.9 di atas, terlihat bahwa koefesien korelasi untuk setiap butir pertanyaan pada variabel keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik memiliki nilai $t_0 > t_{tabel}$. Karena t_0 koefesien korelasi tersebut lebih besar dari t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan tersebut valid.

Tabel 5.10
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik

R_{XY}	R_{SB}	t₀	t_{tabel}	Reliabilitas
0.548	0.708	18.703	1.645	Reliabel

Berdasarkan tabel 5.10 tersebut di atas, terlihat bahwa nilai koefesien korelasi untuk setiap butir pertanyaan pada variabel keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik yang terdiri dari tujuh butir pertanyaan berdasarkan hasil perhitungan uji reliabel, diperoleh koefesien korelasi $t_0 > t_{tabel}$, ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik dalam penelitian ini adalah reliabel.

Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas pada setiap item pertanyaan untuk seluruh variabel yang telah dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan seluruh item pertanyaan dari variabel penelitian dapat dianalisis lebih lanjut.

5.3 Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil 350 orang sebagai sampel pada peserta forum tatap muka dalam kegiatan penyebaran informasi di lima lokasi penelitian, dengan pembagian kuesioner secara langsung. Responden dalam penelitian ini adalah peserta forum tatap muka yang terdiri dari kalangan mahasiswa, pegawai pemerintah, tokoh masyarakat, pegawai profesi, karyawan dan ormas. Jumlah responden pria adalah 185 responden atau 52.9% dan jumlah responden wanita adalah 165 responden atau 47.1%.

Tabel 5.11
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
Pria	185	52.9
Wanita	165	47.1
Total	350	100

Tabel 5.12
Profil Responden Dikelompokkan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Prosentase
SMA	41	11.7
Diploma	85	24.3
S1	157	44.9
Pasca Sarjana	67	19.1
Total	350	100

Berdasarkan tabel 5.12, responden dengan pendidikan terakhir Sarjana S1 lebih banyak dari responden dengan pendidikan terakhir SMA, Diploma atau S2. Responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 157 orang atau 44.9%, responden SMA sebanyak 41 atau 11.7%, Diploma 85 atau 24.3% dan Sarjana S2 sebanyak 67 atau 19.1%. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang mengikuti forum tatap muka tergolong memiliki pendidikan yang cukup tinggi.

Tabel 5.13
Profil Responden Dikelompokkan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Prosentase
PNS	90	25.7
Karyawan	84	24
Profesi	68	19.4
Pelajar/Mahasiswa	33	9.4
Lainnya	75	21.4
Total	350	100

Prosentase responden dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah 25.7%, karyawan 24%, profesi 19.4%, pelajar atau mahasiswa 9.4% dan lainnya sebanyak 21.4%.

5.4 Hasil Analisis Distribusi Frekuensi

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pendekatan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka penulis akan memfokuskan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik. Faktor utama yang diduga sangat berpengaruh tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi (Edward III). Analisis terhadap ke empat faktor tersebut dilakukan secara deskriptif, yakni dengan menguraikan jawaban dari hasil analisis distribusi frekuensi yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang disebar ke responden.

Analisis deskriptif terhadap variabel faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di BIP Depkominfo adalah sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan penyebaran informasi publik dinilai berdasarkan indikator-indikator kejelasan komunikasi, konsistensi komunikasi, media penyebaran informasi, konten informasi dan kemasan informasi. indikator-indikator ini merupakan salah satu persyaratan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan khususnya dalam penyebaran informasi publik. Ini sesuai pendapat Edward III, sebagaimana dikutip oleh Winarno (2002:126), yang menyatakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

Tabel 5.14
Tanggapan Responden Terhadap Penjelasan Narasumber

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	59	16.9
Cukup Jelas	40	11.4
Jelas	187	53.4
Jelas Sekali	64	18.3

Dari hasil pengolahan dalam tabel 5.14 di atas, tanggapan responden terhadap kejelasan narasumber dalam memberi materi informasi diperoleh 16.9% responden menyatakan kurang jelas terhadap penjelasan informasi yang disampaikan narasumber karena terkadang narasumber menggunakan istilah-istilah yang kurang dipahami oleh responden terutama penggunaan bahasa asing, 11.4% responden menyatakan cukup jelas karena dalam penyampaian informasi narasumber memberikan contoh kasus atau deskripsi yang jelas dan mudah dimengerti, 53.4% jelas dan 18.3% menyatakan jelas sekali. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa rata-rata responden cukup mengerti, memahami informasi yang disampaikan oleh narasumber. Kejelasan penyampaian informasi oleh narasumber adalah hal yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi.

Sedangkan 59 atau 16.9% responden yang menyatakan kurang jelas terhadap penjelasan informasi yang disampaikan narasumber pada acara forum tatap muka, dari jumlah tersebut responden yang paling banyak menyatakan kurang jelas adalah pelajar/mahasiswa dengan pendidikan tertinggi SMA yaitu sebesar 12 atau 3.4% responden, hal ini menunjukkan bahwa narasumber harus lebih dapat menyampaikan informasi dengan lebih jelas dan mudah dipahami, karena dengan karakteristik peserta forum tatap muka yang beragam tidak menutup kemungkinan informasi yang diserap berbeda satu sama lain. Dari segi pendidikan tertinggi 6.9% responden yang menyatakan kurang jelas adalah sarjana (S1), dilihat dari sebaran datanya

paling banyak responden tersebut tergolong ke dalam pekerjaan lainnya yaitu 3.1%.

Dari hasil distribusi frekuensi yang terlihat pada tabel 5.14, responden yang menyatakan cukup jelas menyebar secara merata. Dari 11.4% responden terdiri dari 2.0% SMA, 3.1% Diploma, 3.4% S1 dan 2.9% Pasca Sarjana. Sedangkan dari pekerjaan juga menyebar merata, 1.4% responden adalah PNS, 2.9% karyawan, 2.9% pekerjaan sebagai profesi, 0.9% adalah pelajar/mahasiswa dan 3.4% lainnya. Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap responden yang menyatakan cukup jelas dengan penjelasan yang diberikan oleh narasumber. Dibandingkan dengan responden yang menyatakan kurang jelas, responden yang tergolong pelajar/mahasiswa lebih sedikit yang menyatakan cukup jelas yaitu 0.3%. Hal ini dapat disebabkan karena pelajar/mahasiswa baru mendengar atau mengetahui informasi yang disampaikan.

Tabel 5.15
Tanggapan Responden terhadap Komunikasi Dua Arah Forum Tatap Muka

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	15	4.3
Ragu-Ragu	45	12.9
Setuju	201	57.4
Sangat Setuju	89	25.4

Berdasarkan tabel 5.15 sebesar 25.4% responden sangat setuju forum bersifat komunikasi dua arah (dialog) karena peserta dapat berperan aktif bertanya maupun menyampaikan masukan kepada narasumber. Sedangkan 57.4% menyatakan setuju, dari hasil tabulasi silang antara pekerjaan dan pendidikan terakhir responden yang menyatakan setuju komunikasi pada forum tatap muka bersifat dua arah adalah PNS dengan pendidikan terakhir adalah S1

sebesar 33 atau 9.4%. Dalam wawancara pendalaman kuesioner, Suharyadi, salah seorang responden menyatakan:

“... disela-sela paparan, narasumber sering mendiskusikan materi sosialisasi dengan peserta, terkadang narasumber bertanya kepada peserta. Jadi bukan hanya kita sebagai peserta yang bertanya tetapi narasumber pun kadang bertanya kepada responden sejauh mana informasi yang kita ketahui..”

Responden yang ragu-ragu sekitar 12.9% karena tidak semua responden memiliki keberanian untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Responden yang menyatakan ragu-ragu adalah responden yang bekerja sebagai karyawan, PNS dan profesi sebesar 8,7%. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Aliah seorang guru SMA pada Forum Dialog Tatap Muka tentang Ketahanan Sosial Masyarakat di Manado:

“...tidak semua peserta memiliki keberanian untuk bertanya di depan forum. Sebaiknya bagi peserta seperti itu diberikan kesempatan untuk bertanya secara tertulis...”

Dan yang menyatakan tidak setuju jika forum merupakan komunikasi dua arah sebesar 4.3%, responden tersebut berpendapat bahwa karena keterbatasan waktu pelaksanaan forum tatap muka informasi yang seharusnya lebih terperinci tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Dari hasil tersebut dapat diasumsikan bahwa responden lebih setuju kegiatan forum tatap muka terdapat komunikasi dua arah, responden dapat mengeluarkan tanggapan langsung dan bertanya lebih jauh terhadap informasi yang disampaikan, sehingga pelaksana dapat memperoleh *feedback* untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui kegiatan forum tatap muka tersebut.

Tabel 5.16
Tanggapan Responden terhadap Konten Informasi yang Disampaikan

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	34	9.7
Cukup Jelas	145	41.4
Jelas	141	40.3
Jelas Sekali	30	8.6

Dari jelas atau tidaknya materi informasi yang disampaikan dalam forum, berdasarkan tabel 5.16 di atas, 9.7% responden merasa kurang jelas karena konten informasi yang disampaikan masih informasi yang baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Dilihat dari karakteristiknya, responden yang paling banyak menyatakan kurang jelas, 3.4% adalah pelajar/mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa konten informasi yang dikemas harus dapat ditangkap oleh berbagai kalangan, sehingga publik dapat memahami dengan mudah. 41.4% responden merasa cukup jelas, sebagian besar materi informasi mudah dipahami, hanya masih ada materi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Sedangkan 40.3% sudah merasa jelas dan 8.6% sangat jelas. Berdasarkan tabel 5.16 diasumsikan bahwa rata-rata responden menyatakan cukup jelas dengan konten informasi yang disampaikan. Penyampaian informasi dalam kebijakan dan program pemerintah, apalagi kepada publik yang relatif beragam, bukanlah hal yang mudah. begitu banyak faktor yang mempengaruhi proses komunikasi. Oleh karena itu konten informasi menjadi hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan penyebaran informasi.

Tabel 5.17
Tanggapan Responden terhadap Teknik Penyampaian Narasumber

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Buruk Sekali	0	0
Buruk	65	18.6
Cukup	80	22.9
Bagus	162	46.3
Bagus Sekali	43	12.3

Dari tabel 5.17, sebesar 22.9% responden berpendapat bahwa cara penyampaian informasi yang dilakukan oleh narasumber sudah cukup bagus, 11.4% diantaranya berpendidikan S1 dan 7.1% adalah PNS, sedangkan 46.3% responden berpendapat bahwa cara penyampaiannya sudah bagus narasumber menguasai materi dan mampu mempresentasikannya dengan menarik seperti yang dikatakan salah seorang responden, Yusman, 34 tahun, PNS menyatakan :

“...narasumbernya menguasai materi dan penyampaiannya lugas serta bahasanya mudah dipahami, enak didengar. Kadang menyelipkan humor atau gurauan dalam penyampaian...”

Responden yang menilai tehnik penyampaian narasumber sudah bagus adalah karyawan dengan rata-rata pendidikan terakhirnya adalah S1 yaitu sebesar 13.1%, sedangkan responden yang cenderung menyatakan buruk tergolong ke dalam kategori pekerjaan lainnya, misalnya wiraswasta atau pengurus suatu organisasi yang bukan merupakan karyawan.

Dan 12.3% responden menyatakan sangat bagus. Akan tetapi 18.6% responden menyatakan bahwa cara penyampaian informasi oleh narasumber buruk, responden menilai narasumber dalam penyampaian hanya memberi informasi dan terkesan monoton tanpa memberikan penjelasan yang lebih terinci. Narasumber harus mempunyai tehnik penyampaian agar informasi yang disampaikan dapat dengan mudah diserap dan dipahami oleh peserta forum tatap muka.

Tabel 5.18
Tanggapan Responden terhadap Materi yang Disampaikan
Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	64	18.3
Ragu-Ragu	68	19.4
Setuju	156	44.6
Sangat Setuju	62	17.7

Dari 350 responden, 44.6% menyatakan setuju bahwa materi informasi yang disampaikan merupakan kebutuhan publik dan 17.7% sangat setuju. Responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju menilai bahwa setiap program atau kebijakan pemerintah, publik atau masyarakat harus mengetahui langkah-langkah yang diambil pemerintah. Akan tetapi ada responden yang ragu-ragu dan tidak setuju dengan pendapat tersebut yaitu masing-masing sebesar 19.4% dan 18.3%.

Responden yang memberikan tanggapan ragu-ragu atau tidak setuju diduga kegiatan forum yang diikuti saat itu bukanlah informasi yang mereka butuhkan. Rata-rata responden yang menyatakan tidak setuju adalah yang bekerja sebagai karyawan, responden tersebut menilai bahwa informasi yang disampaikan tidak berkaitan dengan pekerjaan dimana mereka bekerja. Sedangkan, responden yang menyatakan ragu-ragu 3.1% adalah pelajar/mahasiswa, 4.6% karyawan, 5.1% PNS, 2.9% pekerja profesi, dan 3.7 adalah lainnya.

2. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan Edward III (1980:11). Selain komunikasi, faktor sumber daya sebagai pelaksana kebijakan (*implementor*) perlu juga diperhatikan, hal ini terkait sejauh mana pelaksana mau melaksanakan kebijakan tersebut. Tanggapan responden terhadap faktor

sumber daya dalam keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi adalah sebagai berikut:

Pada tabel 5.19 berikut, terlihat bahwa tanggapan responden terhadap narasumber dalam memberikan materi dalam kegiatan penyebaran informasi mampu memberikan pemahaman terhadap informasi yang disampaikan. Dari hasil pengolahan data diperoleh sebanyak 42 atau 12.0% responden menyatakan bahwa responden belum memahami informasi yang disampaikan oleh narasumber yang dihadirkan pada forum tatap muka, narasumber kurang mempersiapkan materi yang terkait dengan informasi yang disampaikan sehingga responden merasa bingung menangkap apa yang disampaikan narasumber.

Tabel 5.19
Tanggapan Responden terhadap Informasi yang Disampaikan
Narasumber Memberikan Pemahaman

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	0	0.0
Tidak Setuju	42	12.0
Ragu-ragu	113	32.3
Setuju	153	43.7
Sangat Setuju	42	12.0

Sebanyak 113 atau 32.3% responden menyatakan narasumber setuju memberikan pemahaman terhadap informasi yang disampaikan. Responden yang menyatakan setuju tersebut menilai bahwa informasi yang disampaikan narasumber sudah sesuai dengan konteks atau isi program atau kebijakan pemerintah, 20.3% responden yang menjawab setuju adalah responden dengan pendidikan terakhir adalah Sarjana. Sedangkan, 195 responden atau 55.7% responden menyatakan bahwa narasumber yang dihadirkan dalam forum tatap muka dapat memberikan pemahaman kepada peserta forum tatap muka. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia sudah cukup

mendukung implementasi kebijakan penyebaran informasi. Pemilihan narasumber menjadi bagian yang penting dalam proses penyebaran informasi.

Tabel 5.20
Tanggapan Responden terhadap Sarana Prasana

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	38	10.9
Ragu-Ragu	94	26.9
Setuju	165	47.1
Sangat Setuju	53	15.1

Berdasarkan hasil analisis frekuensi yang disajikan pada tabel 5.20, terlihat bahwa tanggapan responden terhadap sarana dan prasarana dalam kegiatan forum tatap muka dalam rangka penyebaran informasi yaitu sejumlah 38 atau 10.9% tidak setuju, 94 atau 26.9% ragu-ragu, 165 atau 47.1% setuju dan 53 atau 15.1% sangat setuju. Dari pernyataan responden tersebut dapat diasumsikan bahwa terdapat 10.9% responden menyatakan bahwa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan forum tatap muka belum memadai, responden tersebut diantaranya 3.4% adalah PNS, artinya beberapa sarana kurang lengkap dan belum dipersiapkan secara baik sehingga pemanfaatannya tidak maksimal. Seperti yang dikatakan, Sudarso, dari hasil wawancara pendalaman kuesioner:

“...kadang materi informasi atau bahan presentasi tidak ditayangkan di depan jadi kami sebagai peserta terkadang kehilangan informasi yang diterima saat sedang tidak fokus pada narasumber, padahal peralatannya ada dan telah disediakan panitia...”

Sebanyak 47.1% responden menyatakan bahwa sarana dan prasana dalam pelaksanaan forum tatap muka sudah memadai dan mendukung dalam proses penyebaran informasi, responden tersebut terdiri dari 12.9% PNS, 10.0% karyawan, 10.3% pekerja profesi, 4.6% pelajar/mahasiswa dan 9.4

lainnya. Sedangkan 15.1% responden menyatakan sangat setuju bahwa sarana dan prasarana telah memadai. Tidak hanya dari segi konten ataupun narasumber yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penyebaran informasi tetapi sarana dan prasana penunjang juga perlu diperhatikan, ketidaksiapan sarana dan prasana penunjang kegiatan penyebaran informasi akan menghambat kegiatan tersebut.

Tabel 5.21
Tanggapan Responden Terhadap Pemanfaatan Media
Selain Forum Tatap Muka

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	44	12.6
Ragu-Ragu	97	27.7
Setuju	165	47.1
Sangat Setuju	44	12.6

Dari tabel 5.21 diperoleh gambaran bahwa sebanyak 209 atau 59.7% responden setuju dalam proses penyebaran informasi selain melalui forum tatap muka juga dilakukan melalui media lain, 44 atau 12.6% menyatakan tidak setuju dan 97 atau 27.7% menyatakan ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa selain forum tatap muka, perlu dilakukan dalam bentuk atau media lain guna mendukung proses penyebaran informasi. Responden yang menyatakan kurang setuju menilai bahwa forum tatap muka akan lebih memberi pengaruh yang signifikan dan komunikasi bisa bersifat dua arah, rata-rata responden yang menyatakan kurang setuju adalah karyawan.

Sedangkan responden yang menyatakan setuju menilai bahwa media lain seperti iklan layanan masyarakat, media tradisional melalui pertunjukkan kesenian daerah, dialog melalui televisi atau radio akan lebih menjangkau khalayak yang lebih luas. Selain itu televisi maupun radio baik lokal maupun nasional merupakan salah satu media yang cepat menyebarkan informasi.

Salah satu kebijakan BIP dalam penyebaran informasi adalah memberikan fasilitasi kepada pemerintah/lembaga daerah guna memperlancar arus informasi. Fasilitasi yang memadai baik dalam sarana dan prasarana, penyediaan narasumber yang kompeten dan kualifikasi sesuai dengan informasi yang disampaikan menjadi penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi.

3. Faktor Disposisi (Sikap)

Disposisi atau sikap merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi ini akan muncul manakala akan menguntungkan organisasi dan dirinya. Dari 350 responden yang diteliti dapat diketahui tanggapan responden sebagai berikut:

Tabel 5.22
Tanggapan Responden terhadap
Ketertarikan dengan Pelaksanaan Forum Tatap Muka

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Tertarik	0	0
Tidak Tertarik	46	13.1
Biasa Saja	128	36.6
Tertarik	143	40.9
Sangat Tertarik	33	9.4

Tabel 5.22 di atas terlihat bahwa tanggapan responden terhadap pelaksanaan forum tatap muka setelah diolah jawaban responden yaitu sebanyak 143 atau 40.9% tertarik, 33 atau 9.4% sangat tertarik dengan pelaksanaan forum tatap muka dalam rangka penyebaran informasi kepada

masyarakat. Sedangkan 46 atau 13.1% menyatakan tidak tertarik dan selebihnya 128 atau 36.6% menyatakan biasa saja pada pelaksanaan forum tatap muka. Responden yang menyatakan biasa saja dengan alasan sekadar ingin tahu informasi yang disampaikan di forum tersebut, rata-rata responden yang menjawab biasa saja adalah PNS dan karyawan, sedangkan 21.6% responden dengan pekerja profesi, pelajar/mahasiswa dan yang tergolong lainnya menyatakan tertarik dengan penyebaran informasi melalui kegiatan forum tatap muka. Dari tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyebaran informasi melalui forum tatap muka masih diminati oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai salah satu media dalam penyebaran informasi publik khususnya masalah kebijakan dan program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Tabel 5.23
Tanggapan Responden terhadap Penerapan Dalam Kehidupan Sehari-hari

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Ingin	0	0.0
Tidak Ingin	38	10.9
Biasa Saja	118	33.7
Ingin	145	41.4
Sangat Ingin	49	14

Berdasarkan tabel 5.23 menunjukkan tanggapan responden terhadap langkah yang dilakukan peserta forum tatap muka setelah mengikuti kegiatan tersebut, 38 atau 10.9% responden menyatakan tidak ingin menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, 118 atau 33.7% menyatakan biasa saja responden ini terdiri atas 10.0% karyawan, 9.7% PNS, 5.7% pekerja profesi, 2.3% pelajar, dan 6/0% lainnya. Sebesar 145 atau 41.4% menyatakan ingin menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, responden ini terdiri atas 10.6% PNS, 8.0% karyawan, 7.7% pekerja profesi, 5.1% pelajar dan 10.0% lainnya.

Sedangkan 49 atau 14% responden menyatakan sangat ingin menerapkannya dalam kehidupan. Keinginan responden untuk menerapkan setelah mendapatkan informasi, hal ini menunjukkan bahwa informasi tersebut memberikan manfaat. Responden yang menyatakan ingin menerapkan informasi yang diperoleh dalam kehidupan, tidak ada perbedaan yang signifikan apabila dilihat dari segi pekerjaan. Sedangkan, responden dengan pendidikan terakhir SMA masih relatif biasa saja meskipun sebagian besar menjawab ingin menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 5.24
Tanggapan Responden terhadap Manfaat Mengikuti Forum Tatap Muka

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Bermanfaat	0	0
Tidak Bermanfaat	29	8.3
Biasa Saja	104	29.7
Bermanfaat	166	47.4
Sangat Bermanfaat	51	14.6

Tabel 5.24 di atas merupakan hasil pengolahan data responden terhadap pertanyaan “Apakah manfaat yang Saudara peroleh setelah mengikuti forum tatap muka?”. Sebanyak 104 atau 29.7% responden menyatakan biasa saja, responden tersebut terdiri dari 5.7% PNS, 8.6% karyawan, 7.1% profesi, 2.9% pelajar/mahasiswa dan 5.4% lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan pekerjaan sebagai karyawan menganggap bahwa informasi yang disampaikan melalui forum tatap muka apakah benar informasi tersebut bermanfaat. Dan 29 atau 8.3% menyatakan tidak bermanfaat. Responden yang menyatakan tidak bermanfaat menilai bahwa informasi yang disampaikan terkait program atau kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran pada peserta forum tatap muka. Responden tersebut terdiri atas karyawan dan yang tergolong lainnya masing-masing 2.3% sedangkan pelajar/mahasiswa merasa bahwa mengikuti forum tatap

muka untuk mendapatkan informasi dinilai bermanfaat, hal ini ditunjukkan dengan hanya 0.3% pelajar/mahasiswa yang menyatakan tidak bermanfaat.

Sebesar 166 atau 47.4% responden menyatakan mengikuti forum tatap muka dalam rangka penyebaran informasi bermanfaat dan 14.6% menyatakan sangat bermanfaat. Dari hasil tersebut dapat diasumsikan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa pelaksanaan forum tatap muka bermanfaat, artinya masyarakat menjadi tahu dan lebih memahami kebijakan-kebijakan atau program yang sedang atau akan dijalankan pemerintah.

Tabel 5.25
Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Forum Tatap Muka Terkait Penyebaran Informasi Publik

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Efektif	0	0
Kurang Efektif	41	11.7
Ragu-ragu	96	27.4
Efektif	155	44.3
Sangat Efektif	58	16.6

Berdasarkan tabel 5.25 di atas, menunjukkan tanggapan responden terhadap pelaksanaan forum tatap muka terkait penyebaran informasi publik, 155 atau 44.3% responden menyatakan efektif, 58 atau 16.6% menyatakan sangat efektif, 41 atau 11.7% menyatakan tidak efektif yang terdiri dari 2.6% PNS, karyawan dan profesi masing-masing 2.9%, 1.1% pelajar/mahasiswa selebihnya 3.1% lainnya. Dan 96 atau 27.4% menyatakan ragu-ragu, dari jumlah tersebut 12.3% adalah sarjana. Dari jawaban responden tersebut dapat diasumsikan bahwa penyebaran informasi melalui forum tatap muka masih sangat efektif. Responden yang menyatakan penyebaran informasi melalui forum tatap muka kurang efektif menilai bahwa informasi yang disampaikan melalui forum tatap muka ini hanya diterima oleh kalangan terbatas bagi yang mengikuti kegiatan forum saja, tapi tidak tersampaikan ke khalayak

publik padahal informasi yang disampaikan patut untuk diketahui oleh publik dan menyangkut kepentingan publik.

Tabel 5.26
Tanggapan Responden terhadap Kinerja Pelaksana Forum Tatap Muka

kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Bagus	0	0
Tidak Bagus	46	13.1
Cukup	81	23.1
Bagus	152	43.4
Bagus Sekali	71	20.3

Dari hasil pengolahan data tanggapan responden terhadap kinerja pelaksana forum tatap muka pada tabel 5.26 di atas, 43.4% responden menyatakan bahwa kinerja pelaksana forum tatap muka telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan 20.3% menyatakan kinerja pelaksana bagus sekali, sehingga pelaksanaan forum tatap muka dalam rangka penyebaran informasi publik dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu sebanyak 13.1% responden berpendapat bahwa kinerja pelaksana forum tatap muka kurang baik, sedangkan 23.1% responden lainnya merasa kinerja pelaksana forum sudah cukup baik.

Kesiapan pelaksana adalah hal yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik, artinya bahwa sejelas dan sekonsisten apapun peraturan atau kebijakan tentang penyebaran informasi dilakukan, jika para pelaksananya baik pusat maupun daerah yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, kurang memahami atau tidak memiliki kesiapan atau kemauan sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara efektif, maka pelaksanaan penyebaran itu sendiri tidak akan mencapai hasil maksimal.

Tabel 5.27
Tanggapan Responden Terhadap Koordinasi Pelaksana Forum Tatap Muka
Antara Pusat dan Daerah

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	31	8.9
Ragu-Ragu	76	21.7
Setuju	176	50.3
Sangat Setuju	67	19.1

Informasi yang diperoleh berdasarkan pada data yang disajikan dalam tabel 4.27 di atas adalah adanya koordinasi antara pelaksana dari pusat dengan daerah, 69.4% responden menyatakan persetujuannya bahwa koordinasi antara pusat dalam penelitian ini adalah BIP dan daerah telah terlaksana dengan baik. Sebanyak 8.9% menyatakan tidak setuju, responden berpendapat bahwa masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaksana dikarenakan koordinasi yang kurang antara pusat dengan daerah, selain itu pemberitahuan kegiatan kepada panitia daerah terkesan mendadak. Hal ini diungkapkan oleh Murwati, 29 tahun, karyawan swasta, salah satu responden dalam wawancara pendalaman kuesioner:

“...saya baru mendapatkan undangan kemarin (sehari sebelum pelaksanaan) mendadak sekali, susah untuk mencocokkan waktu. Mungkin sebaiknya lain kali undangan pelaksanaan bisa diberitahukan seminggu atau paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan..”

Sedangkan 21.7% responden menyatakan ragu-ragu karena responden tidak mengetahui siapa pelaksana dari kegiatan forum tatap muka tersebut. Akan tetapi dari jawaban responden yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa baik pelaksana dari pusat maupun daerah telah memahami tugas dan peran masing-masing dalam implementasi penyebaran informasi.

Koordinasi antara pihak pelaksana pusat dan daerah menjadi salah satu indikator penting yang menentukan keberhasilan kegiatan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka. Koordinasi yang kurang akan menyebabkan pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi publik menjadi tidak efektif dan tidak mencapai tujuan dari pelaksanaan tersebut.

Tabel 5.28
Tanggapan Responden terhadap Peningkatan Pemahaman Atas Substansi Informasi Yang Disampaikan Melalui Forum Tatap Muka

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	37	10.6
Ragu-Ragu	89	25.4
Setuju	151	43.1
Sangat Setuju	73	20.9

Berdasarkan tabel 5.28 sebanyak 43.1% responden menyatakan penyebaran informasi melalui forum tatap muka dapat meningkatkan pemahaman atas substansi informasi yang disosialisasikan dan 20.9% menyatakan sangat setuju informasi yang disebarkan melalui forum tatap muka memberikan pemahaman. Selain lebih terfokus pada informasi yang disampaikan, kegiatan ini juga dapat menampung aspirasi dan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan/program pemerintah baik secara individu maupun secara kelembagaan. Sedangkan 25.4% responden menyatakan ragu-ragu bahwa forum tatap muka dapat memberikan substansi informasi yang disosialisasikan. Sebanyak 41 atau 11.7% responden yang menyatakan ragu-ragu adalah sarjana, karena diduga responden dari hasil mengikuti forum tersebut tidak langsung mendapatkan manfaat yang nyata dari informasi tersebut. Dan sisanya 10.6% berpendapat bahwa forum tatap muka ini kurang memberikan pemahaman yang cukup atas substansi informasi yang disosialisasikan, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih mendalam. Responden yang menyatakan kurang paham dilihat dari segi pendidikan

terakhir responden adalah, 5,4% adalah sarjana, 3.1% diploma, 1.7% pasca sarjana dan 0.3% SMA.

Tabel 5.29
Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan Forum Tatap Muka Sudah Berjalan Efektif dan Efisien

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	33	9.4
Ragu-Ragu	76	21.7
Setuju	176	50.3
Sangat Setuju	65	18.6

Berdasarkan tabel 5.29 tanggapan responden terhadap pelaksanaan forum tatap muka selama ini telah berjalan efektif dan efisien, 176 atau 50.3% responden menyatakan efektif, 65 atau 18.6% menyatakan sangat efektif dan sekitar 76 atau 21.7% menyatakan ragu-ragu. Dari responden yang menyatakan ragu-ragu, 4.9% adalah pekerja profesi, 4.6% PNS, 4.3% karyawan, 2.9% pelajar/mahasiswa dan selebihnya 5.1% tergolong pekerjaan lainnya. Sedangkan 33 atau 9.4% menyatakan tidak efektif karena penyebaran informasi hanya sebatas tatap muka, akan lebih baik jika penyebaran informasi diperluas melalui media lain seperti spanduk, TV, radio dan media lainnya. Akan tetapi dari jawaban responden tersebut dapat diasumsikan bahwa penyebaran informasi melalui forum tatap muka masih sangat efektif dan efisien.

Tabel 5.30
Tanggapan Responden terhadap Sasaran Khalayak yang Tepat

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	33	9.4
Ragu-Ragu	45	12.9
Setuju	191	54.6
Sangat Setuju	81	23.1

Peserta forum tatap muka terdiri dari pegawai pemda, ormas, mahasiswa, masyarakat, tokoh agama, LSM dan pelajar. Dari tabel 5.30 diperoleh sebanyak 191 atau 54.6% responden menyatakan bahwa peserta forum tatap muka adalah sasaran khalayak yang tepat, 45 atau 12.9% menyatakan ragu-ragu dan 33 atau 9.4% menyatakan tidak setuju. Dilihat dari pendidikan terakhir responden yang menyatakan tidak setuju adalah 3.7% sarjana, berpendapat bahwa peserta forum tatap muka belum merupakan sasaran khalayak yang tepat karena peserta yang mengikuti forum adalah kalangan dan jumlah yang terbatas. Dengan jenis dan jumlah peserta yang terbatas penyebaran informasi dimungkinkan akan terhenti pada peserta itu sendiri.

5.5 Hasil Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. agar dapat dilakukan analisis regresi, data yang diperoleh dari kuesioner dengan skala linkert adalah data ordinal maka harus ditransformasi menjadi data interval. Transformasi data dari ordinal menjadi interval dimaksudkan agar relevan dalam melakukan interpretasi, selain itu salah satu syarat agar dapat digunakan analisis regresi adalah minimal jenis datanya interval.

Setelah data ditransformasi menjadi data interval diperoleh hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan model regresi

dengan bantuan SPSS 13.0 maka untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik dapat digunakan persamaan regresi ganda (*multiple*) antara variabel keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik sebagai variabel tak bebas (Y) dengan variabel-variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi sebagai variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4).

Tabel 5.31
Hasil Analisis Pengujian Secara Bersama Variabel Tak Bebas Terhadap Variabel Bebas

Sumber	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	525.68	4	63.67	16.11	0.000
Residual	324.09	345	2.67		
Total	849.77	349			

Tabel 5.31 di atas adalah hasil pengujian model regresi, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 63.67, nilai F_{tabel} dapat diperoleh dari tabel distribusi F-Snedekor yaitu sebesar 2.39. Karena nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari derajat kepercayaan (α) 0.05, hal ini menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi secara bersama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik.

Dari hasil analisis regresi diperoleh pola hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel bebasnya dalam persamaan linier, diperoleh nilai-nilai koefisien variabel bebas. Untuk melihat keberartian koefisien regresi yang didapatkan digunakan nilai uji t.

Tabel 5.32
Hasil Analisis Untuk Koefisien Regresi Secara Parsial

	Koefisien	Std. Error	t	Sig.
Intercept (b₀)	4.046	1.026	3.945	0.000
Komunikasi (b₁)	0.749	0.040	18.492	0.000
Sumberdaya (b₂)	0.543	0.053	10.289	0.000
Disposisi (b₃)	0.102	0.046	2.231	0.026
Struktur Birokrasi (b₄)	-0.073	0.048	-1.533	0.126

Pada tabel 5.32 dapat dilihat nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas, juga nilai t untuk melihat variabel yang berpengaruh secara signifikan dengan derajat kepercayaan (α) 5% (0.05). Dari hasil tersebut diperoleh nilai signifikansi untuk variabel komunikasi dan sumber daya sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 artinya bahwa variabel komunikasi dan sumber daya secara signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik. Untuk nilai signifikansi variabel disposisi sebesar 0.026 lebih kecil dari 0.05, hal ini menunjukkan bahwa disposisi atau sikap juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dalam hal penyebaran informasi publik. Sedangkan untuk variabel struktur birokrasi nilai signifikansi adalah sebesar 0.126 lebih besar dari 0.05 berarti untuk variabel struktur birokrasi tidak berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik.

Berdasarkan pengujian secara parsial, terlihat bahwa Komunikasi, Sumber daya dan Disposisi (Sikap) jelas terlihat dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik, sedangkan struktur birokrasi memberi pengaruh yang tidak berarti terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik.

Untuk melihat besar pengaruh yang diakibatkan oleh variabel Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi terhadap

keberhasilan implementasi kebijakan informasi publik, dapat ditunjukkan dengan besaran koefisien determinasi yang dihasilkan dari analisis regresi tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan, eratnya hubungan antara variabel Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan informasi publik ditunjukkan oleh koefisien determinasi yang diperoleh yaitu sebesar 76.33%. Artinya, 76.33% keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik pada Badan Informasi Publik dipengaruhi oleh faktor-faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi sedangkan sisanya 23.67% keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Pencapaian koefisien determinasi tersebut member gambaran bahwa pihak Badan Informasi Publik hendaknya member perhatian yang lebih serius terhadap faktor-faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi agar lebih dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan dalam hal penyebaran informasi publik.

Dari hasil analisis regresi diperoleh persamaan model regresi linier ganda yaitu :

$$Y = 4.046 + 0.749X_1 + 0.543X_2 + 0.102X_3 - 0.073X_4$$

Dimana :

Y = Keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di BIP

X₁ = Komunikasi

X₂ = Sumber Daya

X₃ = Disposisi

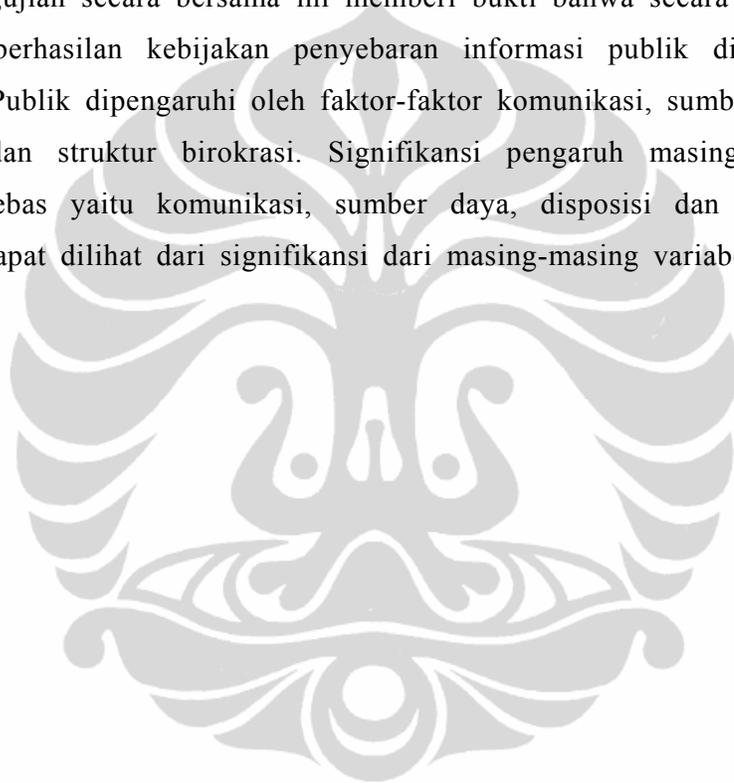
X₄ = Struktur Birokrasi

Dengan memperhatikan nilai-nilai yang tertera dipersamaan regresi linier berganda di atas maka :

- a. 0.749 : nilainya positif, artinya semakin komunikasi ditingkatkan maka keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi diduga juga akan meningkat. Dengan demikian faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan dalam hal penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik. Komunikasi yang disampaikan dengan jelas dan memperhatikan konten dan kemasan agar informasi dapat diterima dan dipahami masyarakat akan membuat penyebaran informasi menjadi efektif. Faktor komunikasi ini mempunyai peranan penting bagi semua pihak baik sasaran kebijakan itu sendiri maupun pelaksana kebijakan (*implementor*) dan pembuat kebijakan (*policy maker*).
- b. 0.543 : bernilai positif, artinya semakin Sumber Daya ditingkatkan maka keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi diduga juga akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia dalam implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di BIP mempunyai peranan yang penting. Sumber daya ini mencakup staf, dana, informasi, kewenangan dan fasilitas (Edward III, 1980:11).
- c. 0.102 : nilainya positif, ini memberi makna bahwa semakin disposisi ditingkatkan maka keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi diduga juga akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan dan keinginan publik mempunyai peranan penting dalam proses penyebaran informasi publik, karena publik juga mempunyai hak untuk mengetahui setiap kebijakan dan program pemerintah. Untuk melaksanakan kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Edward III, 1980:11).

- d. -0.073 : nilainya negatif, ini memberi arti bahwa semakin struktur birokrasi ditingkatkan maka keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang berbelit-belit akan menyulitkan publik dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan menyimpang dari tujuan kebijakan penyebaran informasi itu sendiri.

Pengujian secara bersama ini memberi bukti bahwa secara empirik tingkat keberhasilan kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dapat dilihat dari signifikansi dari masing-masing variabel bebas tersebut.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo sudah cukup berhasil menurut responden. Hal ini ditunjukkan dengan adanya respon yang cukup antusias dari peserta tatap muka terhadap tanggapan kegiatan forum tatap muka dalam rangka penyebaran informasi publik, adanya peran serta publik dalam penelitian ini adalah peserta forum tatap muka yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan forum tatap muka. Selanjutnya, masih terdapat kendala-kendala yang harus diperbaiki dalam rangka penyebaran informasi publik agar informasi dapat mudah diserap oleh publik. Hal ini ditunjukkan oleh tanggapan responden yang masih menyatakan kurang jelas terhadap konten maupun teknik penyampaian narasumber dalam menjelaskan informasi tersebut. Strategi penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka juga harus mempertimbangkan dari segi sasaran atau penerima informasi. Disamping itu pula perlu ditingkatkan dari segi koordinasi antara pelaksana dari pusat dengan pelaksana di daerah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka di Badan Informasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika adalah: (a) faktor komunikasi, (b) faktor sumber daya, (c) faktor disposisi (sikap), (d) faktor struktur birokrasi. Dari keempat faktor tersebut faktor komunikasi, sumber daya dan disposisi memberi pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi

Publik. Sedangkan faktor struktur birokrasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo.

6.2 **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik, beberapa masukan yang penting untuk diperhatikan adalah :

1. Dalam upaya meningkatkan dukungan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik, faktor komunikasi perlu lebih diperhatikan dibanding faktor yang lain. Hal ini disebabkan faktor komunikasi mempunyai pengaruh paling besar terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik.
2. Untuk mewujudkan penyebaran informasi publik yang cepat, mudah dan merata perlu adanya strategi penyebaran yang ditentukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi publik. Strategi yang diciptakan harus memperhatikan aspek-aspek yang terkait di dalamnya, di antaranya aspek konten atau isi, kemasan informasi, waktu, dan sasaran dan aspek lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Amir Santoso. 1992. *Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar*, Jurnal Ilmu Politik No. 3, Jakarta : Gramedia.
- Anderson, J.E. 1997. *Public Policy Making*. New York : Holt, Rinehart and Winston.
- B Aubrey Fisher, 1986. *Teori-teori Komunikasi*. Terjemahan : Soejono Trimo, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang : Univeritas Dipenogoro.
- Bauer, R.A. 1988. *The Study of Policy Formation*. New York : Free Press.
- Donalds Van Meter, and Carl E Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, "Administration and Society, Vol. 6, No.4, February.
- Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy Analysis : An Introduction*, Second Edition (terjemahan). Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Inc.
- Edwards dan Sharkansky dalam Wahab, Solichin Abdul Wahab. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Goggin, L. Malcolm. 1983. *Implementation Theory and Practice To World. A Third Generation*. London, England: Scott, Foresman and Company.
- Grindle, S. Merilee . 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Ibrahim, Amin. 2004. *Pokok-pokok Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.

- Islamy, Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Jones, C. O. 1996. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Terjemahan: Ricy Istamto. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lester, James P. dan Joseph Stewart Jr. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*, Belmont: Wadsworth.
- Lindblom, E Charles. 1986. *Proses Penetapan Kebijaksanaan*. (Terjemahan oleh Ardia Syamsuddin). Edisi Kedua. Jakarta : Erlangga.
- Mazmaiman, Daniel A. 1983. *Implementation and Public Policy*. London. England : Scott, Foresman and Company.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdyakarya.
- Mulyana, Dedy. 2001. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Rosda.
- Mustopadidjaja, A. R. 2000. *Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan*. Jakarta : LAN.
- Mustopadidjaja, A. R. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. LAN RI Jakarta : Duta Pertiwi Foundation.
- Nugroho, R.D. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Ripley, Rendall B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*, Chicago : Nelson-Hall Publisher.
- Ripley, Rendall B. 1978. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago : The Dorsey Press.
- Santoso, Amir dan Riza Sihbudi. 1993, *Politik, Kebijakan dan Pembangunan*. Jakarta : Dian Lestari Grafika.

- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods for Business*. Canada : John Wiley and Sons Inc.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Drs Hessel Nogi S, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Wahab, S.A. 1997. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahab, S.A. 1999. *Analisis kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang. PT Danar Wijaya.
- Wibawa, Samudera. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Surabaya
- Winarno, Budi. 2003. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Med Press.

Bahan Publikasi, Tesis, Arikel, Jurnal, Makalah :

- Ayodha Pramudita. “*Evaluation For Learning : Sekilas Tentang Evaluasi Dampak*”.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1979. “*Analisis Kebijakan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional*”. Majalah Administrator, No. 5 & 6 tahun IV.
- _____. *Implementasi Kebijakan Publik : Transformasi Pikiran*
George Edward.
- Eddy Sofyan. 2008. “*Teknologi Informasi dan Perannya Sebagai Media Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat*”.

- Iwan Asaad. 2002. “*Faktor-faktor Yang Mendukung Implementasi Kebijakan Kapet*” : Suatu Studi Pada Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare. Tesis. Universitas Indonesia
- Maryono, Y. Warella, Kismartini. 2007. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 1, Januari 2007 : 69-78
- Shannon-Weaver. *Information Theory*. Encyclopædia Britannica. 2010. Encyclopædia Britannica Online. 25 Jun. 2010
- Sunawan Agung Saksono. 2002. “*Studi Persepsi Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kebijakan Penyatuan Anggaran Rutin dan Pembangunan (Unified Budget) di MPR RI.*” Tesis. Universitas Indonesia
- Suyadi. 2002 “*Studi Persepsi Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Penyusunan Anggaran Di Indonesia*” : Studi Kasus pada Departemen Pertanian. Tesis. Universitas Indonesia.

LAMPIRAN I

PANDUAN WAWANCARA

Selamat Pagi/Siang/Sore perkenalkan nama saya..... Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik”, Dalam rangka mendukung penelitian ini dibutuhkan beberapa informasi dan data, oleh karena itu mohon kesedian Ibu/Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan.

PERTANYAAN

1. Bagaimana kaitan kebijakan penyebaran informasi publik dengan tupoksi BIP? Tujuan kebijakan itu sendiri bagaimana?
2. Bagaimana proses pelaksanaan yang telah dilakukan BIP? Hambatan yang dihadapi?
3. Sejauh mana pelaksanaannya selama ini (kondisi sekarang), feedback yang diperoleh dari masyarakat bagaimana?
4. Media yang selama ini digunakan untuk mendukung penyebaran informasi publik?
5. Apakah ada Action standar yang diterapkan dalam kebijakan tersebut?
6. Informasi apa yang dikelola/disampaikan kepada publik?
7. Pihak-pihak mana saja yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?

LAMPIRAN II

HASIL WAWANCARA

Dengan Kepala Pusat Informasi Polhukam Badan Informasi Publik, Depkominfo

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Pusat Informasi Polhukam BIP antara lain:

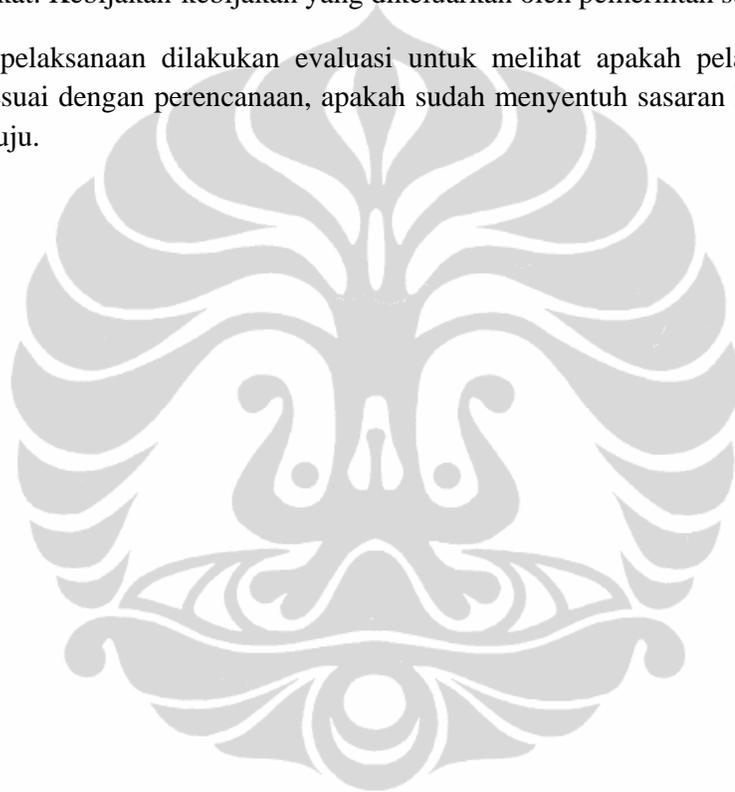
1. Kebijakan penyebaran informasi publik dikaitkan dengan tupoksi BIP itu sangat relevan sekali, karena salah satu tugas pokok dari BIP adalah melaksanakan penyebaran informasi publik. Tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri adalah agar masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya kemudian agar kebijakan itu dapat dipahami oleh masyarakat itu sendiri karena disatu sisi BIP sebagai salah satu institusi pemerintah yang berfungsi sebagai government public relations mempunyai kewajiban yang disebut dengan obligation to tell. Sementara Masyarakat itu sendiri mempunyai hak untuk mengetahui dan mengerti kebijakan-kebijakan tersebut (right to know).
2. BIP menetapkan bahwa kebijakan-kebijakan yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. BIP lebih berkonsentrasi kepada konten kebijakan publik, materi-materi kebijakan dihimpun dan diproses dan dijadikan sebagai bahan informasi yang disampaikan ke masyarakat dengan menggunakan berbagai macam media.
4. Penyebaran publik itu sendiri telah berjalan lancar dan baik. Sebelum melakukan kegiatan penyebaran informasi publik yang dilakukan adalah melakukan proses perencanaan dulu. Dalam perencanaan dibahas berbagai macam persiapan :
 - aspek konten : kebijakan apa yang akan disampaikan
 - aspek media : media apa yang akan digunakan
 - aspek lokasi : lokasi penting karena disesuaikan dengan media yang digunakan. Kalau misalkan penyebaran di daerah Jawa dipilih media yang tingkat penyebarannya tinggi dan digemari masyarakat.
 - aspek pembiayaan
 - narasumber, audience, penanggung jawab di lapangan

Sebelum pelaksanaan penyebaran informasi dilakukan survey lokasi terlebih dahulu dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di lapangan. Hasil survey di lapangan kemudian dirapatkan kembali untuk pemantapan akhir pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan perencanaan. Dari

hasil survey itu menentukan apakah kegiatan akan tetap dilaksanakan atau ditunda atau dibatalkan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan atau kondisi lapangan tidak memungkinkan.

5. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyebaran informasi pada umumnya lebih bersifat teknis (cuaca yang tidak memungkinkan pelaksanaan di areal terbuka) dan situasional. Kendala yang lain adalah ketika narasumber berhalangan datang dan kendala yang lain adalah dari segi dana atau biaya.
6. Kemasan informasi bahwa didalam mempersiapkan konten kebijakan kemasan informasi dibuat dalam beberapa bentuk. Kemasan informasi sangat variatif tergantung pada sasaran khalayak.
 - kemasan tercetak : leaflet, poster, hand out yang digunakan sebagai faktor suplemen/ pendukung yang diberikan sehingga masyarakat bisa membaca dan lebih memahami informasi yang disampaikan.
 - kemasan media elektronik : iklan layanan masyarakat (PSA)
7. Prosedur penyebaran informasi harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya :
 - konten harus dipersiapkan dengan baik, apakah dibutuhkan atau sifatnya mendesak
 - penentuan narasumber yang berkompeten
 - penentuan lokasi
 - penentuan media
 - evaluasi pelaksanaan, seberapa jauh kegiatan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat
8. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa selama ini kegiatan penyebaran informasi publik yang dilaksanakan tersebut pada umumnya mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari respon spontanitas dari masyarakat misalnya pada saat pelaksanaan dilakukan sms maupun telepon langsung bekerjasama dengan televisi lokal maupun radio setempat, respon masyarakat luar biasa cukup tinggi.
9. Dari segi SDM BIP sebagai pelaksana masih perlu ditingkatkan, masih belum mengcover secara maksimal pelaksanaan kegiatan. Dari segi anggaran apabila dikaitkan dengan kebutuhan masih belum memadai, artinya ekspektasi masyarakat terhadap penyampaian informasi sangat antusias.
10. Pembatasan sasaran : tidak ada pembatasan sasaran, tergantung kepada media yang digunakan. Jika menggunakan media tertentu maka terjadi segmentasi sasaran khalayak. Misal : jika menggunakan media cetak (advertorial) maka sasarannya khalayak menengah keatas.

11. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan : dalam kegiatan penyebaran informasi publik, bermitra dengan berbagai pihak :
 - antar departemen
 - pemerintah daerah
 - kelompok-kelompok organisasi masyarakat (pemuda, mahasiswa, ormas keagamaan, gender)
12. Informasi yang dikelola/disampaikan adalah seluruh produk peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri.
13. Setelah pelaksanaan dilakukan evaluasi untuk melihat apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan, apakah sudah menyentuh sasaran khalayak yang dituju.



LAMPIRAN III

KUESIONER FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK

A. PETUNJUK PENGISIAN

1. Kuesioner ini adalah kuesioner tertutup, diharapkan Saudara dapat mengisinya dengan objektif, sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Jawaban dari saudara dijamin tidak akan diketahui oleh orang lain atau pihak manapun. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya sampaikan terimakasih.
2. Berikan tanda (X) pada jawaban pilihan saudara.

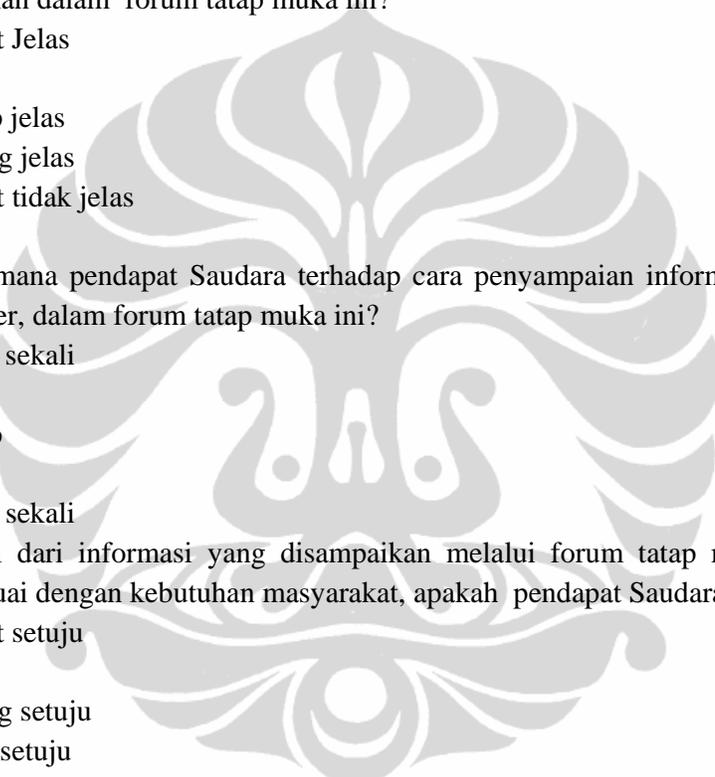
B. KETERANGAN UMUM

1. Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita
2. Usia :
3. Pendidikan Terakhir : a. Tidak Pernah Sekolah b. SD c. SMP
d. SMA e. DI/DII/DIII f. S1 g. S2/S3
4. Pekerjaan : a. PNS b. Karyawan c. Profesi
d. Pelajar/Mahasiswa e. Lainnya.....

C. PERTANYAAN

1. Komunikasi

- 1.1. Menurut saudara, bagaimana penjelasan narasumber tentang informasi yang disampaikan:
 - a. Jelas sekali
 - b. Jelas
 - c. Cukup jelas
 - d. Kurang jelas
 - e. Sangat tidak jelas

- 
- 1.2. Komunikasi antara peserta forum dengan narasumber cenderung bersifat komunikasi dua arah (dialogis), bagaimana pendapat Saudara?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju

 - 1.3. Menurut saudara, sudah jelaskah materi /konten informasi yang disampaikan dalam forum tatap muka ini?
 - a. Sangat Jelas
 - b. Jelas
 - c. Cukup jelas
 - d. Kurang jelas
 - e. Sangat tidak jelas

 - 1.4. Bagaimana pendapat Saudara terhadap cara penyampaian informasi oleh narasumber, dalam forum tatap muka ini?
 - a. Bagus sekali
 - b. Bagus
 - c. Cukup
 - d. Buruk
 - e. Buruk sekali

 - 1.5. Materi dari informasi yang disampaikan melalui forum tatap muka ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apakah pendapat Saudara?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju

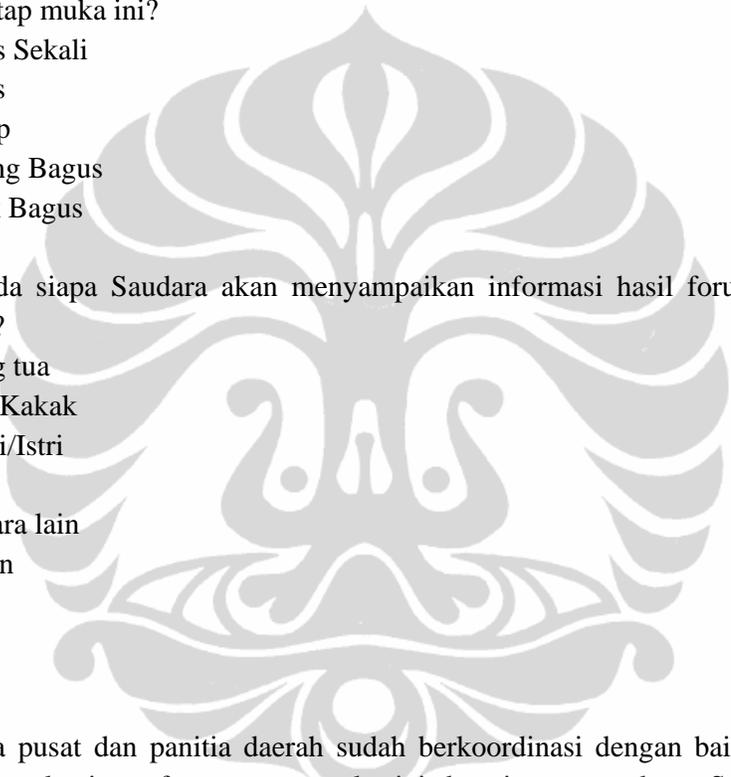
2. Sumberdaya

- 2.1. Narasumber yang dihadirkan mampu memberikan pemahaman kepada peserta forum tatap muka, bagaimana pendapat Saudara?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju

- 2.2. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan forum tatap muka ini sudah memadai, bagaimana pendapat Saudara?
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Kurang setuju
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
- 2.3. Selain forum tatap muka ini, penyebaran informasi publik telah dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, apakah pendapat saudara?
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Kurang setuju
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju

3. Disposisi

- 3.1. Pernyataan manakah yang paling tepat untuk menggambarkan ketertarikan Saudara dengan pelaksanaan forum tatap muka ini?
- Sangat tertarik
 - Tertarik
 - Biasa saja
 - Tidak tertarik
 - Sangat tidak tertarik
- 3.2. Setelah anda mengikuti forum tatap muka ini, apakah yang Saudara lakukan selanjutnya?
- Ingin segera menerapkan dalam kehidupan sehari-hari
 - Ingin menerapkan dalam kehidupan sehari-hari
 - Biasa saja
 - Tidak ingin menerapkan dalam kehidupan sehari-hari
 - Sangat tidak ingin menerapkan dalam kehidupan sehari-hari
- 3.3. Apakah manfaat yang Saudara peroleh setelah mengikuti forum tatap muka ini?
- Sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari
 - Bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari
 - Biasa saja
 - Tidak bermanfaat
 - Sangat tidak bermanfaat

- 
- 3.4. Bagaimana pendapat Saudara terhadap pelaksanaan kegiatan forum tatap muka ini, dalam kaitannya dengan penyebaran informasi publik?
- Sangat efektif
 - Efektif
 - Kurang efektif
 - Tidak efektif
 - Sangat tidak efektif
- 3.5. Bagaimana pendapat Saudara terhadap kinerja panitia pelaksana dalam forum tatap muka ini?
- Bagus Sekali
 - Bagus
 - Cukup
 - Kurang Bagus
 - Tidak Bagus
- 3.6. Kepada siapa Saudara akan menyampaikan informasi hasil forum tatap muka ini?
- Orang tua
 - Adik/Kakak
 - Suami/Istri
 - Anak
 - Saudara lain
 - Teman

4. Struktur

- 4.1. Panitia pusat dan panitia daerah sudah berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan forum tatap muka ini, bagaimana pendapat Saudara ? (struktur)
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Kurang setuju
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
- 4.2. Penyebaran informasi melalui forum tatap muka ini dapat meningkatkan pemahaman atas substansi informasi yang disosialisasikan, apakah pendapat Saudara ?
- Sangat setuju
 - Setuju

- c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
- 4.3. Pelaksanaan forum tatap muka ini sudah berjalan secara efektif dan efisien, bagaimana pendapat Saudara?
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
- 4.4. Semua peserta forum tatap muka ini adalah sasaran khalayak yang tepat, bagaimana pendapat Saudara?
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
- 4.5. Menurut Saudara, media apakah yang paling efektif untuk dipergunakan sebagai wahana penyebaran informasi publik?
- a. Televisi
 - b. Radio
 - c. Surat kabar/majalah
 - d. Media Luar Ruang
 - e. Pamflet
 - f. Media On-Line
 - g. Media Pertunjukan Rakyat
 - h. Lainnya (sebutkan),

LAMPIRAN IV : DATA HASIL KUESIONER

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
1	4	4	4	3	5	4	3	4	3	4	2	3	4	4	4	4	5	1	5	1
2	5	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	4	4	5	2	1	6	1
3	5	4	3	3	2	2	4	2	3	4	3	4	3	4	4	5	5	1	6	2
4	4	2	3	4	4	5	2	5	4	4	3	3	2	4	4	4	3	1	5	1
5	4	4	2	4	3	2	4	2	4	3	4	5	2	5	3	5	4	1	6	4
6	4	4	4	4	4	5	4	5	4	2	4	3	3	4	2	2	4	2	5	5
7	5	4	3	4	2	3	4	3	4	5	3	4	3	5	5	2	5	2	6	5
8	2	5	3	4	2	4	4	4	3	2	5	4	3	4	2	4	3	2	6	2
9	5	3	4	2	2	4	2	4	2	5	3	4	4	4	5	4	2	1	6	3
10	5	4	4	4	3	5	3	5	5	3	4	4	2	4	3	4	2	2	6	2
11	5	4	3	4	3	3	3	3	2	4	4	4	4	5	4	3	3	1	4	4
12	4	4	5	4	4	2	4	2	5	4	4	4	2	4	4	3	3	1	6	1
13	2	4	3	4	2	2	2	2	3	5	4	3	5	4	5	4	3	1	6	1
14	5	3	4	2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	2	4	1	6	3
15	4	4	4	4	4	3	3	3	4	2	4	3	4	3	5	3	2	1	5	5
16	4	4	4	4	4	3	4	3	5	2	3	3	4	3	5	4	4	1	5	3
17	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	2	1	5	2

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
18	2	4	4	4	4	2	4	2	2	3	3	4	4	4	3	3	5	1	4	4
19	5	3	4	2	4	4	4	4	2	3	3	3	4	4	3	3	4	2	7	2
20	2	3	3	4	4	2	2	2	3	4	3	5	3	4	4	2	4	2	7	2
21	5	4	3	3	4	5	4	5	3	2	4	4	5	4	5	4	3	1	6	1
22	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	2	5	4	5	3	2	5	1
23	4	4	3	2	4	3	4	4	4	2	5	4	4	3	2	3	4	2	4	4
24	2	4	3	4	4	3	2	4	2	5	4	4	4	3	5	4	3	1	6	1
25	5	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	5	5	3	4	3	1	6	1
26	4	4	3	4	2	4	4	4	2	3	4	3	4	5	5	3	5	1	6	2
27	2	2	5	3	2	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	5	2	2	6	2
28	4	3	4	5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	3	4	2	7	2
29	3	3	4	4	5	3	3	5	3	4	3	2	5	4	4	4	4	2	5	3
30	4	3	4	2	4	2	4	2	3	3	3	2	5	4	5	4	5	1	6	5
31	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	4	5	5	5	4	4	1	7	5
32	4	2	3	5	4	4	4	4	4	3	2	4	5	4	5	4	4	1	5	1
33	2	4	3	4	3	3	4	5	3	2	2	4	4	4	2	4	5	1	5	1
34	5	4	3	2	2	4	3	4	3	4	4	4	2	3	4	4	5	2	5	4
35	4	4	3	4	4	4	2	4	3	4	4	5	4	5	4	3	3	2	4	4
36	2	4	2	5	3	3	5	3	2	3	4	4	4	5	3	3	4	2	4	4
37	4	2	2	4	4	5	4	5	4	4	3	4	4	5	4	3	4	2	7	1

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
38	3	5	4	5	3	3	5	5	4	4	3	2	4	5	4	4	4	2	7	3
39	4	5	4	3	4	2	3	5	3	3	3	2	2	4	3	4	4	1	6	5
40	2	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	2	3	2	5	3	4	1	5	5
41	2	2	3	4	4	2	4	4	4	3	4	2	3	4	3	4	5	1	6	1
42	2	4	3	4	4	5	5	2	3	4	3	2	4	4	4	4	5	1	7	1
43	3	5	3	4	4	3	5	4	5	4	4	2	2	4	4	4	4	2	6	1
44	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	5	2	5	5
45	4	5	4	2	2	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	3	4	1	6	5
46	3	5	3	5	5	3	5	4	4	4	3	2	4	3	4	4	4	2	7	5
47	4	4	4	2	2	4	5	2	4	5	3	4	3	3	2	4	4	1	7	3
48	3	2	3	5	5	3	5	3	4	5	4	4	3	4	3	4	4	2	5	3
49	4	5	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	2	3	4	4	1	7	3
50	4	4	3	4	4	3	2	4	3	5	4	2	2	4	4	5	3	2	6	1
51	4	4	3	4	4	2	4	2	2	2	4	2	3	3	4	5	3	1	6	2
52	4	4	4	4	5	4	2	4	5	2	3	2	3	4	4	5	4	2	4	4
53	4	4	4	4	3	4	5	3	2	3	4	4	4	4	5	5	4	1	5	2
54	4	4	4	4	2	3	3	4	5	3	5	4	2	4	4	3	3	2	5	2
55	4	4	4	4	2	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	5	2	6	2
56	4	4	3	2	3	4	3	3	4	2	5	4	3	2	4	2	4	1	6	2

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
57	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	2	5	3
58	3	4	5	4	5	5	4	2	5	4	4	4	4	4	3	4	4	1	5	1
59	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	2	4	4	4	4	4	2	6	2
60	2	4	5	4	2	4	4	3	2	3	5	3	4	2	2	3	3	2	5	3
61	4	4	3	2	4	3	4	4	2	3	3	4	4	4	3	3	5	2	6	3
62	5	4	4	4	2	2	2	2	3	4	4	3	4	3	4	4	5	1	5	4
63	4	4	4	4	5	5	4	4	3	4	2	4	4	4	3	2	5	1	7	5
64	4	5	5	4	5	2	3	3	3	3	3	2	4	4	3	5	4	2	6	5
65	4	4	3	4	3	5	4	4	4	5	3	4	2	4	3	3	5	1	6	3
66	4	5	4	2	5	3	4	4	2	4	3	4	5	4	2	4	4	1	6	1
67	2	4	2	3	5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	5	2	6	1
68	3	4	3	3	4	4	4	4	2	2	4	5	5	4	5	5	5	1	6	1
69	2	4	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	4	4	3	3	5	1	5	1
70	2	5	3	2	3	3	2	4	3	3	2	5	4	4	4	2	5	2	6	1
71	2	4	4	4	5	2	4	4	3	5	5	3	3	2	4	2	3	1	6	5
72	3	4	4	3	2	2	4	4	3	5	3	4	5	5	3	3	4	1	7	3
73	5	4	4	4	4	3	4	2	3	5	3	4	2	2	5	3	4	2	7	5
74	4	3	2	3	4	3	3	5	4	4	3	4	4	5	3	3	4	1	7	3
75	3	3	5	4	5	3	3	2	3	5	3	4	4	4	4	4	4	2	6	2

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
76	2	3	3	4	4	4	3	5	3	4	4	2	5	4	4	5	4	1	6	2
77	3	4	3	2	4	2	4	4	3	5	3	3	4	4	4	5	3	2	5	2
78	3	4	3	4	3	4	4	4	2	5	3	3	4	5	4	5	5	1	7	2
79	3	4	3	4	5	2	4	4	4	5	3	3	3	3	4	5	5	2	4	3
80	2	4	4	4	5	5	4	5	4	5	2	4	5	2	4	5	4	1	7	2
81	2	5	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	5	2	4	5	4	2	5	4
82	3	3	3	2	4	3	2	2	4	4	4	5	4	3	4	5	3	1	5	4
83	3	3	3	4	4	3	5	2	4	4	3	3	4	3	5	5	5	2	7	1
84	2	5	2	3	4	3	2	3	3	4	4	2	4	3	4	4	4	2	6	3
85	4	5	4	4	4	4	5	3	5	4	4	2	4	4	5	4	4	1	6	3
86	4	4	4	3	5	3	3	3	3	4	3	3	4	4	5	2	4	1	5	1
87	4	5	3	4	5	3	4	4	4	3	5	3	5	5	5	3	4	2	7	3
88	2	5	4	4	4	3	4	2	4	2	3	3	5	4	5	3	5	2	6	5
89	2	4	4	4	5	2	5	4	4	3	4	4	4	3	5	4	5	1	5	2
90	2	2	3	4	2	4	3	2	4	3	4	2	5	2	3	4	5	2	6	5
91	4	4	5	4	2	4	5	5	4	3	4	4	2	4	2	4	5	1	6	2
92	4	4	3	4	4	3	5	3	5	4	4	2	2	4	2	5	4	2	6	2
93	4	4	4	2	4	4	3	3	5	2	4	5	4	4	4	4	5	1	4	5
94	4	4	4	5	4	4	3	3	4	4	5	5	4	3	4	4	4	2	4	5

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
95	4	4	4	2	5	3	3	3	5	4	5	5	4	3	4	4	5	1	6	5
96	4	4	4	5	2	5	4	4	4	4	4	5	5	4	3	3	5	2	6	5
97	2	5	4	3	5	3	5	3	3	4	5	5	2	4	3	3	5	1	6	5
98	4	4	5	4	2	3	4	3	2	2	2	4	5	5	4	4	5	2	7	3
99	4	4	5	4	5	4	2	3	4	3	2	5	2	4	2	2	3	2	6	1
100	5	4	4	5	4	4	5	2	4	3	4	3	5	4	3	3	4	2	6	1
101	5	4	5	3	4	4	3	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	2	6	1
102	2	4	2	2	4	5	5	4	3	2	4	2	4	4	3	3	2	2	5	1
103	5	4	2	2	5	2	5	4	3	4	3	4	4	2	3	3	4	1	6	3
104	5	5	4	4	5	4	5	4	4	3	3	5	5	4	2	3	5	2	5	3
105	4	5	4	3	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	4	2	4	1	6	3
106	2	4	4	3	4	4	5	3	5	3	2	4	4	4	2	4	4	1	6	5
107	5	5	3	4	3	3	5	3	4	3	3	4	4	4	5	5	3	1	4	5
108	4	5	3	2	5	3	5	3	4	4	4	5	3	2	3	3	4	2	5	1
109	2	2	4	4	4	4	2	2	3	2	3	4	5	3	3	4	4	1	4	2
110	5	4	2	2	4	2	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	5	2	6	5
111	2	4	3	5	2	3	4	4	2	4	3	5	4	4	3	3	5	1	6	5
112	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	2	5	2	2	4	5	5	2	6	3
113	2	2	3	3	5	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	1	6	1

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
114	5	4	3	5	5	3	4	4	4	2	3	3	5	3	3	4	4	2	7	1
115	4	4	3	5	5	3	3	4	4	4	3	3	5	4	3	4	4	1	6	1
116	4	4	2	4	5	2	5	4	2	3	4	4	5	3	2	4	4	2	7	3
117	4	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4	5	3	4	4	4	1	5	1
118	4	3	3	5	5	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	5	1
119	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	5	3	5	2	3	4	4	2	5	1
120	5	4	4	2	5	4	4	4	2	4	3	3	4	3	4	4	4	2	6	3
121	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	2	2	7	3
122	2	5	3	4	5	3	4	4	3	4	4	4	5	4	3	5	4	2	6	2
123	4	4	5	3	5	5	2	3	4	4	4	5	5	3	5	4	4	2	6	2
124	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	5	2	3	5	4	1	5	2
125	3	5	4	4	3	4	3	4	3	2	4	3	3	4	4	5	4	1	4	3
126	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	3	3	3	4	5	4	2	5	4
127	5	3	4	5	2	4	4	4	2	2	3	3	4	4	4	5	2	1	4	4
128	4	5	4	3	4	4	4	4	3	5	3	4	2	3	4	4	4	1	4	4
129	4	5	4	4	5	4	5	5	4	3	3	4	4	3	4	5	5	2	7	3
130	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	3	3	2	2	6	5
131	4	4	3	4	3	4	4	5	3	4	3	3	4	4	2	4	4	2	5	5
132	4	5	3	4	3	4	4	2	2	5	4	3	3	4	5	4	4	1	5	5

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
133	4	4	3	4	4	4	3	5	4	3	3	3	3	4	2	4	4	1	6	2
134	4	5	3	5	4	2	3	5	3	2	5	4	4	3	5	4	4	1	6	1
135	2	5	3	5	5	4	4	4	4	2	4	4	4	2	3	4	4	2	6	1
136	2	5	4	4	5	4	2	4	3	3	4	5	5	5	4	5	5	2	6	1
137	2	5	3	5	5	4	3	5	3	3	4	3	5	2	4	5	5	1	4	3
138	2	3	5	2	3	3	4	5	4	3	4	2	5	5	5	4	5	2	4	2
139	5	4	4	2	4	3	3	2	4	4	3	2	3	5	3	5	4	1	5	1
140	5	4	4	2	4	2	3	2	4	2	3	3	4	4	2	4	4	1	7	2
141	3	5	4	5	4	4	3	5	4	4	3	3	4	4	2	4	5	1	5	2
142	4	4	4	3	4	4	2	5	3	2	3	3	4	5	3	4	4	1	6	2
143	4	5	3	4	4	3	4	3	2	5	3	4	4	5	3	4	4	2	6	2
144	4	4	3	2	4	4	5	4	5	3	3	2	4	2	5	4	5	2	6	2
145	4	4	3	5	4	4	3	2	2	3	4	4	4	2	3	4	4	2	5	1
146	2	4	3	4	2	3	4	4	5	3	4	2	4	5	4	4	4	2	5	2
147	4	4	3	4	4	5	4	2	3	3	4	5	2	4	4	4	3	2	6	1
148	4	4	3	3	3	3	3	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	2	6	1
149	4	5	4	2	4	4	5	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	1	6	3
150	4	5	4	4	4	4	3	3	5	3	4	3	4	2	4	4	3	1	7	3
151	3	5	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	5	1	7	3

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
152	2	4	3	4	2	5	4	3	2	2	4	4	4	2	3	3	3	1	5	1
153	4	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	3	2	5	3	3	5	2	6	1
154	2	4	3	5	2	4	4	3	3	4	4	3	4	5	3	4	4	1	6	1
155	2	4	4	3	2	4	4	3	3	3	4	3	2	2	3	4	2	2	5	2
156	4	4	3	2	3	4	4	4	3	4	3	2	2	3	3	4	5	1	7	5
157	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	2	4	3	3	4	3	3	2	6	3
158	4	4	3	3	3	4	4	4	2	3	5	5	4	4	3	4	3	2	6	1
159	4	4	3	5	4	5	5	4	4	5	2	3	3	3	5	4	5	1	4	5
160	4	4	3	2	4	5	4	4	2	3	5	4	4	3	4	4	5	1	7	1
161	2	5	4	2	2	5	5	4	5	4	3	4	4	3	4	5	4	1	6	5
162	2	4	4	2	2	3	5	4	3	4	4	3	2	2	4	4	5	1	6	5
163	4	5	3	4	5	5	5	4	3	4	4	5	2	4	4	4	3	2	5	3
164	4	5	2	4	3	4	5	5	3	4	5	3	5	4	3	4	3	2	6	3
165	4	5	4	4	4	5	5	3	3	3	3	4	3	3	3	4	2	1	7	2
166	3	5	3	2	2	5	3	4	4	3	2	4	4	4	3	4	4	1	6	2
167	2	5	3	4	5	4	2	4	3	3	2	4	5	4	3	4	4	1	6	2
168	4	3	3	5	4	4	2	4	3	3	3	4	4	3	3	4	5	1	7	1
169	4	5	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	5	3	3	4	1	7	1
170	2	5	2	4	4	4	4	4	2	3	3	4	5	3	4	3	4	1	6	2

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
171	2	4	3	4	2	5	4	5	4	3	4	5	5	4	4	3	3	2	6	2
172	2	4	2	4	4	3	3	5	4	3	2	5	5	4	4	4	5	2	5	1
173	3	4	5	4	4	3	3	4	3	2	4	5	4	4	3	3	5	2	4	5
174	3	3	3	4	4	3	4	5	4	4	2	4	2	4	3	4	4	1	4	5
175	5	3	4	4	4	2	2	4	4	4	5	4	4	4	4	2	5	1	4	5
176	2	4	3	4	5	2	3	4	3	3	3	4	2	4	3	5	2	1	7	1
177	4	2	3	3	4	4	3	4	5	4	3	4	5	4	4	4	5	2	6	2
178	4	4	3	3	2	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	2	4	1	6	5
179	3	4	5	2	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	5	1	7	5
180	3	3	5	2	4	3	3	4	4	5	4	4	3	4	4	5	5	2	6	5
181	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	1	6	3
182	5	2	3	5	2	4	4	4	4	4	3	4	4	5	2	5	4	2	5	3
183	2	3	3	3	2	4	2	4	3	3	3	4	4	4	5	3	5	2	4	4
184	2	3	4	4	2	2	4	3	4	3	2	5	4	4	2	4	5	2	5	2
185	5	4	4	5	4	3	5	4	4	3	4	4	4	4	5	2	4	1	7	5
186	5	2	4	5	3	4	3	3	3	5	4	5	2	4	5	4	2	1	5	5
187	5	5	3	2	4	4	4	3	2	5	3	2	4	4	5	4	3	1	6	3
188	4	4	4	2	2	4	4	3	5	5	4	5	3	4	5	4	3	2	6	1
189	4	4	2	2	4	4	4	4	2	3	4	5	4	4	4	3	3	2	6	1

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
190	4	4	3	2	4	3	5	4	5	5	3	4	4	5	5	3	4	2	5	4
191	4	3	4	2	4	4	4	4	3	4	5	4	4	5	3	4	4	1	5	4
192	4	3	4	5	3	4	4	3	4	4	3	5	4	5	5	4	4	2	5	4
193	4	2	3	5	3	4	4	4	2	4	4	5	3	5	2	3	4	1	5	4
194	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	3	2	2	5	4	5	5	2	6	3
195	4	4	5	5	4	3	5	4	4	4	3	2	4	4	5	4	3	1	6	2
196	4	3	2	2	4	2	4	5	4	4	3	5	4	3	5	4	3	1	5	1
197	4	4	5	2	3	5	4	4	3	3	5	5	4	5	4	2	4	2	6	1
198	3	4	3	2	4	2	4	4	2	3	5	3	3	4	4	4	4	1	5	5
199	3	4	4	2	4	5	2	4	4	4	5	4	3	4	5	3	4	2	5	5
200	3	4	2	2	4	3	2	4	3	4	5	2	3	4	4	5	4	2	5	4
201	4	4	5	2	2	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	2	5	1
202	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	5	2	4	3	5	5	3	2	4	4
203	4	4	2	3	4	5	4	4	5	4	4	5	4	3	5	4	2	1	7	5
204	4	4	3	2	5	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	5	4	1	7	1
205	4	4	2	4	4	2	4	3	2	2	4	3	3	4	3	4	4	1	6	4
206	4	4	4	3	4	2	3	3	4	5	4	3	2	2	3	5	3	1	6	2
207	4	4	3	3	4	3	3	4	3	2	4	3	5	2	4	5	4	1	6	1
208	4	4	4	2	3	3	5	3	4	5	2	4	2	4	4	5	4	2	6	2

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
209	4	4	2	2	2	3	5	4	4	3	3	3	5	4	4	5	3	1	6	2
210	4	4	5	2	2	4	2	2	5	4	4	3	3	4	3	3	3	1	5	3
211	4	4	3	4	2	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	7	4
212	4	3	2	4	2	4	5	4	5	5	4	2	4	4	4	4	5	1	4	3
213	4	4	4	4	2	2	3	2	3	3	4	4	5	4	4	4	2	2	5	4
214	4	4	3	3	4	5	4	3	4	2	4	4	3	4	5	4	2	2	5	3
215	4	4	4	3	5	4	4	5	4	2	4	4	5	4	4	4	5	2	6	3
216	4	4	2	4	4	4	5	4	4	3	4	4	5	3	4	3	5	2	6	2
217	4	3	2	2	4	3	5	5	4	3	4	4	3	4	4	2	5	2	7	1
218	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	4	3	3	4	4	4	2	6	1
219	2	3	3	3	2	4	4	4	3	4	5	5	3	4	4	4	4	1	5	1
220	4	2	3	3	2	3	4	2	3	2	2	3	4	3	4	4	4	2	6	5
221	4	3	4	3	2	5	4	4	3	4	5	4	5	3	4	4	4	1	7	2
222	4	3	2	4	2	5	4	4	4	2	4	4	4	4	5	2	4	1	6	3
223	4	4	4	4	2	2	4	4	4	5	4	4	2	4	5	4	4	1	6	2
224	4	2	4	4	3	4	4	3	5	3	4	4	5	4	4	4	4	2	6	5
225	4	5	4	5	4	4	3	3	3	3	5	4	3	4	4	4	4	1	7	1
226	4	4	3	4	2	3	3	4	2	3	4	5	5	3	5	4	4	2	5	2
227	5	5	3	5	4	4	3	2	2	3	2	5	5	4	5	2	4	1	4	4

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
228	4	5	4	3	4	4	3	3	3	4	2	4	5	5	5	4	5	2	4	5
229	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	1	7	2
230	5	4	4	4	2	5	4	3	3	3	3	4	5	5	4	4	5	2	7	2
231	4	5	3	4	2	3	3	3	4	3	3	4	5	3	4	2	4	1	6	3
232	4	5	4	4	2	4	5	4	2	2	4	5	5	4	4	4	4	2	6	5
233	4	4	3	2	4	4	4	2	4	4	2	5	2	4	4	3	4	1	6	5
234	4	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	5	3	4	4	1	5	3
235	2	4	2	3	4	4	4	4	5	3	2	5	4	4	2	3	4	1	7	2
236	5	4	2	3	4	4	4	4	3	4	5	2	3	4	5	3	4	2	7	1
237	5	5	4	4	4	5	3	4	3	4	3	2	4	4	2	4	5	2	6	2
238	3	5	5	4	4	5	3	4	3	3	3	4	4	4	5	2	5	1	6	2
239	4	5	3	5	2	4	3	4	3	5	5	4	3	4	3	5	4	1	5	5
240	4	5	4	4	3	5	3	4	4	3	3	4	5	4	4	4	4	1	5	3
241	5	4	3	2	4	2	2	5	3	4	4	3	3	4	4	4	4	1	4	5
242	3	4	3	2	3	2	2	4	3	4	3	3	4	3	5	5	4	2	4	4
243	2	5	4	4	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4	3	2	5	2	4	4
244	2	4	4	4	2	4	4	5	2	4	5	2	4	3	2	4	3	2	6	3
245	5	4	2	4	4	4	4	5	4	4	2	4	4	3	2	5	5	1	7	2
246	5	5	4	4	4	3	3	5	3	5	4	4	4	3	3	4	3	1	7	2

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
247	5	5	4	2	4	3	3	5	3	5	4	4	2	4	3	5	4	1	5	1
248	4	5	3	4	5	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	1	6	1
249	2	4	5	2	4	2	4	2	4	5	4	4	3	4	4	5	4	1	6	1
250	4	4	4	5	5	4	2	2	4	4	4	3	4	5	2	5	4	2	6	1
251	2	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	5	4	5	4	5	4	2	6	2
252	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	4	5	2	5	4	2	5	3
253	5	4	2	4	4	3	3	4	3	4	5	3	5	3	5	5	5	2	7	2
254	5	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	2	4	5	3	5	4	1	6	2
255	5	3	2	4	4	2	3	3	2	4	4	2	4	4	3	2	4	1	7	3
256	5	3	2	3	2	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	2	2	2	7	5
257	4	4	2	3	3	4	4	2	4	4	4	4	3	4	3	4	2	1	5	2
258	5	4	3	3	3	5	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	2	2	6	1
259	4	3	3	2	3	4	4	3	3	3	5	3	4	4	3	4	2	2	6	1
260	4	5	2	4	4	4	4	3	3	3	5	3	2	4	3	5	4	1	4	3
261	4	5	4	3	4	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	5	4	2	6	1
262	4	3	3	3	5	5	2	4	4	3	5	4	4	3	2	4	3	2	7	5
263	2	3	3	4	3	5	5	2	4	4	4	4	3	4	4	2	4	1	6	5
264	4	4	4	4	2	4	2	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	1	7	5
265	4	4	4	3	2	4	5	2	4	5	4	3	3	4	4	3	4	1	6	2

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
266	4	4	4	4	3	4	3	5	4	4	4	3	3	4	4	3	4	2	5	5
267	5	4	4	4	3	4	4	3	3	4	5	3	3	4	4	3	4	1	6	4
268	5	4	4	4	3	4	4	3	5	4	5	3	4	3	4	3	2	2	6	5
269	5	5	4	3	4	4	5	3	3	4	5	3	2	2	5	4	2	2	4	4
270	4	4	3	2	2	3	3	3	4	3	5	4	3	4	4	4	2	1	6	5
271	4	5	3	2	4	3	2	4	4	3	3	4	3	4	4	2	4	1	4	2
272	4	4	4	3	2	3	2	3	4	3	4	5	3	5	4	4	4	2	5	1
273	4	4	4	3	5	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	5	4	2	5	5
274	4	4	3	3	5	4	3	3	4	2	5	4	4	5	4	3	4	2	6	3
275	4	4	4	5	5	4	3	2	4	2	4	5	2	5	4	4	4	2	6	2
276	5	4	3	4	5	3	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4	1	7	2
277	5	4	3	4	5	5	2	3	3	4	4	4	4	5	5	4	2	1	6	5
278	5	4	3	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	5	4	5	3	1	5	1
279	5	4	2	5	5	3	2	4	2	3	4	4	4	3	5	4	4	2	6	1
280	3	5	4	2	3	2	5	4	3	3	4	4	4	2	5	4	4	2	7	1
281	4	4	4	5	5	2	4	3	4	3	4	4	4	2	5	4	4	2	7	5
282	3	4	3	5	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	2	1	6	5
283	5	4	4	5	4	4	3	4	3	2	4	3	5	4	2	5	4	1	6	5
284	4	4	4	4	5	4	3	4	3	3	4	3	4	4	5	4	4	1	5	5

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
285	4	4	3	2	5	3	4	3	2	4	4	5	5	3	5	4	4	1	4	5
286	4	4	5	4	4	3	3	2	4	4	4	5	5	3	4	4	5	1	4	5
287	4	4	3	4	4	3	3	2	4	4	4	5	5	4	4	2	4	2	4	5
288	4	3	4	4	5	4	5	3	3	5	4	5	5	2	2	2	5	2	6	3
289	4	5	4	4	4	4	2	3	4	4	4	5	5	5	4	4	4	2	6	3
290	4	5	4	2	4	4	4	3	4	4	3	5	3	3	2	4	4	2	6	1
291	4	4	4	5	5	3	4	3	3	5	4	5	2	4	5	4	4	1	5	2
292	4	4	4	5	5	3	5	4	5	4	4	5	2	4	4	4	4	1	6	2
293	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	5	3	4	4	2	6	2
294	4	3	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	2	2	5	4
295	4	3	3	4	3	3	5	3	4	4	3	5	4	2	3	3	3	1	4	4
296	4	3	3	3	4	4	5	2	4	4	3	5	3	2	4	5	4	1	7	2
297	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	5	4	2	7	1
298	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	2	4	2	5	2
299	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	2	4	2	3	4	4	4	1	6	5
300	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	5	4	3	4	2	5	5	2	6	5
301	2	4	5	2	4	5	4	2	4	5	4	4	3	5	4	4	4	1	6	5
302	3	3	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	3	5	4	4	2	2	6	5
303	5	5	4	3	5	4	5	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4	1	6	2

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
304	5	5	4	4	3	4	5	4	3	5	3	3	4	5	4	5	5	2	5	1
305	4	4	4	4	3	4	4	4	3	5	3	4	2	5	4	5	5	1	7	3
306	4	5	3	5	3	3	5	2	3	5	5	4	4	5	4	4	4	2	7	2
307	5	4	3	3	3	3	2	4	3	5	2	4	2	5	5	4	4	1	6	1
308	5	5	3	3	4	3	2	4	3	5	4	3	5	5	3	4	4	2	5	3
309	4	5	3	4	4	3	4	4	4	4	5	3	3	4	4	4	4	1	5	2
310	4	4	2	4	4	2	4	4	3	4	5	3	3	4	4	4	5	1	6	1
311	4	5	5	4	3	2	4	5	5	5	4	3	3	5	4	4	4	1	6	3
312	4	5	4	4	3	4	3	4	4	5	4	2	3	5	4	4	5	2	6	1
313	4	5	4	4	3	4	3	4	4	3	5	2	4	3	4	4	4	2	5	4
314	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	5	3	4	1	4	3
315	3	5	3	4	4	3	2	5	4	4	4	4	3	4	5	3	4	1	7	3
316	3	5	3	4	5	3	3	4	3	4	5	4	3	5	4	3	4	1	4	5
317	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	5	3	2	4	4	3	4	2	5	2
318	4	4	4	4	2	4	3	4	3	4	4	3	4	5	4	4	4	2	6	5
319	4	4	5	4	2	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	2	6	2
320	4	4	3	4	3	5	3	3	2	3	4	4	3	4	5	5	4	1	7	5
321	4	5	3	4	3	4	2	3	2	4	4	2	4	4	5	4	5	1	6	5
322	5	5	3	4	3	4	4	4	4	2	5	3	4	4	4	4	4	2	6	3

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
323	5	5	3	5	4	4	5	4	4	3	4	4	3	3	5	4	4	2	7	2
324	2	5	5	3	2	3	3	3	4	4	5	4	4	3	2	4	4	1	5	1
325	5	5	3	3	4	4	4	2	3	3	4	4	5	4	2	3	5	1	6	3
326	4	4	4	3	2	4	4	2	3	3	4	2	5	3	4	3	5	1	6	1
327	4	4	4	3	5	4	3	3	3	3	4	3	5	5	4	4	4	1	7	3
328	4	4	4	4	3	4	5	3	4	2	4	3	3	3	4	4	2	1	7	3
329	4	4	4	4	3	3	3	3	2	4	4	3	5	4	3	2	2	1	6	1
330	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	2	4	1	6	1
331	4	5	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	5	5	4	4	4	1	5	2
332	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	2	4	4	1	6	3
333	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	2	4	4
334	4	5	4	4	3	2	4	5	2	3	4	4	4	4	4	3	4	1	4	2
335	4	5	3	4	3	2	4	4	3	5	4	3	4	4	5	4	5	2	6	1
336	2	4	3	3	2	3	3	5	3	3	4	3	4	3	4	4	4	1	6	1
337	5	4	3	3	4	3	3	3	3	4	5	4	5	3	5	4	5	2	7	3
338	5	4	3	3	5	3	3	4	4	4	5	4	3	5	5	2	2	1	7	2
339	5	4	5	3	3	3	4	4	4	4	4	5	3	5	5	3	2	2	5	1
340	5	5	5	2	4	4	4	4	5	4	2	4	3	5	5	4	4	1	5	3
341	3	5	4	2	4	4	3	3	4	4	2	5	2	3	5	3	4	2	6	2

Lanjutan

Resp	Variabel																	Karakteristik Responden		
	Komunikasi					Sumberdaya			Disposisi					Birokrasi				JK	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17			
342	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	2	3	3	4	4	1	6	2
343	4	5	4	4	5	5	4	4	3	3	4	4	4	3	2	3	4	2	6	1
344	4	4	3	4	3	4	4	3	5	3	4	4	4	4	2	3	4	1	6	1
345	3	4	3	3	4	5	3	5	3	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	2
346	4	4	3	3	4	3	3	3	4	2	3	4	3	4	4	4	2	2	4	2
347	5	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	2	3	5	4	4	3	1	7	3
348	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	5	3	4	4	1	5	5
349	4	5	3	2	4	4	4	5	3	3	4	3	4	3	3	3	4	2	7	3
350	4	4	3	3	4	3	4	4	5	3	4	3	2	3	4	2	4	2	6	1

LAMPIRAN V

DATA HASIL ANALISIS DISTRIBUSI FREKUENSI

Tabel Tanggapan Responden Terhadap Penjelasan Narasumber

Kriteria	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir								Total	
		SMA		Diploma		S1		Pasca Sarjana			
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Kurang Jelas	PNS	0	0.0	4	1.1	1	0.3	0	0.0	5	1.4
	Karyawan	2	0.6	4	1.1	8	2.3	3	0.9	17	4.9
	Profesi	1	0.3	1	0.3	2	0.6	0	0.0	4	1.1
	Pelajar/Mahasiswa	12	3.4	7	2.0	2	0.6	0	0.0	21	6.0
	Lainnya	0	0.0	1	0.3	11	3.1	0	0.0	12	3.4
	Total	15	4.3	17	4.9	24	6.9	3	0.9	59	16.9
Cukup Jelas	PNS	0	0.0	1	0.3	2	0.6	2	0.6	5	1.4
	Karyawan	1	0.3	3	0.9	5	1.4	1	0.3	10	2.9
	Profesi	2	0.6	2	0.6	1	0.3	5	1.4	10	2.9
	Pelajar/Mahasiswa	1	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	3	0.9
	Lainnya	3	0.9	3	0.9	4	1.1	2	0.6	12	3.4
	Total	7	2.0	11	3.1	12	3.4	10	2.9	40	11.4
Jelas	PNS	0	0.0	13	3.7	28	8.0	8	2.3	49	14.0
	Karyawan	3	0.9	10	2.9	24	6.9	5	1.4	42	12.0
	Profesi	3	0.9	7	2.0	17	4.9	12	3.4	39	11.1
	Pelajar/Mahasiswa	7	2.0	8	2.3	2	0.6	1	0.3	18	5.1
	Lainnya	7	2.0	9	2.6	15	4.3	8	2.3	39	11.1
	Total	20	5.7	47	13.4	86	24.6	34	9.7	187	53.4
Jelas Sekali	PNS	0	0.0	5	1.4	8	2.3	2	0.6	15	4.3
	Karyawan	0	0.0	0	0.0	5	1.4	10	2.9	15	4.3
	Profesi	0	0.0	5	1.4	7	2.0	3	0.9	15	4.3
	Pelajar/Mahasiswa	4	1.1	2	0.6	1	0.3	0	0.0	7	2.0
	Lainnya	3	0.9	1	0.3	5	1.4	3	0.9	12	3.4
	Total	7	2.0	13	3.7	26	7.4	18	5.1	64	18.3

Tabel Tanggapan Responden terhadap Komunikasi Dua Arah Forum Tatap Muka

Kriteria	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir								Total	
		SMA		Diploma		S1		Pasca Sarjana			
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Tidak Setuju	PNS	0	0.0	2	0.6	2	0.6	1	0.3	5	1.4
	Karyawan	1	0.3	0	0.0	2	0.6	0	0.0	3	0.9
	Profesi	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	2	0.6
	Pelajar/Mahasiswa	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3
	Lainnya	0	0.0	1	0.3	3	0.9	0	0.0	4	1.1
	Total	1	0.3	6	1.7	7	2.0	1	0.3	15	4.3
Ragu-ragu	PNS	0	0.0	3	0.9	3	0.9	4	1.1	10	2.9
	Karyawan	1	0.3	2	0.6	2	0.6	5	1.4	10	2.9
	Profesi	1	0.3	1	0.3	5	1.4	3	0.9	10	2.9
	Pelajar/Mahasiswa	3	0.9	4	1.1	0	0.0	0	0.0	7	2.0
	Lainnya	2	0.6	0	0.0	4	1.1	2	0.6	8	2.3
	Total	7	2.0	10	2.9	14	4.0	14	4.0	45	12.9
Setuju	PNS	0	0.0	17	4.9	33	9.4	6	1.7	56	16.0
	Karyawan	2	0.6	12	3.4	27	7.7	9	2.6	50	14.3
	Profesi	2	0.6	7	2.0	10	2.9	9	2.6	28	8.0
	Pelajar/Mahasiswa	9	2.6	6	1.7	3	0.9	1	0.3	19	5.4
	Lainnya	8	2.3	11	3.1	19	5.4	10	2.9	48	13.7
	Total	21	6.0	53	15.1	92	26.3	35	10.0	201	57.4
Sangat Setuju	PNS	0	0.0	4	1.1	12	3.4	3	0.9	19	5.4
	Karyawan	2	0.6	3	0.9	11	3.1	5	1.4	21	6.0
	Profesi	3	0.9	5	1.4	12	3.4	8	2.3	28	8.0
	Pelajar/Mahasiswa	4	1.1	2	0.6	0	0.0	0	0.0	6	1.7
	Lainnya	3	0.9	2	0.6	9	2.6	1	0.3	15	4.3
	Total	12	3.4	16	4.6	44	12.6	17	4.9	89	25.4

Tabel Tanggapan Responden terhadap Konten Informasi yang Disampaikan

Kriteria	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir								Total	
		SMA		Diploma		S1		Pasca Sarjana			
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Kurang Jelas	PNS	0	0.0	3	0.9	1	0.3	2	0.6	6	1.7
	Karyawan	2	0.6	3	0.9	3	0.9	1	0.3	9	2.6
	Profesi	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.6	4	1.1
	Pelajar/ Mahasiswa	6	1.7	4	1.1	2	0.6	0	0.0	12	3.4
	Lainnya	2	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.9
	Total	10	2.9	11	3.1	8	2.3	5	1.4	34	9.7
Cukup Jelas	PNS	0	0.0	12	3.4	27	7.7	9	2.6	48	13.7
	Karyawan	3	0.9	8	2.3	16	4.6	7	2.0	34	9.7
	Profesi	2	0.6	6	1.7	10	2.9	4	1.1	22	6.3
	Pelajar/ Mahasiswa	7	2.0	6	1.7	0	0.0	1	0.3	14	4.0
	Lainnya	7	2.0	4	1.1	12	3.4	4	1.1	27	7.7
	Total	19	5.4	36	10.3	65	18.6	25	7.1	145	41.4
Jelas	PNS	0	0.0	7	2.0	13	3.7	2	0.6	22	6.3
	Karyawan	2	0.6	8	2.3	16	4.6	9	2.6	35	10.0
	Profesi	2	0.6	6	1.7	11	3.1	12	3.4	31	8.9
	Pelajar/ Mahasiswa	8	2.3	6	1.7	1	0.3	0	0.0	15	4.3
	Lainnya	4	1.1	9	2.6	19	5.4	6	1.7	38	10.9
	Total	16	4.6	36	10.3	60	17.1	29	8.3	141	40.3
Jelas Sekali	PNS	0	0.0	4	1.1	5	1.4	0	0.0	9	2.6
	Karyawan	1	0.3	0	0.0	7	2.0	0	0.0	8	2.3
	Profesi	0	0.0	3	0.9	2	0.6	1	0.3	6	1.7
	Lainnya	2	0.6	1	0.3	3	0.9	1	0.3	7	2.0
	Total	3	0.9	8	2.3	17	4.9	2	0.6	30	8.6

Tabel Tanggapan Responden terhadap Teknik Penyampaian Narasumber

Kriteria	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir								Total	
		SMA		Diploma		S1		Pasca Sarjana			
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Buruk	PNS	0	0.0	6	1.7	8	2.3	4	1.1	16	4.5
	Karyawan	2	0.6	1	0.3	6	1.7	2	0.6	11	3.1
	Profesi	0	0.0	2	0.6	7	2.0	2	0.6	11	3.1
	Pelajar/ Mahasiswa	2	0.6	6	1.7	0	0.0	0	0.0	8	2.3
	Lainnya	3	0.9	2	0.6	10	2.9	2	0.6	17	4.9
	Total	7	2.0	17	4.9	31	8.9	10	2.9	65	18.6
Cukup	PNS	0	0.0	7	2.0	17	4.9	1	0.3	25	7.1
	Karyawan	2	0.6	4	1.1	9	2.6	4	1.1	19	5.4
	Profesi	0	0.0	3	0.9	7	2.0	7	2.0	17	4.9
	Pelajar/ Mahasiswa	5	1.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	6	1.7
	Lainnya	1	0.3	2	0.6	7	2.0	3	0.9	13	3.7
	Total	8	2.3	17	4.9	40	11.4	15	4.3	80	22.9
Bagus	PNS	0	0.0	9	2.6	18	5.1	6	1.7	33	9.4
	Karyawan	2	0.6	10	2.9	24	6.9	10	2.9	46	13.1
	Profesi	5	1.4	8	2.3	13	3.7	10	2.9	36	10.3
	Pelajar/ Mahasiswa	6	1.7	4	1.1	3	0.9	1	0.3	14	4.0
	Lainnya	7	2.0	8	2.3	14	4.0	4	1.1	33	9.4
	Total	20	5.7	39	11.1	72	20.6	31	8.9	162	46.3
Bagus Sekali	PNS	0	0.0	4	1.1	7	2.0	3	0.9	14	4.0
	Karyawan	0	0.0	2	0.6	3	0.9	3	0.9	8	2.3
	Profesi	1	0.3	2	0.6	0	0.0	1	0.3	4	1.1
	Pelajar/ Mahasiswa	3	0.9	2	0.6	0	0.0	0	0.0	5	1.4
	Lainnya	2	0.6	2	0.6	4	1.1	4	1.1	12	3.4
	Total	6	1.7	12	3.4	14	4.0	11	3.1	43	12.3

Tabel Tanggapan Responden terhadap Materi yang Disampaikan Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan

Kriteria	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir								Total	
		SMA		Diploma		S1		Pasca Sarjana			
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Tidak Setuju	PNS	0	0.0	5	1.4	6	1.7	0	0.0	11	3.1
	Karyawan	0	0.0	5	1.4	12	3.4	2	0.6	19	5.4
	Profesi	1	0.3	3	0.9	4	1.1	3	0.9	11	3.1
	Pelajar/Mahasiswa	3	0.9	3	0.9	0	0.0	1	0.3	7	2.0
	Lainnya	0	0.0	1	0.3	13	3.7	2	0.6	16	4.6
	Total	4	1.1	17	4.9	35	10.0	8	2.3	64	18.3
Ragu-ragu	PNS	0	0.0	3	0.9	14	4.0	1	0.3	18	5.1
	Karyawan	2	0.6	6	1.7	6	1.7	2	0.6	16	4.6
	Profesi	1	0.3	2	0.6	4	1.1	3	0.9	10	2.9
	Pelajar/Mahasiswa	5	1.4	4	1.1	2	0.6	0	0.0	11	3.1
	Lainnya	1	0.3	4	1.1	6	1.7	2	0.6	13	3.7
	Total	9	2.6	19	5.4	32	9.1	8	2.3	68	19.4
Setuju	PNS	0	0.0	12	3.4	19	5.4	10	2.9	41	11.7
	Karyawan	4	1.1	4	1.1	17	4.9	12	3.4	37	10.6
	Profesi	2	0.6	6	1.7	14	4.0	9	2.6	31	8.9
	Pelajar/Mahasiswa	7	2.0	6	1.7	1	0.3	0	0.0	14	4.0
	Lainnya	10	2.9	7	2.0	11	3.1	5	1.4	33	9.4
	Total	23	6.6	35	10.0	62	17.7	36	10.3	156	44.6
Sangat Setuju	PNS	0	0.0	6	1.7	11	3.1	3	0.9	20	5.7
	Karyawan	0	0.0	2	0.6	7	2.0	3	0.9	12	3.4
	Profesi	2	0.6	4	1.1	5	1.4	5	1.4	16	4.6
	Pelajar/Mahasiswa	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
	Lainnya	2	0.6	2	0.6	5	1.4	4	1.1	13	3.7
	Total	5	1.4	14	4.0	28	8.0	15	4.3	62	17.7

Tabel Tanggapan Responden terhadap Informasi yang Disampaikan Narasumber Memberikan Pemahaman

Kriteria	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir								Total	
		SMA		Diploma		S1		Pasca Sarjana			
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Tidak Setuju	PNS	0	0.0	1	0.3	7	2.0	2	0.6	10	2.9
	Karyawan	1	0.3	3	0.9	4	1.1	2	0.6	10	2.9
	Profesi	1	0.3	0	0.0	2	0.6	3	0.9	6	1.7
	Pelajar/ Mahasiswa	2	0.6	2	0.6	2	0.6	1	0.3	7	2.0
	Lainnya	2	0.6	1	0.3	5	1.4	1	0.3	9	2.6
	Total	6	1.7	7	2.0	20	5.7	9	2.6	42	12.0
Ragu-ragu	PNS	0	0.0	11	3.1	19	5.4	4	1.1	34	9.7
	Karyawan	3	0.9	6	1.7	12	3.4	7	2.0	28	8.0
	Profesi	0	0.0	5	1.4	5	1.4	7	2.0	17	4.9
	Pelajar/ Mahasiswa	5	1.4	5	1.4	0	0.0	0	0.0	10	2.9
	Lainnya	7	2.0	2	0.6	12	3.4	3	0.9	24	6.9
	Total	15	4.3	29	8.3	48	13.7	21	6.0	113	32.3
Setuju	PNS	0	0.0	8	2.3	19	5.4	5	1.4	32	9.1
	Karyawan	1	0.3	8	2.3	20	5.7	6	1.7	35	10.0
	Profesi	5	1.4	7	2.0	18	5.1	10	2.9	40	11.4
	Pelajar/ Mahasiswa	9	2.6	6	1.7	1	0.3	0	0.0	16	4.6
	Lainnya	3	0.9	9	2.6	13	3.7	5	1.4	30	8.6
	Total	18	5.1	38	10.9	71	20.3	26	7.4	153	43.7
Setuju Sekali	PNS	0	0.0	6	1.7	5	1.4	3	0.9	14	4.0
	Karyawan	1	0.3	0	0.0	6	1.7	4	1.1	11	3.1
	Profesi	0	0.0	3	0.9	2	0.6	0	0.0	5	1.4
	Lainnya	1	0.3	2	0.6	5	1.4	4	1.1	12	3.4
	Total	2	0.6	11	3.1	18	5.1	11	3.1	42	12.0

Tabel Tanggapan Responden terhadap Sarana Prasana

Kriteria	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir								Total	
		SMA		Diploma		S1		Pasca Sarjana			
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Tidak Setuju	PNS	0	0.0	2	0.6	9	2.6	1	0.3	12	3.4
	Karyawan	2	0.6	0	0.0	3	0.9	1	0.3	6	1.7
	Profesi	0	0.0	2	0.6	3	0.9	1	0.3	6	1.7
	Pelajar/ Mahasiswa	4	1.1	3	0.9	0	0.0	0	0.0	7	2.0
	Lainnya	2	0.6	1	0.3	2	0.6	2	0.6	7	2.0
	Total	8	2.3	8	2.3	17	4.9	5	1.4	38	10.9
Ragu-Ragu	PNS	0	0.0	9	2.6	12	3.4	3	0.9	24	6.9
	Karyawan	2	0.6	5	1.4	15	4.3	5	1.4	27	7.7
	Profesi	2	0.6	2	0.6	3	0.9	5	1.4	12	3.4
	Pelajar/ Mahasiswa	2	0.6	4	1.1	0	0.0	0	0.0	6	1.7
	Lainnya	7	2.0	6	1.7	9	2.6	3	0.9	25	7.1
	Total	13	3.7	26	7.4	39	11.1	16	4.6	94	26.9
Setuju	PNS	0	0.0	12	3.4	27	7.7	6	1.7	45	12.9
	Karyawan	2	0.6	10	2.9	14	4.0	9	2.6	35	10.0
	Profesi	3	0.9	8	2.3	16	4.6	9	2.6	36	10.3
	Pelajar/ Mahasiswa	7	2.0	5	1.4	3	0.9	1	0.3	16	4.6
	Lainnya	2	0.6	7	2.0	18	5.1	6	1.7	33	9.4
	Total	14	4.0	42	12.0	78	22.3	31	8.9	165	47.1
Sangat Setuju	PNS	0	0.0	3	0.9	2	0.6	4	1.1	9	2.6
	Karyawan	0	0.0	2	0.6	10	2.9	4	1.1	16	4.6
	Profesi	1	0.3	3	0.9	5	1.4	5	1.4	14	4.0
	Pelajar/ Mahasiswa	3	0.9	1	0.3	0	0.0	0	0.0	4	1.1
	Lainnya	2	0.6	0	0.0	6	1.7	2	0.6	10	2.9
	Total	6	1.7	9	2.6	23	6.6	15	4.3	53	15.1

Tabel Tanggapan Responden Terhadap Pemanfaatan Media Selain Forum Tatap Muka

Kriteria	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir								Total	
		SMA		Diploma		S1		Pasca Sarjana			
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Tidak Setuju	PNS	0	0.0	3	0.9	7	2.0	2	0.6	10	2.9
	Karyawan	1	0.3	1	0.3	5	1.4	4	1.1	11	3.1
	Profesi	0	0.0	1	0.3	2	0.6	1	0.3	4	1.1
	Pelajar/ Mahasiswa	2	0.6	3	0.9	1	0.3	0	0.0	6	1.7
	Lainnya	2	0.6	1	0.3	7	2.0	1	0.3	13	3.7
	Total	5	1.4	9	2.6	22	6.3	8	2.3	44	12.6
Ragu-ragu	PNS	0	0.0	6	1.7	13	3.7	3	0.9	22	6.3
	Karyawan	1	0.3	6	1.7	11	3.1	4	1.1	22	6.3
	Profesi	1	0.3	4	1.1	10	2.9	8	2.3	23	6.6
	Pelajar/ Mahasiswa	4	1.1	2	0.6	2	0.6	0	0.0	8	2.3
	Lainnya	5	1.4	4	1.1	11	3.1	2	0.6	22	6.3
	Total	11	3.1	22	6.3	47	13.4	17	4.9	97	27.7
Setuju	PNS	0	0.0	12	3.4	26	7.4	7	2.0	45	12.9
	Karyawan	1	0.3	9	2.6	20	5.7	8	2.3	38	10.9
	Profesi	4	1.1	9	2.6	11	3.1	6	1.7	30	8.6
	Pelajar/ Mahasiswa	9	2.6	8	2.3	0	0.0	0	0.0	17	4.9
	Lainnya	4	1.1	5	1.4	16	4.6	10	2.9	35	10.0
	Total	18	5.1	43	12.3	73	20.9	31	8.9	165	47.1
Setuju Sekali	PNS	0	0.0	5	1.4	4	1.1	2	0.6	11	3.1
	Karyawan	3	0.9	1	0.3	6	1.7	3	0.9	13	3.7
	Profesi	1	0.3	1	0.3	4	1.1	5	1.4	11	3.1
	Pelajar/ Mahasiswa	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.6
	Lainnya	2	0.6	4	1.1	1	0.3	0	0.0	7	2.0
	Total	7	2.0	11	3.1	15	4.3	11	3.1	44	12.6

Tabel Tanggapan Responden terhadap Ketertarikan dengan Pelaksanaan Forum Tatap Muka

Kriteria	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir								Total	
		SMA		Diploma		S1		Pasca Sarjana			
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Tidak Tertarik	PNS	0	0.0	2	0.6	10	2.9	1	0.3	13	3.7
	Karyawan	1	0.3	2	0.6	4	1.1	2	0.6	9	2.6
	Profesi	0	0.0	2	0.6	5	1.4	3	0.9	10	2.9
	Pelajar/ Mahasiswa	5	1.4	1	0.3	1	0.3	0	0.0	7	2.0
	Lainnya	1	0.3	2	0.6	3	0.9	1	0.3	7	2.0
	Total	7	2.0	9	2.6	23	6.6	7	2.0	46	13.1
Biasa Saja	PNS	0	0.0	10	2.9	19	5.4	9	2.6	38	10.9
	Karyawan	2	0.6	6	1.7	13	3.7	10	2.9	31	8.9
	Profesi	3	0.9	4	1.1	5	1.4	6	1.7	18	5.1
	Pelajar/ Mahasiswa	6	1.7	6	1.7	1	0.3	0	0.0	13	3.7
	Lainnya	4	1.1	6	1.7	12	3.4	6	1.7	28	8.0
	Total	15	4.3	32	9.1	50	14.3	31	8.9	128	36.6
Tertarik	PNS	0	0.0	12	3.4	16	4.6	4	1.1	32	9.1
	Karyawan	3	0.9	7	2.0	19	5.4	6	1.7	35	10.0
	Profesi	2	0.6	6	1.7	14	4.0	10	2.9	32	9.1
	Pelajar/ Mahasiswa	4	1.1	5	1.4	1	0.3	1	0.3	11	3.1
	Lainnya	7	2.0	6	1.7	15	4.3	5	1.4	33	9.4
	Total	16	4.6	36	10.3	65	18.6	26	7.4	143	40.9
Sangat Tertarik	PNS	0	0.0	2	0.6	5	1.4	0	0.0	7	2.0
	Karyawan	0	0.0	2	0.6	6	1.7	1	0.3	9	2.6
	Profesi	1	0.3	3	0.9	3	0.9	1	0.3	8	2.3
	Pelajar/ Mahasiswa	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.6
	Lainnya	1	0.3	0	0.0	5	1.4	1	0.3	7	2.0
	Total	3	0.9	8	2.3	19	5.4	3	0.9	33	9.4

Tabel Tanggapan Responden terhadap Penerapan Dalam Kehidupan Sehari-hari

Kriteria	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir								Total	
		SMA		Diploma		S1		Pasca Sarjana			
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Tidak Ingin	PNS	0	0.0	3	0.9	5	1.4	1	0.3	9	2.6
	Karyawan	2	0.6	0	0.0	5	1.4	1	0.3	8	2.3
	Profesi	1	0.3	2	0.6	4	1.1	2	0.6	9	2.6
	Pelajar/ Mahasiswa	3	0.9	0	0.0	1	0.3	0	0.0	4	1.1
	Lainnya	2	0.6	2	0.6	4	1.1	0	0.0	8	2.3
	Total	8	2.3	7	2.0	19	5.4	4	1.1	38	10.9
Biasa Saja	PNS	0	0.0	6	1.7	21	6.0	7	2.0	34	9.7
	Karyawan	3	0.9	10	2.9	15	4.3	7	2.0	35	10.0
	Profesi	3	0.9	3	0.9	6	1.7	8	2.3	20	5.7
	Pelajar/ Mahasiswa	4	1.1	3	0.9	1	0.3	0	0.0	8	2.3
	Lainnya	1	0.3	3	0.9	10	2.9	7	2.0	21	6.0
	Total	11	3.1	25	7.1	53	15.1	29	8.3	118	33.7
Ingin	PNS	0	0.0	15	4.3	16	4.6	6	1.7	37	10.6
	Karyawan	1	0.3	5	1.4	15	4.3	7	2.0	28	8.0
	Profesi	0	0.0	8	2.3	12	3.4	7	2.0	27	7.7
	Pelajar/ Mahasiswa	8	2.3	8	2.3	1	0.3	1	0.3	18	5.1
	Lainnya	9	2.6	5	1.4	16	4.6	5	1.4	35	10.0
	Total	18	5.1	41	11.7	60	17.1	26	7.4	145	41.4
Sangat Ingin	PNS	0	0.0	2	0.6	8	2.3	0	0.0	10	2.9
	Karyawan	0	0.0	2	0.6	7	2.0	4	1.1	13	3.7
	Profesi	2	0.6	2	0.6	5	1.4	3	0.9	12	3.4
	Pelajar/ Mahasiswa	1	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	3	0.9
	Lainnya	1	0.3	4	1.1	5	1.4	1	0.3	11	3.1
	Total	4	1.1	12	3.4	25	7.1	8	2.3	49	14.0

Tabel Tanggapan Responden terhadap Manfaat Mengikuti Forum Tatap Muka

Kriteria	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir								Total	
		SMA		Diploma		S1		Pasca Sarjana			
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Tidak Bermanfaat	PNS	0	0.0	4	1.1	4	1.1	0	0.0	8	2.3
	Karyawan	0	0.0	1	0.3	4	1.1	3	0.9	8	2.3
	Profesi	0	0.0	1	0.3	2	0.6	1	0.3	4	1.1
	Pelajar/Mahasiswa	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
	Lainnya	3	0.9	0	0.0	4	1.1	1	0.3	8	2.3
	Total	4	1.1	6	1.7	14	4.0	5	1.4	29	8.3
Biasa Saja	PNS	0	0.0	7	2.0	5	1.4	8	2.3	20	5.7
	Karyawan	4	1.1	4	1.1	13	3.7	9	2.6	30	8.6
	Profesi	1	0.3	6	1.7	10	2.9	8	2.3	25	7.1
	Pelajar/Mahasiswa	8	2.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	10	2.9
	Lainnya	1	0.3	3	0.9	10	2.9	5	1.4	19	5.4
	Total	14	4.0	22	6.3	38	10.9	30	8.6	104	29.7
Bermanfaat	PNS	0	0.0	11	3.1	36	10.3	3	0.9	50	14.3
	Karyawan	2	0.6	9	2.6	23	6.6	3	0.9	37	10.6
	Profesi	4	1.1	6	1.7	11	3.1	9	2.6	30	8.6
	Pelajar/Mahasiswa	3	0.9	8	2.3	2	0.6	1	0.3	14	4.0
	Lainnya	6	1.7	8	2.3	15	4.3	6	1.7	35	10.0
	Total	15	4.3	42	12.0	87	24.9	22	6.3	166	47.4
Sangat Bermanfaat	PNS	0	0.0	4	1.1	5	1.4	3	0.9	12	3.4
	Karyawan	0	0.0	3	0.9	2	0.6	4	1.1	9	2.6
	Profesi	1	0.3	2	0.6	4	1.1	2	0.6	9	2.6
	Pelajar/Mahasiswa	4	1.1	3	0.9	1	0.3	0	0.0	8	2.3
	Lainnya	3	0.9	3	0.9	6	1.7	1	0.3	13	3.7
	Total	8	2.3	15	4.3	18	5.1	10	2.9	51	14.6

Tabel Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Forum Tatap Muka
Terkait Penyebaran Informasi Publik

Kriteria	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir								Total	
		SMA		Diploma		S1		Pasca Sarjana			
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Kurang Efektif	PNS	0	0.0	2	0.6	5	1.4	2	0.6	9	2.6
	Karyawan	1	0.3	1	0.3	8	2.3	0	0.0	10	2.9
	Profesi	1	0.3	1	0.3	5	1.4	3	0.9	10	2.9
	Pelajar/ Mahasiswa	2	0.6	2	0.6	0	0.0	0	0.0	4	1.1
	Lainnya	0	0.0	1	0.3	5	1.4	2	0.6	8	2.3
	Total	4	1.1	7	2.0	23	6.6	7	2.0	41	11.7
Ragu-ragu	PNS	0	0.0	5	1.4	17	4.9	4	1.1	26	7.4
	Karyawan	0	0.0	8	2.3	10	2.9	5	1.4	23	6.6
	Profesi	4	1.1	4	1.1	6	1.7	6	1.7	20	5.7
	Pelajar/ Mahasiswa	3	0.9	2	0.6	2	0.6	0	0.0	7	2.0
	Lainnya	2	0.6	9	2.6	8	2.3	1	0.3	20	5.7
	Total	9	2.6	28	8.0	43	12.3	16	4.6	96	27.4
Efektif	PNS	0	0.0	13	3.7	17	4.9	8	2.3	38	10.9
	Karyawan	5	1.4	5	1.4	18	5.1	11	3.1	39	11.1
	Profesi	1	0.3	7	2.0	11	3.1	11	3.1	30	8.6
	Pelajar/ Mahasiswa	8	2.3	6	1.7	0	0.0	1	0.3	15	4.3
	Lainnya	5	1.4	3	0.9	16	4.6	9	2.6	33	9.4
	Total	19	5.4	34	9.7	62	17.7	40	11.4	155	44.3
Sangat Efektif	PNS	0	0.0	6	1.7	11	3.1	0	0.0	17	4.9
	Karyawan	0	0.0	3	0.9	6	1.7	3	0.9	12	3.4
	Profesi	0	0.0	3	0.9	5	1.4	0	0.0	8	2.3
	Pelajar/ Mahasiswa	3	0.9	3	0.9	1	0.3	0	0.0	7	2.0
	Lainnya	6	1.7	1	0.3	6	1.7	1	0.3	14	4.0
	Total	9	2.6	16	4.6	29	8.3	4	1.1	58	16.6

Tabel Tanggapan Responden terhadap Kinerja Pelaksana Forum Tatap Muka

Kriteria	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir								Total	
		SMA		Diploma		S1		Pasca Sarjana			
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Tidak Bagus	PNS	0	0.0	3	0.9	9	2.6	1	0.3	13	3.7
	Karyawan	0	0.0	4	1.1	10	2.9	0	0.0	14	4.0
	Profesi	1	0.3	1	0.3	3	0.9	1	0.3	6	1.7
	Pelajar/Mahasiswa	2	0.6	1	0.3	1	0.3	0	0.0	4	1.1
	Lainnya	1	0.3	1	0.3	5	1.4	2	0.6	9	2.6
	Total	4	1.1	10	2.9	28	8.0	4	1.1	46	13.1
Cukup	PNS	0	0.0	5	1.4	10	2.9	4	1.1	19	5.4
	Karyawan	2	0.6	2	0.6	8	2.3	6	1.7	18	5.1
	Profesi	3	0.9	4	1.1	3	0.9	4	1.1	14	4.0
	Pelajar/Mahasiswa	1	0.3	3	0.9	2	0.6	0	0.0	6	1.7
	Lainnya	3	0.9	8	2.3	10	2.9	3	0.9	24	6.9
	Total	9	2.6	22	6.3	33	9.4	17	4.9	81	23.1
Bagus	PNS	0	0.0	14	4.0	19	5.4	8	2.3	41	11.7
	Karyawan	2	0.6	8	2.3	15	4.3	9	2.6	34	9.7
	Profesi	1	0.3	6	1.7	13	3.7	8	2.3	28	8.0
	Pelajar/Mahasiswa	12	3.4	7	2.0	0	0.0	1	0.3	20	5.7
	Lainnya	5	1.4	5	1.4	12	3.4	7	2.0	29	8.3
	Total	20	5.7	40	11.4	59	16.9	33	9.4	152	43.4
Bagus Sekali	PNS	0	0.0	4	1.1	12	3.4	1	0.3	17	4.9
	Karyawan	2	0.6	3	0.9	9	2.6	4	1.1	18	5.1
	Profesi	1	0.3	4	1.1	8	2.3	7	2.0	20	5.7
	Pelajar/Mahasiswa	1	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	3	0.9
	Lainnya	4	1.1	0	0.0	8	2.3	1	0.3	13	3.7
	Total	8	2.3	13	3.7	37	10.6	13	3.7	71	20.3

Tabel Tanggapan Responden Terhadap Koordinasi Pelaksana Forum Tatap Muka Antara Pusat dan Daerah

Kriteria	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir								Total	
		SMA		Diploma		S1		Pasca Sarjana			
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Tidak Setuju	PNS	0	0.0	4	1.1	2	0.6	1	0.3	7	2.0
	Karyawan	0	0.0	2	0.6	3	0.9	2	0.6	7	2.0
	Profesi	1	0.3	1	0.3	3	0.9	2	0.6	7	2.0
	Pelajar/ Mahasiswa	2	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.9
	Lainnya	0	0.0	1	0.3	4	1.1	2	0.6	7	2.0
	Total	3	0.9	9	2.6	12	3.4	7	2.0	31	8.9
Ragu-ragu	PNS	0	0.0	3	0.9	12	3.4	5	1.4	20	5.7
	Karyawan	1	0.3	4	1.1	7	2.0	6	1.7	18	5.1
	Profesi	1	0.3	1	0.3	5	1.4	6	1.7	13	3.7
	Pelajar/ Mahasiswa	4	1.1	6	1.7	0	0.0	0	0.0	10	2.9
	Lainnya	4	1.1	1	0.3	6	1.7	4	1.1	15	4.3
	Total	10	2.9	15	4.3	30	8.6	21	6.0	76	21.7
Setuju	PNS	0	0.0	13	3.7	28	8.0	6	1.7	47	13.4
	Karyawan	4	1.1	9	2.6	24	6.9	5	1.4	42	12.0
	Profesi	4	1.1	8	2.3	15	4.3	4	1.1	31	8.9
	Pelajar/ Mahasiswa	7	2.0	2	0.6	2	0.6	1	0.3	12	3.4
	Lainnya	7	2.0	11	3.1	20	5.7	6	1.7	44	12.6
	Total	22	6.3	43	12.3	89	25.4	22	6.3	176	50.3
Sangat Setuju	PNS	0	0.0	6	1.7	8	2.3	2	0.6	16	4.6
	Karyawan	1	0.3	2	0.6	8	2.3	6	1.7	17	4.9
	Profesi	0	0.0	5	1.4	4	1.1	8	2.3	17	4.9
	Pelajar/ Mahasiswa	3	0.9	4	1.1	1	0.3	0	0.0	8	2.3
	Lainnya	2	0.6	1	0.3	5	1.4	1	0.3	9	2.6
	Total	6	1.7	18	5.1	26	7.4	17	4.9	67	19.1

Tabel Tanggapan Responden terhadap Peningkatan Pemahaman Atas Substansi Informasi Yang Disampaikan Melalui Forum Tatap Muka

Kriteria	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir								Total	
		SMA		Diploma		S1		Pasca Sarjana			
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Tidak Setuju	PNS	0	0.0	2	0.6	6	1.7	0	0.0	8	2.3
	Karyawan	0	0.0	2	0.6	5	1.4	3	0.9	10	2.9
	Profesi	0	0.0	4	1.1	4	1.1	2	0.6	10	2.9
	Pelajar/ Mahasiswa	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.6
	Lainnya	0	0.0	2	0.6	4	1.1	1	0.3	7	2.0
	Total	1	0.3	11	3.1	19	5.4	6	1.7	37	10.6
Ragu-ragu	PNS	0	0.0	9	2.6	15	4.3	6	1.7	30	8.6
	Karyawan	1	0.3	5	1.4	10	2.9	3	0.9	19	5.4
	Profesi	1	0.3	5	1.4	6	1.7	5	1.4	17	4.9
	Pelajar/ Mahasiswa	4	1.1	2	0.6	2	0.6	0	0.0	8	2.3
	Lainnya	2	0.6	2	0.6	8	2.3	3	0.9	15	4.3
	Total	8	2.3	23	6.6	41	11.7	17	4.9	89	25.4
Setuju	PNS	0	0.0	11	3.1	20	5.7	5	1.4	36	10.3
	Karyawan	4	1.1	6	1.7	19	5.4	8	2.3	37	10.6
	Profesi	4	1.1	3	0.9	13	3.7	10	2.9	30	8.6
	Pelajar/ Mahasiswa	6	1.7	8	2.3	1	0.3	1	0.3	16	4.6
	Lainnya	7	2.0	4	1.1	18	5.1	3	0.9	32	9.1
	Total	21	6.0	32	9.1	71	20.3	27	7.7	151	43.1
Sangat Setuju	PNS	0	0.0	4	1.1	9	2.6	3	0.9	16	4.6
	Karyawan	1	0.3	4	1.1	8	2.3	5	1.4	18	5.1
	Profesi	1	0.3	3	0.9	4	1.1	3	0.9	11	3.1
	Pelajar/ Mahasiswa	5	1.4	2	0.6	0	0.0	0	0.0	7	2.0
	Lainnya	4	1.1	6	1.7	5	1.4	6	1.7	21	6.0
	Total	11	3.1	19	5.4	26	7.4	17	4.9	73	20.9

Tabel Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan Forum Tatap Muka Sudah Berjalan Efektif dan Efisien

Kriteria	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir								Total	
		SMA		Diploma		S1		Pasca Sarjana			
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Tidak Setuju	PNS	0	0.0	1	0.3	6	1.7	1	0.3	8	2.3
	Karyawan	1	0.3	1	0.3	3	0.9	2	0.6	7	2.0
	Profesi	0	0.0	0	0.0	5	1.4	1	0.3	6	1.7
	Pelajar/ Mahasiswa	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6
	Lainnya	2	0.6	1	0.3	4	1.1	3	0.9	10	2.9
	Total	5	1.4	3	0.9	18	5.1	7	2.0	33	9.4
Ragu-ragu	PNS	0	0.0	5	1.4	8	2.3	3	0.9	16	4.6
	Karyawan	1	0.3	3	0.9	7	2.0	4	1.1	15	4.3
	Profesi	1	0.3	3	0.9	7	2.0	6	1.7	17	4.9
	Pelajar/ Mahasiswa	7	2.0	2	0.6	1	0.3	0	0.0	10	2.9
	Lainnya	2	0.6	5	1.4	8	2.3	3	0.9	18	5.1
	Total	11	3.1	18	5.1	31	8.9	16	4.6	76	21.7
Setuju	PNS	0	0.0	14	4.0	28	8.0	6	1.7	48	13.7
	Karyawan	4	1.1	10	2.9	21	6.0	8	2.3	43	12.3
	Profesi	1	0.3	10	2.9	13	3.7	11	3.1	35	10.0
	Pelajar/ Mahasiswa	3	0.9	7	2.0	1	0.3	1	0.3	12	3.4
	Lainnya	8	2.3	6	1.7	18	5.1	6	1.7	38	10.9
	Total	16	4.6	47	13.4	81	23.1	32	9.1	176	50.3
Setuju Sekali	PNS	0	0.0	6	1.7	8	2.3	4	1.1	18	5.1
	Karyawan	0	0.0	3	0.9	11	3.1	5	1.4	19	5.4
	Profesi	4	1.1	2	0.6	2	0.6	2	0.6	10	2.9
	Pelajar/ Mahasiswa	4	1.1	4	1.1	1	0.3	0	0.0	9	2.6
	Lainnya	1	0.3	2	0.6	5	1.4	1	0.3	9	2.6
	Total	9	2.6	17	4.9	27	7.7	12	3.4	65	18.6

Tabel Tanggapan Responden terhadap Sasaran Khalayak yang Tepat Berdasarkan Pekerjaan Dan Pendidikan Terakhir

Kriteria	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir								Total	
		SMA		Diploma		S1		Pasca Sarjana			
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Tidak Setuju	PNS	0	0.0	2	0.6	4	1.1	1	0.3	7	2.0
	Karyawan	1	0.3	3	0.9	2	0.6	2	0.6	8	2.3
	Profesi	0	0.0	1	0.3	1	0.3	2	0.6	4	1.1
	Pelajar/ Mahasiswa										
	Lainnya	2	0.6	2	0.6	0	0.0	0	0.0	4	1.1
	Total	0	0.0	2	0.6	6	1.7	2	0.6	10	2.9
Ragu-ragu	PNS	3	0.9	10	2.9	13	3.7	7	2.0	33	9.4
	Karyawan	0	0.0	5	1.4	11	3.1	0	0.0	16	4.6
	Profesi	0	0.0	2	0.6	6	1.7	2	0.6	10	2.9
	Pelajar/ Mahasiswa	0	0.0	3	0.9	4	1.1	2	0.6	9	2.6
	Lainnya	5	1.4	1	0.3	0	0.0	1	0.3	7	2.0
	Total	1	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.3	3	0.9
Setuju	PNS	6	1.7	11	3.1	22	6.3	6	1.7	45	12.9
	Karyawan	0	0.0	14	4.0	25	7.1	8	2.3	47	13.4
	Profesi	4	1.1	9	2.6	25	7.1	11	3.1	49	14.0
	Pelajar/ Mahasiswa	3	0.9	10	2.9	15	4.3	11	3.1	39	11.1
	Lainnya										
	Total	6	1.7	8	2.3	3	0.9	0	0.0	17	4.9
Sangat Setuju	PNS	6	1.7	11	3.1	15	4.3	7	2.0	39	11.1
	Karyawan	19	5.4	52	14.9	83	23.7	37	10.6	191	54.6
	Profesi	0	0.0	5	1.4	10	2.9	5	1.4	20	5.7
	Pelajar/ Mahasiswa	1	0.3	3	0.9	9	2.6	4	1.1	17	4.9
	Lainnya	3	0.9	1	0.3	7	2.0	5	1.4	16	4.6
	Total	3	0.9	2	0.6	0	0.0	0	0.0	5	1.4
Sangat Setuju	PNS	6	1.7	1	0.3	13	3.7	3	0.9	23	6.6
	Karyawan	13	3.7	12	3.4	39	11.1	17	4.9	81	23.1
	Profesi										
	Pelajar/ Mahasiswa										
	Lainnya										
	Total										